



**PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN
BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022
(PPAS-P)**

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022	iv
BAB I	I.1
PENDAHULUAN	I.1
I.1 Latar Belakang	I.2
I.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	I.2
I.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS	I.2
I.4 Sistematika Penyusunan PPAS	I.2
BAB II	II.1
RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH	II.1
II.1 Pendapatan Daerah	II.1
II.1.1 Pendapatan Asli Daerah	II.2
II.1.2 Pendapatan Transfer	II.2
II.1.3 Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah	II.3
BAB III	III.1
PRIORITAS BELANJA	III.1
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Balangan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	III.3
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi	III.23
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah	III.55
Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja	III.87
BAB IV	IV.1
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	IV.1
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	IV.1
Perkiraan Plafon Anggaran Belanja Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	IV.99
BAB V	V.1
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	V.1
BAB VI	VI.1
PENUTUP	VI.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Struktur Pagu Indikatif Pendapatan Daerah TA.2022	II-4
Tabel 3.1.	Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Balangan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	III.3
Tabel 3.2	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi	III-23
Tabel 3.3	Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah	III-56
Tabel 3.4	Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja	III-88
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rincian Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021	IV-1
Tabel 4.2	Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022	IV-99
Tabel 5.1	Perkiraan Rincian Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022	V-2

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 membuat ketentuan terkait perubahan KUA dan perubahan PPAS akibat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

1. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
2. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
3. perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan mengacu kepada Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun 2022. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang telah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada masing-masing SKPD. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dimaksud tetap disusun dengan tahapan :

1. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
3. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan

4. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) untuk masing-masing urusan baik menurut SKPD maupun menurut prioritas program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat diperlukan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Balangan dengan DPRD Kabupaten Balangan, untuk kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.2 Tujuan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh Instansi di Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA), program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

1.3 Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4135) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2015 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia I-3 Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 10) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
 - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- 16) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten balangan Tahun 2021- 2026;
- 19) Peraturan Bupati Balangan Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2022;

1.4 Sistematika Penyusunan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan PPAS Perubahan Tahun 2022.



Bab II Rencana Perubahan Penerimaan Daerah

Menguraikan Perubahan target pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang meliputi PAD, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta rencana perubahan penerimaan Pembiayaan.

Bab III Prioritas Belanja Daerah

Berisi prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah.

Bab IV Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan

Berisikan perubahan plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja dan plafon anggaran sementara berdasarkan program/kegiatan, belanja Operasi, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Bab V Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah

Menguraikan tentang rencana perubahan penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah serta ringkasan perubahan pagu indikatif Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.

Bab VI Penutup

Penutup

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH

Perubahan penerimaan Daerah merupakan rencana pendapatan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

II.1 Pendapatan Daerah

Kondisi umum pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun 2022 mengalami perubahan sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), pendapatan daerah untuk perubahan sedikit banyak dipengaruhi oleh faktor perkembangan ekonomi nasional dan regional, baik dikarenakan akibat wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang mulai masuk pada fase endemic dan juga krisis perang Rusia vs Ukraina. sehingga dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD 2022 diasumsikan sebesar Rp 1.098.008.355.581,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 678.538.911.728,00 atau 61,80% dari asumsi murni sebesar Rp 1.776.547.267.309,00. Secara garis besar pendapatan daerah dirinci sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Asumsi Sebelum Perubahan	Asumsi Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
Pendapatan Daerah	1.098.008.355.581	1.776.547.267.309	678.538.911.728	61,80
Pendapatan Asli Daerah	79.961.793.282	75.756.717.222	(4.205.076.060)	(5,26)
Pendapatan Transfer	988.178.562.299	1.694.611.504.514	706.432.942.215	71,49
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	29.868.000.000	6.179.045.573	(23.688.954.427)	(79,31)

Jika dilihat dari sisi kontribusi sumber-sumber penerimaan daerah terhadap pendapatan daerah masih didominasi oleh Dana transfer sebesar 95,39% atau Rp1.694.611.504.514,00 dibandingkan dengan pendapatan asli daerah yang hanya sebesar 4,26% atau Rp75.756.717.222 dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,35% atau Rp6.179.045.573. Asumsi pendapatan tersebut sudah memperhitungkan realisasi semester pertama dan potensi yang telah ada.

II.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan senilai Rp4.205.076.060,00 atau sebesar 5,26% dari asumsi murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp79.961.793.282,00 menjadi Rp 75.756.717.222,00 yang terdiri dari:

- a. Kelompok Pajak Daerah, pada asumsi perubahan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.327.100,00 dari senilai Rp11.765.022.948,00 menjadi Rp11.768.350.048,00.
- b. Kelompok Retribusi Daerah, pada asumsi murni senilai Rp1.733.889.000,00 sedangkan asumsi setelah perubahan senilai Rp 1.629.254.000,00 mengalami penurunan senilai Rp 104.635.000,00 atau sebesar 6,03%.
- c. Kelompok Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, asumsi sebelum perubahan sebesar Rp 10.847.692.278,00 meningkat sebesar 25,13% senilai Rp 2.725.583.201,00 atau menjadi sebesar Rp 13.573.275.479,00.
- d. Lain-lain PAD Yang Sah, asumsi perubahan sebesar Rp 48.785.837.695,00 turun sebesar 12,28% dari sebelumnya senilai Rp 55.615.189.056,00 atau turun sebesar Rp 6.829.351.361,00.

II.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer sebelum perubahan diasumsikan sebesar Rp988.178.562.299,00 sedangkan setelah perubahan sebesar Rp1.694.611.504.514,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 706.432.942.215,00 atau naik sebesar 71,49%. Adapun rincian dana transfer sebagaimana berikut;

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebelum perubahan diasumsikan sebesar Rp 911.480.194.899,00 sedangkan setelah perubahan sebesar Rp1.601.474.727.263,00 naik sebesar Rp 689.994.532.364,00 atau 76% dengan rincian sebagai berikut;

1. Dana Perimbangan Rp 1.479.361.349.263,00. terbagi atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 985.472.014.600,00.
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp346.527.140.000,00.
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp57.597.485.000,00.
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 89.764.709.663,00.

2. Dana Insentif Daerah (DID) Rp 13.333.129.000,00.
3. Dana Desa Rp 108.780.249.000,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah terdiri dari dana bagi hasil dan bantuan keuangan. Pendapatan dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun asumsi setelah perubahan sebesar Rp 93.136.777.251,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 16.438.409.851,00 atau sebesar 21% dari asumsi sebelum perubahan sebesar Rp76.698.367.400,00 yang terdiri dari;

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Rp 10.725.910.900,00
2. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp15.551.036.700,00
3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp54.599.829.651,00
4. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp 260.000.000,00
5. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp 12.000.000.000,00

II.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebelum perubahan diasumsikan sebesar Rp 29.868.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.688.954.427,00 atau turun 79,31% menjadi sebesar Rp 6.179.045.573,00 dengan rincian pendapatan sebagaimana berikut:

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah yang merupakan penerimaan pemerintah daerah kabupaten Balangan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga berupa Lumpsum Paymant dari perusahaan swasta berdasarkan perjanjian atau kontrak atas pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang besarnya tidak dapat diukur dengan skala pajak daerah maupun retribusi daerah yang dibayarkan secara sekaligus dengan sistem *self assesment* oleh pihak perusahaan. Asumsi pendapatan tersebut sebelum perubahan diasumsikan sebesar Rp 11.000.000.000,00 sedangkan setelah perubahan sebesar Rp 6.176.710.373,00.



b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan adalah Pendapatan Hibah Dana BOS dari sebesar Rp.18.868.000.000,00 di perubahan dipindahkan ke Pendapatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Kemudian ada penambahan Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan pada Partai Politik sebesar Rp2.335.200,00.

Sehingga dengan demikian secara struktur asumsi Pendapatan Daerah dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut;

Tabel 2.1
Struktur Perubahan Pagu Indikatif Pendapatan Daerah

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	79.961.793.282	75.756.717.222	-4.205.076.060	-5,26
4.1.01	Pajak Daerah	11.765.022.948	11.768.350.048	3.327.100	0,03
4.1.02	Retribusi Daerah	1.733.889.000	1.629.254.000	-104.635.000	-6,03
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.847.692.278	13.573.275.479	2.725.583.201	25,13
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	55.615.189.056	48.785.837.695	-6.829.351.361	-12,28
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	988.178.562.299	1.694.611.504.514	706.432.942.215	71,49
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	911.480.194.899	1.601.474.727.263	689.994.532.364	75,70
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	76.698.367.400	93.136.777.251	16.438.409.851	21,43
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29.868.000.000	6.179.045.573	-23.688.954.427	-79,31
4.3.01	Pendapatan Hibah	11.000.000.000	6.176.710.373	-4.823.289.627	-43,85
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.868.000.000	2.335.200	-18.865.664.800	-99,99
	Jumlah Pendapatan	1.098.008.355.581	1.776.547.267.309	678.538.911.728	61,80

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Dalam perjalanan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, terdapat penyesuaian terhadap pendapatan dan belanja daerah yang di tampung dalam pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kabupaten Balangan dalam penyesuaian Pendapatan dan Belanja melakukan lima (5) kali pergeseran APBD, yang didalamnya terdapat beberapa penyesuaian antara lain untuk menampung pendapatan daerah dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah. Sedangkan pada belanja adalah menyesuaikan belanja Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah, menampung pergeseran belanja operasional wajib SKPD seperti gaji dan tunjangan SKPD yang mengalami kekurangan dan juga belanja operasional kantor lainnya. Kemudian juga mengakomodir belanja untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanggulangan Bencana dan Covid.

Perubahan Prioritas dan plafon anggaran untuk masing-masing urusan SKPD baik program, kegiatan dan sub kegiatan serta perubahan perubahan alokasi belanja daerah disusun berdasarkan kemampuan pergerakan keuangan daerah dan realisasi semester pertama serta penyesuaian indikator setiap program dan kegiatan yang telah disusun ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Perubahan tersebut tentu tidak mempengaruhi akselerasi dukungan terhadap prioritas provinsi dan nasional serta RKP skala nasional yang merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Penyusunan RKP Tahun 2022 dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen

bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKP beserta perubahan RKP Tahun 2022 tetap menjadi pedoman bagi Kementerian/ Lembaga dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Perubahan RKPD tersebut menjadi acuan dalam proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Berkaitan dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Oleh karena itu, program dan rencana kerja pemerintah daerah akan disenergikan terhadap prioritas provinsi dan nasional melalui;

1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.
2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi.
3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah.
4. Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja

Yang akan dijabarkan sebagaimana tabel berikut;



1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Balangan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Tabel 3.1

**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Balangan
Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
			Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang0		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
			Persentase PPHI yang difasilitasi		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah		
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan		
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			PERSENTASE PERTUMBUHAN WIRUSAHA BARU PERTAHUN		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Persentase usaha mikro yang labanya meningkat		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
			Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Budidaya Ikan (ton)		
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Luas Kawasan Perikanan Lestari (Ha)		
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Persentase Jumlah Kunjungan Wisata		
				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Persentase Peningkatan Event Promosi		
				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
			Persentase Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Ternak		



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			PERSENTASE STABILITAS DAN JUMLAH KETERSEDIAAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			PERSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN PELAKU USAHA SETELAH PROMOSI		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			PERSENTASE ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) BERTANDA TERASAH		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			PERSENTASE BARANG BEREDAR YANG DIAWASI YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan				
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
			Persentase penatagunaan tanah		



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)		
				KECAMATAN HALONG	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				KECAMATAN JUI	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Angka rata-rata lama sekolah		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Harapan Lama Sekolah		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
			Persentase Kurikulum Penerapan Kurikulum Yang Sesuai		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
			Persentase PTK bersertifikasi		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Angka Kematian Ibu (AKI) per 100,000 Kelahiran Hidup		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Prevalensi Stunting		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Usia Harapan Hidup (UHH)		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Jumlah Produksi Rumah Tangga Yang Mempunyai Sertifikat Keamanan Pangan		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Persentase sarana produksi UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Persentase Pelayanan Kefarmasian (Apotik dan Toko Obat) Yang Memenuhi Standar dan Persyaratan		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase keluarga yang melaksanakan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
			Persentase Makam yang terawat		



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
			Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana tenaga kerja		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase tenaga kerja yang kompetensi/bersertifikat kompetensi		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Persentase ARG di SKPD/ Lembaga/ Instansi di Kabupaten		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)		



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan KIE KB		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19 Tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 tahun		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
			Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran; Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik; Tingkat Disiplin Aparatur; Tingkat Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Nilai SAKIP SKPD		
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Indeks Keamanan Informasi (KAMI)		
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
			Terfasilitasinya pengamanan informasi pemerintah daerah		
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			INDEKS PENGELOLAAN ASET DAERAH		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			% Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB, % Penerimaan PAD selain PBB -P2 dan BPHTB, dan Persentase Pendapatan non PAD		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Meningkatnya nilai LAKIP		
				KECAMATAN LAMPIHONG	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				KECAMATAN LAMPIHONG	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				KECAMATAN BATUMANDI	
			Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan		
				KECAMATAN BATUMANDI	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				KECAMATAN AWAYAN	
				KECAMATAN JUI	
				KECAMATAN PARINGIN	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				KECAMATAN PARINGIN	
			Waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		
				KECAMATAN PARINGIN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif kecamatan batumandi		
				KECAMATAN BATUMANDI	
			Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif kecamatan awayan		
				KECAMATAN AWAYAN	
			Persentase Desa Dengan Pemberdayaan Masyarakat Yang Aktif		
				KECAMATAN PARINGIN	
			Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
				KECAMATAN PARINGIN	
			Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif kecamatan paringin selatan		
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan Batumandi		
				KECAMATAN BATUMANDI	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
		PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional			
			Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni		



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Persentase terlaksananya pengelolaan Perpustakaan sesuai Standart Nasional Perpustakaan		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Terwujudnya Revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) BKPSDM		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Persentase Aset dalam Kondisi Baik		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Persentase tata kelola dan pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur berlaku		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Persentase pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Persentase Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
			Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Jumlah bangunan yang ditata		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Persentase jalan dalam kondisi mantap		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Persentase SDM jasa konstruksi dan BUJK yang dibina		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			luas kawasan kumuh 10-15 HA yang ditangani		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
			Luas kawasan kumuh 10-15 ha yang ditangani		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
			persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
			Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial		



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			prosentase cakupan ppks (lansiaDisabilitasAnak Terlantar Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)		
				DINAS PERHUBUNGAN	
			Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan		
				DINAS PERHUBUNGAN	
			Persentase Sarana Prasarana Perparkiran yang memadai		
				DINAS PERHUBUNGAN	
			Presentase Sarana Prasarana terminal yang memadai		
				DINAS PERHUBUNGAN	
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			
			Inseks Sistem Pemerintahan. Berbasis Elektronik (SPBE)		
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
			Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah		
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentasi Cagar Budaya Terlestarikan dan Terkelola Dengan Baik		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Indeks Inovasi		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				KECAMATAN LAMPIHONG	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi yang terpelihara dengan baik		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Angka Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				DINAS PERHUBUNGAN	
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Persentase kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi yang terlaksana dan		



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			berkualitas		
				SEKRETARIAT DAERAH	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi dan kerjasama daerah yang terlaksana dan berkualitas		
				SEKRETARIAT DAERAH	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Persentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, bidang perekonomian, bidang sumber daya alam yang terlaksana dan berkualitas		
				SEKRETARIAT DAERAH	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Tingkat Pelayanan Pelaksanaan Tugas DPRD		
				SEKRETARIAT DPRD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (nasional propinsi kabupaten)		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
			Persentase konsistensi dan keselarasan antara perencanaan tahunan terhadap perencanaan jangka menengah		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKA PD dengan Renja PD) bidang infrastruktur & kewilayahan		



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
			Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKA PD dengan Renja PD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
			Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja PD dengan Renstra PD) bidang infrastruktur & kewilayahan		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
			Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja PD dengan Renstra PD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Indeks Inovasi		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai Sakip)		
				INSPEKTORAT	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				INSPEKTORAT	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
			Indeks Integritas		
				INSPEKTORAT	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				KECAMATAN LAMPIHONG	
				KECAMATAN HALONG	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)		
				KECAMATAN HALONG	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				KECAMATAN TEBING TINGGI	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan Batumandi		
				KECAMATAN BATUMANDI	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				KECAMATAN JUAI	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif kecamatan lampihong		
				KECAMATAN LAMPIHONG	
			Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif		
				KECAMATAN TEBING TINGGI	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor		
				KECAMATAN LAMPIHONG	
			Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Batumandi		
				KECAMATAN BATUMANDI	
			Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan Awayan		
				KECAMATAN AWAYAN	
			Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor		
				KECAMATAN HALONG	
			Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Paringin		
				KECAMATAN PARINGIN	
			Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah		



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				KECAMATAN PARINGIN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan Awayan		
				KECAMATAN AWAYAN	
			Persentase penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa		
				KECAMATAN HALONG	
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan Tebing Tinggi		
				KECAMATAN TEBING TINGGI	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa		
				KECAMATAN LAMPIHONG	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			Persentase Ormas yang aktif		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
			Persentase Ormas Keagamaan yang Aktif		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			Persentase Potensi Konflik Sosial yang ditindaklanjuti		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	



2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Tabel 3.2

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
54	02. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	126.694.000	285.944.000
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	197.410.386.339	208.897.685.605
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
			Angka rata-rata lama sekolah			
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	62.223.092.250	82.020.782.113
			Harapan Lama Sekolah			
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	62.223.092.250	82.020.782.113
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				
			Persentase Kurikulum Penerapan Kurikulum Yang Sesuai			
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	101.000.000	174.862.000
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
			Persentase PTK bersertifikasi			
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	695.770.000	1.807.904.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				
			Akreditasi Lembaga PAUD			
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	205.000.000	205.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	50.901.065.296	62.187.695.900
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup			
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.010.808.808	10.943.465.339
			Angka Kematian Ibu (AKI) per 100,000 Kelahiran Hidup			
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.010.808.808	10.943.465.339
			Prevalensi Stunting			
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.010.808.808	10.943.465.339
			Usia Harapan Hidup (UHH)			
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.010.808.808	10.943.465.339
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
			Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar			
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	401.772.850	572.891.100
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
			Jumlah Produksi Rumah Tangga Yang Mempunyai Sertifikat Keamanan Pangan			
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	36.119.750	53.469.660
			Persentase sarana produksi UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan			
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	36.119.750	53.469.660
			Pesentase Pelayanan Kefarmasian (Apotik dan Toko Obat) Yang Memenuhi Standar dan Persyaratan			



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	36.119.750	53.469.660
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
			Persentase keluarga yang melaksanakan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)			
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	133.720.000	417.137.000
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
			Angka Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	284.728.500	284.728.500
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
			Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52.300.000	79.900.000
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
			prosentase cakupan ppks (lansiaDisabilitasAnak Terlantar Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	163.660.600	172.906.800
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				
			Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana tenaga kerja			
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	121.422.000	120.702.000
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
			Persentase tenaga kerja yang kompetensi/bersertifikat kompetensi			



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	2.329.006.350	1.792.292.900
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
			Persentase penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri			
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	97.590.000	94.849.800
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	900.000.000	900.000.000
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	900.000.000	900.000.000
			Persentase ARG di SKPD/ Lembaga/ Instansi di Kabupaten			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	900.000.000	900.000.000
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	92.610.000	88.215.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
			Cakupan sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan			



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	29.980.000	82.239.300
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
			Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan KIE KB			
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.320.000	12.320.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
			Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19 Tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)			
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	63.700.000	63.700.000
			Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 tahun			
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	63.700.000	63.700.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
			Berkembangnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			
				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	287.000.000	487.000.000
			Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan			
				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	350.315.000	956.316.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
			Berkembangnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan			
				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	6.379.880.000	6.667.890.000
			Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan			
				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	203.415.000	343.215.000
			TERFASILITASINYA KEGIATAN POPDA			



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	136.210.000	276.010.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
			Prosentase kegiatan kepramukaan tingkat Kabupaten dan Kecamatan			
				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	575.001.500	575.001.500
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
			Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni			
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	478.175.000	548.175.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
			Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah			
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	25.724.750	69.724.750
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
			INDEKS PENGELOLAAN ASET DAERAH			
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	120.489.150	120.489.150
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
				KECAMATAN BATUMANDI	55.000.000	59.500.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
			Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif kecamatan awayan			
				KECAMATAN AWAYAN	267.740.000	257.240.000
			Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif kecamatan paringin selatan			
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	320.919.600	320.919.600
55	03. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian					
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
			Angka rata-rata lama sekolah			
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.060.000.000	2.047.910.000



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Harapan Lama Sekolah			
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.060.000.000	2.047.910.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	8.679.550.819	10.825.710.001
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
			Persentase Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi			
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1.535.700.000	2.788.270.000
			Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun			
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	6.918.035.000	20.347.327.100
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				

				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1.700.000.000	12.068.548.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
			Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik			
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	2.429.396.000	11.694.693.000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
			Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik			



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	16.115.850.912	31.035.885.165
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
			Jumlah bangunan yang ditata			
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1.631.072.000	9.145.975.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
			Persentase jalan dalam kondisi mantap			
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	113.151.328.337	191.704.487.727
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
			Persentase SDM jasa konstruksi dan BUIK yang dibina			
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	471.988.928	2.611.988.928
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
			Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang			
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	400.000.000	594.163.200
			Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang0			
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	200.000.000	498.877.800
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			luas kawasan kumuh 10-15 HA yang ditangani			
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	2.360.888.900	2.785.404.900
			Luas kawasan kumuh 10-15 ha yang ditangani			
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1.180.444.450	1.392.702.450
			persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan			
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	2.360.888.900	2.785.404.900
			Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan			
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1.390.102.450	1.612.567.350
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni			
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	2.267.609.000	2.335.569.100
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
			Persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU			
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	45.169.881.967	73.076.365.517
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
			Persentase perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial			



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	110.620.000	110.620.000
			Persentase PPHI yang difasilitasi			
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	110.620.000	110.620.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
			Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan			
				DINAS PERHUBUNGAN	233.000.000	1.612.290.000
			Persentase Sarana Prasarana Perpustakaan yang memadai			
				DINAS PERHUBUNGAN	145.890.000	156.950.000
			Presentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek			
				DINAS PERHUBUNGAN	347.345.000	362.789.000
			Presentase Sarana Prasarana terminal yang memadai			
				DINAS PERHUBUNGAN	94.690.000	53.440.000
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan keterbukaan informasi publik			
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	2.794.582.524	5.955.569.640
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				
			Inseks Sistem Pemerintahan. Berbasis Elektronik (SPBE)			
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	5.170.337.860	6.254.268.860
			Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah			
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	712.700.000	747.900.000
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh			



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Dinas Kominfo			
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	5.170.337.860	6.254.268.860
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.971.375.275	6.499.352.675
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	825.775.150	965.225.850
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
			Persentase Koperasi Berkualitas			
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	55.470.300	55.470.300
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
			PERSENTASE KOPERASI YANG MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	44.445.000	232.945.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
			PERSENTASE PERTUMBUHAN WIRUSAHA BARU PERTAHUN			
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	229.647.600	238.447.600
			Persentase usaha mikro yang labanya meningkat			



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	229.647.600	238.447.600
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
			Persentase usaha mikro yang skala usahanya bertambah			
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	259.449.850	795.549.850
			PERSENTASE USAHA MIKRO YANG SUDAH MENERAPKAN E-COMMERCE			
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	259.449.850	795.549.850
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	7.151.713.847	7.264.254.247
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
			Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP			
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	44.860.000	44.860.000
			Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP			
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	44.860.000	44.860.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
			Indeks Keamanan Informasi (KAMI)			



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	26.400.000	30.800.000
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	26.400.000	30.800.000
			Terfasilitasinya pengamanan informasi pemerintah daerah			
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	26.400.000	30.800.000
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
			Luas Kawasan Perikanan Lestari (Ha)			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	103.825.000	103.825.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
			Peningkatan Prasarana Pertanian			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	5.436.917.810	26.926.578.940
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
			PERSENTASE PENINGKATAN SARPRAS			
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	45.571.000	66.871.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
			PERSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN PELAKU USAHA SETELAH PROMOSI			
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	168.602.900	177.402.900
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
			PROFIL IKM YANG BERKEMBANG			



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	800.000.000	1.050.000.050
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
			INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	1.357.380.700	1.374.085.355
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
			Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif kecamatan paringin selatan			
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	750.000.000	750.000.000
56	04. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6.562.164.489	7.628.638.657
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
			Angka Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.780.096.500	6.399.178.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	6.185.076.094	8.592.587.355
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.406.055.090	4.362.636.417
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
			Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk			
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	521.995.400	545.813.400
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL				



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil			
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	242.151.250	264.951.250
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
			Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	72.449.850	72.449.850
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				
			Jumlah Kerjasama yang disepakati di pedesaan			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	112.280.300	2.372.080.150
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
			Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.327.316.000	2.371.251.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang mendapatkan biaya operational dan Persentase BUMDes yang berkembang			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.207.603.700	4.331.385.750
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
				DINAS PERHUBUNGAN	3.398.979.370	4.116.814.683
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	3.728.011.509	3.874.419.984
			Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran; Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan			



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Prasarana Aparatur yang baik; Tingkat Disiplin Aparatur; Tingkat Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Nilai SAKIP SKPD			
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	3.728.011.509	3.874.419.984
			Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran; Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik; Tingkat Disiplin Aparatur; Tingkat Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Nilai SAKIP SKPD			
				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	7.033.501.395	7.410.434.589
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.639.648.289	5.645.607.389
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
			Persentase terlaksananya pengelolaan Perpustakaan sesuai Standart Nasional Perpustakaan			
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	52.800.000	48.400.000
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
			Terwujudnya Revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal			
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	15.699.850	59.699.850
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.020.544.950	1.368.799.400
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Sekretariat Daerah			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.020.544.950	1.368.799.400
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
				SEKRETARIAT DAERAH	16.304.215.900	22.510.549.800
			Persentase kebijakan di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta bidang Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang terlaksana dan berkualitas			
				SEKRETARIAT DAERAH	925.890.400	1.141.824.200
			Persentase kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi yang terlaksana dan berkualitas			



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				SEKRETARIAT DAERAH	2.467.801.500	2.103.058.000
			Persentase kebijakan di bidang tata usaha Pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga yang terlaksana dan berkualitas			
				SEKRETARIAT DAERAH	18.578.153.465	58.871.673.649
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
			Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi dan kerjasama daerah yang terlaksana dan berkualitas			
				SEKRETARIAT DAERAH	1.121.253.600	1.580.518.900
			Persentase kebijakan di bidang Bina Mental dan Spiritual, bidang Kesejahteraan Rakyat, dan bidang Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana dan berkualitas			
				SEKRETARIAT DAERAH	11.985.911.800	39.481.142.000
			Persentase kebijakan di bidang Perundang-Undangan, bidang Bantuan Hukum, dan bidang Dokumentasi dan Informasi yang terlaksana dan berkualitas			
				SEKRETARIAT DAERAH	768.577.200	1.245.299.100
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
			Persentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, bidang perekonomian, bidang sumber daya alam yang terlaksana dan berkualitas			
				SEKRETARIAT DAERAH	425.469.600	826.252.600
			Persentase kebijakan di bidang pengelolaan PBJ, bidang Pengelolaan LPSE, bidang Pembinaan dan advokasi PBJ yang terlaksana dan berkualitas			
				SEKRETARIAT DAERAH	548.389.550	1.042.108.150
			Persentase kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi serta pelaporan yang terlaksana dan berkualitas			
				SEKRETARIAT DAERAH	265.828.800	591.737.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
				SEKRETARIAT DPRD	1.170.000.000	1.909.200.000
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Sekretariat Daerah			
				SEKRETARIAT DPRD	28.015.970.397	36.332.343.651
			Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian			



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				SEKRETARIAT DPRD	14.878.231.180	15.586.331.180
			Prosentase pemenuhan administrasi laporan keuangan			
				SEKRETARIAT DPRD	14.878.231.180	15.586.331.180
			Prosentase Pemenuhan Administrasi Sarana dan Prasarana			
				SEKRETARIAT DPRD	14.878.231.180	15.586.331.180
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
			Tingkat pelayanan pelaksanaan tugas DPRD			
				SEKRETARIAT DPRD	5.207.549.500	5.909.866.800
			Tingkat Pelayanan Pelaksanaan Tugas DPRD			
				SEKRETARIAT DPRD	8.452.129.650	9.467.148.150
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6.159.630.715	6.257.104.615
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
			Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (nasional propinsi kabupaten)			
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	250.847.850	206.286.000
			Persentase konsistensi dan keselarasan antara perencanaan tahunan terhadap perencanaan jangka menengah			
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	149.125.850	153.683.850
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
			Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKA PD dengan Renja PD) bidang infrastruktur & kewilayahan			
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	689.657.800	998.247.800
			Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKA PD dengan Renja PD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia			



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	689.657.800	998.247.800
			Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja PD dengan Renstra PD) bidang infrastruktur & kewilayahan			
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	689.657.800	998.247.800
			Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja PD dengan Renstra PD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia			
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	689.657.800	998.247.800
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	11.112.372.173	11.486.172.173
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
			INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	197.802.309.900	253.256.616.993
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
			INDEKS PENGELOLAAN ASET DAERAH			
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	463.339.250	580.265.250
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
			% Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB, % Penerimaan PAD selain PBB -P2 dan BPHTB, dan Persentase Pendapatan non PAD			
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	163.129.800	254.287.800
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) BKPSDM			



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.489.029.432	5.385.832.722
			Persentase Aset dalam Kondisi Baik			
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	739.639.410	1.156.039.410
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
			Persentase tata kelola dan pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur berlaku			
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.088.183.800	4.543.762.450
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
			Persentase pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur			
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.084.311.600	1.466.291.600
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
			Indeks Inovasi			
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	873.759.600	648.218.700
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)			
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	873.759.600	648.218.700
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai Sakip)			
				INSPEKTORAT	22.000.000	134.450.000
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
				INSPEKTORAT	4.211.838.440	6.533.800.585
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
			Persentase SKPD yang mendapatkan nilai akuntabilitas baik			
				INSPEKTORAT	649.649.850	621.199.850



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
				KECAMATAN LAMPIHONG	3.509.516.976	3.838.502.176
			Tingkat Kelancaran administrasi Perkantoraan			
				KECAMATAN LAMPIHONG	3.019.733.376	3.040.363.076
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
				KECAMATAN BATUMANDI	2.716.288.983	3.399.766.319
				KECAMATAN AWAYAN	2.992.692.867	3.372.775.823
				KECAMATAN HALONG	44.886.000	44.886.000
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)			
				KECAMATAN HALONG	3.052.180.843	3.581.220.803
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
				KECAMATAN JUAI	2.419.186.752	2.883.847.953
				KECAMATAN PARINGIN	4.938.785.131	5.239.698.801
			Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum			
				KECAMATAN PARINGIN	455.389.900	547.739.150
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
				KECAMATAN PARINGIN	4.938.785.131	5.239.698.801
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)			
				KECAMATAN PARINGIN	12.777.900	12.777.900
			Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan			
				KECAMATAN PARINGIN	3.793.049.131	3.936.282.071
			Persentasi ketersediaan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang telah disampaikan tepat waktu			
				KECAMATAN PARINGIN	12.777.900	12.777.900
			Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN			
				KECAMATAN PARINGIN	3.793.049.131	3.936.282.071
			Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah			



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				KECAMATAN PARINGIN	79.025.000	113.492.000
				Terpenuhinya Pelayanan Kepada Masyarakat		
				KECAMATAN PARINGIN	19.483.000	298.483.000
				Waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		
				KECAMATAN PARINGIN	132.600.400	132.280.400
				Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
				KECAMATAN PARINGIN	465.942.800	497.127.280
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				KECAMATAN TEBING TINGGI	2.268.347.327	2.759.399.297
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	3.356.856.934	4.029.677.639
				Tingkat Disiplin Aparatur		
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	3.356.856.934	4.029.677.639
				Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran		
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	3.356.856.934	4.029.677.639
				Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik		
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	74.419.500	170.603.200
				Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik		
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	3.282.437.434	3.859.074.439
				Tingkat Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	3.356.856.934	4.029.677.639
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
				Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan		
				KECAMATAN LAMPIHONG	68.193.200	74.934.000
				IKM Kecamatan Batumandi		
				KECAMATAN BATUMANDI	106.327.736	118.675.000
				Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan		
				KECAMATAN HALONG	108.418.000	134.818.000
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				KECAMATAN JUAI	116.107.300	138.824.100
				IKM Kecamatan Paringin		
				KECAMATAN PARINGIN	77.063.800	64.999.000
				Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan		
				KECAMATAN PARINGIN	77.063.800	64.999.000
				IKM Kecamatan Paringin Selatan		
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	117.435.000	117.435.000
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
				Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif kecamatan lampihong		
				KECAMATAN LAMPIHONG	318.729.600	331.508.000
				Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif kecamatan batumandi		
				KECAMATAN BATUMANDI	267.080.000	271.260.000
				Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa		
				KECAMATAN HALONG	328.200.000	328.200.000
				Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif kecamatan Juai		
				KECAMATAN JUAI	10.897.200	32.897.200
				Persentase Desa Dengan Pemberdayaan Masyarakat Yang Aktif		
				KECAMATAN PARINGIN	256.050.000	251.454.000
				Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan		
				KECAMATAN PARINGIN	1.104.999.200	1.104.999.200
				Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
				KECAMATAN PARINGIN	256.050.000	251.454.000

				KECAMATAN PARINGIN	1.105.000.000	1.104.997.500
				Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif		
				KECAMATAN TEBING TINGGI	174.533.200	168.865.500
				Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif kecamatan paringin selatan		
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	12.555.000	213.165.000



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
			Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor			
				KECAMATAN LAMPIHONG	33.472.600	43.127.000
			Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Batumandi			
				KECAMATAN BATUMANDI	11.750.000	8.500.000
			Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor			
				KECAMATAN HALONG	9.014.000	9.014.000
			Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Juai			
				KECAMATAN JUAI	43.200.000	56.400.000
			Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Paringin			
				KECAMATAN PARINGIN	7.650.000	10.030.000
			Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah			
				KECAMATAN PARINGIN	7.650.000	10.030.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
			Persentase penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa			
				KECAMATAN LAMPIHONG	145.309.200	161.869.200
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan Batumandi			
				KECAMATAN BATUMANDI	140.812.500	152.637.500
			Persentase penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa			
				KECAMATAN HALONG	179.940.000	158.137.000
				KECAMATAN PARINGIN	116.995.000	116.910.000
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan Paringin			
				KECAMATAN PARINGIN	116.995.000	116.910.000
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan Tebing Tinggi			
				KECAMATAN TEBING TINGGI	221.519.800	216.001.000
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan paringin selatan			
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	229.040.000	165.930.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa			
				KECAMATAN LAMPIHONG	45.073.100	42.663.500
			Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik kecamatan Batumandi			
				KECAMATAN BATUMANDI	23.850.000	27.200.000
			Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik kecamatan Awayan			
				KECAMATAN AWAYAN	62.700.000	63.180.000
			Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa			
				KECAMATAN HALONG	7.564.800	7.564.800
			Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik kecamatan Paringin			
				KECAMATAN PARINGIN	18.125.000	18.125.000
			Persentase Desa Dengan Administrasi Pencatatan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Aturan; Persentase Desa Yang Menyampaikan Usulan Musyawarah Pembangunan Desa Sesuai Aturan			
				KECAMATAN PARINGIN	18.125.000	18.125.000
			Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik kecamatan Tebing Tinggi			
				KECAMATAN TEBING TINGGI	82.993.605	119.493.605
			Persentase usulan musrenbang yang di akomodir; Persentase jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu			
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	272.860.000	272.860.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja			
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	38.125.000	72.605.000
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
			Persentase Peran Aktif Kelompok Masyarakat			
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	60.850.000	1.581.630.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
			Persentase Ormas yang aktif			
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	62.006.000	89.486.000
57	05. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang			
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	394.720.000	778.679.750
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.413.092.727	5.779.148.577
			Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran			
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.176.521.615	5.387.577.465
			Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran			
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	236.571.112	391.571.112
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
			Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan			
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.133.422.610	6.866.486.870
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
			Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana dan Prosentase Desa Siaga Bencana			
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	590.299.000	697.939.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
			Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	92.000.000	83.841.050
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase Fakir Miskin yang difasilitasi bantuan sosial			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.090.043.003	4.094.443.003
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	13.240.000	20.000.000
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	13.240.000	20.000.000
			Persentase ARG di SKPD/ Lembaga/ Instansi di Kabupaten			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	13.240.000	20.000.000
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				
			Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian kelebihan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee			
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	3.600.000	3.600.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	104.500.000	104.500.000
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
			Persentase perencanaan lingkungan hidup			



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	215.510.000	215.510.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
			Indeks kualitas udara, air dan tutupan lahan			
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	777.444.000	777.443.650
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
			Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi yang terpelihara dengan baik			
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	1.918.862.900	2.277.009.300
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
			Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah berbahaya dan beracun (limbah B3)			
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	73.960.000	73.960.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
			Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan			
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	37.061.300	37.061.050
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				
			Persentase pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH			
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	25.000.000	25.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
			Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup masyarakat			
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	25.645.000	25.645.000



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
			Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat			
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	119.340.000	119.340.000
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
			Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup			
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	40.900.000	40.900.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
			Persentase pengelolaan persampahan			
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	3.908.468.000	9.538.968.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
			Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan Awayan			
				KECAMATAN AWAYAN	17.090.000	12.590.000
67	01. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian & Pariwisata					
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
			Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	82.255.000	82.254.700
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
			Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan			
				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	1.584.755.200	5.652.605.200
		TERFASILITASINYA KEGIATAN POPDA				
				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	1.584.755.200	5.652.605.200
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Jumlah Produksi Budidaya Ikan (ton)			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.373.630.500	13.918.002.200
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
			Persentase Peningkatan Event Promosi			
				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	174.376.000	232.196.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
			Persentasi UPPB / Kelompok Tani penerima bantuan Sarana Pertanian			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	13.701.365.540	32.627.922.840
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
			Persentasi Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	466.511.450	646.284.100
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
			Persentasi Petani Peserta Pelatihan yang Memperoleh Sertifikat			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	696.158.000	1.203.262.000
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
			Persentase IKM yang menerapkan teknologi industri			
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	74.627.300	549.627.300
			PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI			
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	74.627.300	549.627.300



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				
			PERSENTASE PRODUK INDUSTRI YANG BERSERTIFIKAT HALAL			
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	34.897.200	34.807.200
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
			PROFIL IKM YANG BERKEMBANG			
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	69.439.900	93.639.700
68	06. Pengembangan Kalsel Sebagai Gerbang Food Estate Dan Ibukota Negara					
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
			Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.065.888.000	1.716.262.150
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
			Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	127.145.000	138.928.000
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
			Persentase Pembinaan Sejarah Lokal			
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	359.845.000	834.845.000
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
			Persentasi Cagar Budaya Terlestarikan dan Terkelola Dengan Baik			
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	322.870.000	455.410.000





3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Tabel 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif							
		Meningkatnya Budaya Balangan yang Terlestarikan						
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
				TERFASILITASINYA KEGIATAN POPDA				
					DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	1.720.965.200	5.928.615.200	
		Meningkatnya Indeks Pendidikan						
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Angka rata-rata lama sekolah				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	13.453.191.300	20.087.734.988	
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi						
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	6.027.791.600	9.359.525.600	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
				Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	508.580.000	555.712.000	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
				Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	329.020.000	329.018.800	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)				



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	37.306.737.788	41.112.107.388	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
				Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha				
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	56.880.000	56.880.000	
				Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan				
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	56.880.000	56.880.000	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
				Nilai Persetujuan Investasi/Rencana Investasi				
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	1.062.560.000	1.062.560.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
				Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	383.320.000	1.994.812.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
				Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan				
					DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	1.401.260.000	3.825.264.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
				Jumlah Produksi Budidaya Ikan (ton)				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	5.494.522.000	55.672.008.800	
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
				Luas Kawasan Perikanan Lestari (Ha)				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	415.300.000	415.300.000	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Jumlah Kunjungan Wisata				
					DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	498.992.000	525.392.000	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
				Persentase Peningkatan Event Promosi				
					DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	697.504.000	928.784.000	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Persentasi UPPB / Kelompok Tani penerima bantuan Sarana Pertanian				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	53.997.747.960	129.703.977.160	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Peningkatan Prasarana Pertanian				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	21.747.671.240	107.706.315.760	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
				Persentasi Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.866.045.800	2.585.136.400	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Persentasi Petani Peserta Pelatihan yang Memperoleh Sertifikat				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.784.632.000	4.813.048.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
				Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi				
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	202.920.000	196.920.000	
		Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif kecamatan awayan				
					KECAMATAN AWAYAN	267.740.000	257.240.000	
		Menurunnya angka pengangguran terbuka						



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
				Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana tenaga kerja				
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	121.422.000	120.702.000	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				Persentase tenaga kerja yang kompetensi/bersertifikat kompetensi				
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	2.329.006.350	1.792.292.900	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				Persentase penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri				
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	97.590.000	94.849.800	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				Persentase perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial				
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	110.620.000	110.620.000	
				Persentase PPHI yang difasilitasi				
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	110.620.000	110.620.000	

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Harapan Lama Sekolah				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6.726.595.650	10.043.867.494	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan pelayanan administrasi perkantoran				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.929.345.075	5.264.926.975	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Berkembangnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				
					DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	287.000.000	487.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
				Berkembangnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				
					DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	6.379.880.000	6.667.890.000	
				Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				
					DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	1.788.170.200	5.995.820.200	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
				Prosentase kegiatan kepramukaan tingkat Kabupaten dan Kecamatan				
					DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	575.001.500	575.001.500	
2	2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan							
		Meningkatnya Budaya Balangan yang Terlestarikan						
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
				Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	478.175.000	548.175.000	
		Meningkatnya Indeks Kesehatan						
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	82.462.670.920	281.389.762.440	
				Prevalensi Stunting				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	82.462.670.920	281.389.762.440	
				Usia Harapan Hidup (UHH)				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	82.462.670.920	281.389.762.440	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar				



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	74.726.864.250	79.577.892.250	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Pesentase Pelayanan Kefarmasian (Apotik dan Toko Obat) Yang Memenuhi Standar dan Persyaratan				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	180.598.750	267.348.300	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 tahun				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	318.500.000	318.500.000	
		Meningkatnya Indeks Pendidikan						
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Angka rata-rata lama sekolah				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	116.526.493.200	158.885.997.238	
		Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	676.690.000	2.550.440.000	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	995.407.846.695	#####	
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	510.484.967.730	769.454.416.885	
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.128.875.750	4.826.129.250	
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	541.352.000	2.040.352.000	
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
				Persentase Koperasi Berkualitas				



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	221.881.200	221.881.200	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
				PERSENTASE KOPERASI YANG MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	177.780.000	931.780.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				PERSENTASE PERTUMBUHAN WIRUSAHA BARU PERTAHUN				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	918.590.400	953.790.400	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
				PERSENTASE USAHA MIKRO YANG SUDAH MENERAPKAN E-COMMERCE				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.037.799.400	3.182.199.400	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Persentasi UPPB / Kelompok Tani penerima bantuan Sarana Pertanian				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	807.714.200	807.714.200	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
				PERSENTASE PENINGKATAN SARPRAS				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	182.284.000	267.484.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
				PERSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN PELAKU USAHA SETELAH PROMOSI				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	674.411.600	709.611.600	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI				



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	298.509.200	2.198.509.200	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA					
				PERSENTASE PRODUK INDUSTRI YANG BERSERTIFIKAT HALAL				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	139.588.800	139.228.800	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
				PROFIL IKM YANG BERKEMBANG				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.477.759.600	4.574.559.000	

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Harapan Lama Sekolah				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	58.263.246.600	79.442.998.619	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
				Persentase Kurikulum Penerapan Kurikulum Yang Sesuai				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	101.000.000	174.862.000	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
				Persentase PTK bersertifikasi				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	695.770.000	1.807.904.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					
				Akreditasi Lembaga PAUD				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	205.000.000	205.000.000	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Angka Kematian Ibu (AKI) per 100,000 Kelahiran Hidup				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	16.492.534.184	56.277.952.488	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Jumlah Produksi Rumah Tangga Yang Mempunyai Sertifikat Keamanan Pangan				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	36.119.750	53.469.660	
				Persentase sarana produksi UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	36.119.750	53.469.660	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Persentase keluarga yang melaksanakan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	187.493.050	731.933.700	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				Cakupan sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	29.980.000	82.239.300	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan KIE KB				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.320.000	12.320.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19 Tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	63.700.000	63.700.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan pelayanan administrasi perkantoran				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.042.030.200	1.234.425.700	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				Persentase usaha mikro yang labanya meningkat				



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	229.647.600	238.447.600	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
				Persentase usaha mikro yang skala usahanya bertambah				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	259.449.850	795.549.850	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.671.898.389	5.677.857.489	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				Persentase terlaksananya pengelolaan Perpustakaan sesuai Standart Nasional Perpustakaan				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	178.879.000	673.523.000	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				Persentase IKM yang menerapkan teknologi industri				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	74.627.300	549.627.300	
3	3. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan Paringin							
		Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	57.134.095.595	79.636.191.505	
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	20.229.899.545	23.767.191.920	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	913.224.133.500	#####	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)				
					INSPEKTORAT	821.065.000	1.820.325.005	
		Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur publik						
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
				Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	2.429.396.000	11.694.693.000	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	16.115.850.912	31.035.885.165	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
				Jumlah bangunan yang ditata				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1.631.072.000	9.145.975.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				Persentase jalan dalam kondisi mantap				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	113.151.328.337	191.704.487.727	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
				Persentase SDM jasa konstruksi dan BUJK yang dibina				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	500.000.000	2.700.000.000	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				Luas kawasan kumuh 10-15 ha yang ditangani				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1.180.444.450	1.392.702.450	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				Persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	45.297.566.967	73.207.090.517	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan				
					DINAS PERHUBUNGAN	233.000.000	1.612.290.000	
				Presentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek				
					DINAS PERHUBUNGAN	347.345.000	362.789.000	
				Presentase Sarana Prasarana terminal yang memadai				
					DINAS PERHUBUNGAN	94.690.000	53.440.000	
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA					
				Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	712.700.000	747.900.000	
		Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif kecamatan paringin selatan				
					KECAMATAN PARINGIN SELATAN	750.000.000	750.000.000	

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				Persentase Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	2.035.040.000	3.280.730.000	
				Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	8.098.105.000	21.992.415.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9

					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1.700.000.000	12.068.548.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
				Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	794.720.000	1.372.842.950	
				Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang0				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	200.000.000	498.877.800	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
				Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	801.006.000	769.389.600	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				luas kawasan kumuh 10-15 HA yang ditangani				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	2.360.888.900	2.785.404.900	
				persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	2.360.888.900	2.785.404.900	
				Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1.390.102.450	1.612.567.350	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
				Cakupan ketersediaan rumah layak huni				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	2.267.609.000	2.335.569.100	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					
				Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian kelebihan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee				
					DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	3.600.000	3.600.000	
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase perencanaan lingkungan hidup				
					DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	215.510.000	215.510.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Indeks kualitas udara, air dan tutupan lahan				
					DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	777.444.000	777.443.650	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
				Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi yang terpelihara dengan baik				
					DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	1.918.862.900	2.277.009.300	
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
				Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah berbahaya dan beracun (limbah B3)				
					DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	73.960.000	73.960.000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
				Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan				
					DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	37.061.300	37.061.050	
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					
				Persentase pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH				
					DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	25.000.000	25.000.000	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup masyarakat				
					DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	25.645.000	25.645.000	
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat				
					DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	119.340.000	119.340.000	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup				
					DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	40.900.000	40.900.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
				Persentase pengelolaan persampahan				
					DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	3.908.468.000	9.538.968.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)				
					DINAS PERHUBUNGAN	6.299.900	0	
				Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan				
					DINAS PERHUBUNGAN	253.350.000	253.350.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran; Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik; Tingkat Disiplin Aparatur; Tingkat Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Nilai SAKIP SKPD				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	4.045.979.909	4.753.438.384	
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
				Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan keterbukaan informasi publik				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	2.905.532.224	6.116.814.640	
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA					
				Inseks Sistem Pemerintahan. Berbasis Elektronik (SPBE)				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	5.170.337.860	6.254.268.860	
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	5.170.337.860	6.254.268.860	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
				Persentase data yang tersedia untuk mengukur target kinerja perencanaan				



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	185.679.700	205.280.800	
				Persentase elemen data dan informasi yg terpublikasikan dan terupdate				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	185.679.700	205.280.800	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
				Indeks Keamanan Informasi (KAMI)				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	26.400.000	30.800.000	
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	26.400.000	30.800.000	
				Terfasilitasinya pengamanan informasi pemerintah daerah				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	26.400.000	30.800.000	
4	5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara							
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor				
					KECAMATAN LAMPIHONG	66.945.200	86.254.000	
				Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Batumandi				
					KECAMATAN BATUMANDI	23.500.000	17.000.000	
				Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor				
					KECAMATAN HALONG	18.028.000	18.028.000	
				Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Juai				
					KECAMATAN JUAI	86.400.000	112.800.000	
				Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Paringin				
					KECAMATAN PARINGIN	15.300.000	20.060.000	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	32.542.819.445	37.875.190.285	
					DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	31.447.880.470	43.485.436.775	
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.953.275.450	21.736.182.085	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
				Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.609.977.000	2.729.067.000	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
				Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.210.756.250	1.324.756.250	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
				Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	362.249.250	362.249.250	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1.225.000.000	1.575.000.000	
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	5.102.724.750	6.843.997.000	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Sekretariat Daerah				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	5.102.724.750	6.843.997.000	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)				
					SEKRETARIAT DAERAH	81.521.079.500	112.552.749.000	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi dan kerjasama daerah yang terlaksana dan berkualitas				



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					SEKRETARIAT DAERAH	5.606.268.000	7.902.594.500	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, bidang perekonomian, bidang sumber daya alam yang terlaksana dan berkualitas				
					SEKRETARIAT DAERAH	2.127.348.000	4.131.263.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)				
					SEKRETARIAT DPRD	5.850.000.000	9.546.000.000	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Sekretariat Daerah				
					SEKRETARIAT DPRD	140.079.851.985	181.661.718.255	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Tingkat Pelayanan Pelaksanaan Tugas DPRD				
					SEKRETARIAT DPRD	37.477.148.250	41.308.360.750	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	45.747.110.625	44.857.320.125	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (nasional propinsi kabupaten)				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.510.368.500	1.958.614.250	
				Persentase konsistensi dan keselarasan antara perencanaan tahunan terhadap perencanaan jangka menengah				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.576.300.750	6.128.051.750	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKA PD dengan Renja PD) bidang infrastruktur & kewilayahan				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8.952.083.250	12.049.339.250	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKA PD dengan Renja PD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8.952.083.250	12.049.339.250	
				Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja PD dengan Renstra PD) bidang infrastruktur & kewilayahan				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8.952.083.250	12.049.339.250	
				Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja PD dengan Renstra PD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8.952.083.250	12.049.339.250	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	57.390.510.865	59.655.760.865	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	82.574.319.500	63.215.730.940	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
				INDEKS PENGELOLAAN ASET DAERAH				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	2.919.142.000	3.503.772.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
				% Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB, % Penerimaan PAD selain PBB -P2 dan BPHTB, dan Persentase Pendapatan non PAD				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	815.649.000	1.271.439.000	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Indeks Inovasi				



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.618.797.750	6.741.393.500	
				Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.618.797.750	6.741.393.500	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)				
					INSPEKTORAT	22.928.483.950	36.021.884.010	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
				Persentase SKPD yang mendapatkan nilai akuntabilitas baik				
					INSPEKTORAT	5.228.248.500	7.919.848.500	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
				Indeks Integritas				
					INSPEKTORAT	455.723.500	5.405.470.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)				
					KECAMATAN LAMPIHONG	17.547.584.880	19.192.510.880	
					KECAMATAN BATUMANDI	14.048.069.915	17.320.206.595	
					KECAMATAN AWAYAN	16.601.796.835	18.768.276.615	
					KECAMATAN HALONG	236.105.000	236.105.000	
					KECAMATAN PARINGIN	24.693.925.655	26.198.494.005	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)				
					KECAMATAN PARINGIN	24.693.925.655	26.198.494.005	
					KECAMATAN TEBING TINGGI	11.341.736.635	13.796.996.485	
					KECAMATAN PARINGIN SELATAN	16.794.097.170	20.158.200.695	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan				
					KECAMATAN LAMPIHONG	340.966.000	374.670.000	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				IKM Kecamatan Batumandi				
					KECAMATAN BATUMANDI	531.638.680	593.375.000	
				Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan				
					KECAMATAN HALONG	542.090.000	674.090.000	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
					KECAMATAN JUAI	580.536.500	694.120.500	
				IKM Kecamatan Paringin				
					KECAMATAN PARINGIN	385.319.000	324.995.000	
				IKM Kecamatan Paringin Selatan				
					KECAMATAN PARINGIN SELATAN	587.175.000	587.175.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				Persentase penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa				
					KECAMATAN LAMPIHONG	726.546.000	809.346.000	
				Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan Batumandi				
					KECAMATAN BATUMANDI	704.062.500	763.187.500	
				Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan Awaysan				
					KECAMATAN AWAYAN	699.000.000	699.750.000	
				Persentase penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa				
					KECAMATAN HALONG	899.700.000	790.685.000	
				Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan Paringin				
					KECAMATAN PARINGIN	584.975.000	584.550.000	
				Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan Tebing Tinggi				
					KECAMATAN TEBING TINGGI	1.107.599.000	1.080.005.000	
				Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan paringin selatan				
					KECAMATAN PARINGIN SELATAN	1.145.200.000	829.650.000	
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi						
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP				



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	533.600.000	533.600.000	
				Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP				
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	533.600.000	533.600.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
				Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal				
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	583.640.000	583.640.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	4.082.179.800	5.475.197.600	
					KECAMATAN HALONG	188.884.000	188.884.000	
					KECAMATAN PARINGIN	19.755.140.524	20.958.795.204	
		Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif kecamatan lampihong				
					KECAMATAN LAMPIHONG	318.729.600	331.508.000	
				Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif kecamatan batumandi				
					KECAMATAN BATUMANDI	267.080.000	271.260.000	
				Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa				
					KECAMATAN HALONG	328.200.000	328.200.000	
				Pesentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif kecamatan Juai				
					KECAMATAN JUAI	10.897.200	32.897.200	
				Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif				
					KECAMATAN TEBING TINGGI	174.533.200	168.865.500	
				Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif kecamatan paringin selatan				
					KECAMATAN PARINGIN SELATAN	333.474.600	534.084.600	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa				
					KECAMATAN LAMPIHONG	45.073.100	42.663.500	
				Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik kecamatan Batumandi				
					KECAMATAN BATUMANDI	23.850.000	27.200.000	
				Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik kecamatan Awan				
					KECAMATAN AWAN	62.700.000	63.180.000	
				Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa				
					KECAMATAN HALONG	7.564.800	7.564.800	
				Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik kecamatan Paringin				
					KECAMATAN PARINGIN	18.125.000	18.125.000	
				Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik kecamatan Tebing Tinggi				
					KECAMATAN TEBING TINGGI	82.993.605	119.493.605	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)				
					DINAS PERHUBUNGAN	3.537.825.370	4.307.860.683	
				Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran; Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik; Tingkat Disiplin Aparatur; Tingkat Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Nilai SAKIP SKPD				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	245.000.000	315.000.000	
				Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran; Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik; Tingkat Disiplin Aparatur; Tingkat Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Nilai SAKIP SKPD				
					DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	7.033.501.395	7.410.434.589	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
				Terwujudnya Revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	15.699.850	59.699.850	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
				Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	25.724.750	69.724.750	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase kebijakan di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta bidang Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang terlaksana dan berkualitas				
					SEKRETARIAT DAERAH	925.890.400	1.141.824.200	
				Persentase kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi yang terlaksana dan berkualitas				
					SEKRETARIAT DAERAH	2.467.801.500	2.103.058.000	
				Persentase kebijakan di bidang tata usaha Pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga yang terlaksana dan berkualitas				
					SEKRETARIAT DAERAH	18.578.153.465	58.871.673.649	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Persentase kebijakan di bidang Bina Mental dan Spiritual, bidang Kesejahteraan Rakyat, dan bidang Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana dan berkualitas				
					SEKRETARIAT DAERAH	11.985.911.800	39.481.142.000	
				Persentase kebijakan di bidang Perundang-Undangan, bidang Bantuan Hukum, dan bidang Dokumentasi dan Informasi yang terlaksana dan berkualitas				
					SEKRETARIAT DAERAH	768.577.200	1.245.299.100	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase kebijakan di bidang pengelolaan PBJ, bidang Pengelolaan LPSE, bidang Pembinaan dan advokasi PBJ yang terlaksana dan berkualitas				
					SEKRETARIAT DAERAH	548.389.550	1.042.108.150	
				Persentase kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi serta pelaporan yang terlaksana dan berkualitas				
					SEKRETARIAT DAERAH	265.828.800	591.737.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian				
					SEKRETARIAT DPRD	14.878.231.180	15.586.331.180	
				Prosentase pemenuhan administrasi laporan keuangan				
					SEKRETARIAT DPRD	14.878.231.180	15.586.331.180	
				Prosentase Pemenuhan Administrasi Sarana dan Prasarana				
					SEKRETARIAT DPRD	14.878.231.180	15.586.331.180	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Tingkat pelayanan pelaksanaan tugas DPRD				
					SEKRETARIAT DPRD	4.406.201.200	5.154.233.700	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	304.730.000	1.094.438.000	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) BKPSDM				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.489.029.432	5.385.832.722	
				Persentase Aset dalam Kondisi Baik				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	739.639.410	1.156.039.410	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				Persentase tata kelola dan pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur berlaku				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.088.183.800	4.543.762.450	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
				Persentase pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.084.311.600	1.466.291.600	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai Sakip)				
					INSPEKTORAT	22.000.000	134.450.000	

					INSPEKTORAT	618.007.200	1.301.554.440	
			Tingkat Kelancaran administrasi Perkantoraan					
					KECAMATAN LAMPIHONG	3.019.733.376	3.040.363.076	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)				



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					KECAMATAN HALONG	3.056.850.843	3.585.890.803	
					Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
					KECAMATAN JUI	2.447.586.552	2.912.247.753	
					Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum			
					KECAMATAN PARINGIN	455.389.900	547.739.150	
					Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)			
					KECAMATAN PARINGIN	12.777.900	12.777.900	
					Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan			
					KECAMATAN PARINGIN	3.793.049.131	3.936.282.071	
					Persentasi ketersediaan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang telah disampaikan tepat waktu			
					KECAMATAN PARINGIN	12.777.900	12.777.900	
					Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN			
					KECAMATAN PARINGIN	3.793.049.131	3.936.282.071	
					Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah			
					KECAMATAN PARINGIN	79.025.000	113.492.000	
					Terpenuhinya Pelayanan Kepada Masyarakat			
					KECAMATAN PARINGIN	19.483.000	298.483.000	
					Waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			
					KECAMATAN PARINGIN	132.600.400	132.280.400	
					Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
					KECAMATAN PARINGIN	465.942.800	497.127.280	
					Tingkat Disiplin Aparatur			
					KECAMATAN PARINGIN SELATAN	3.358.819.434	4.031.640.139	
					Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran			
					KECAMATAN PARINGIN SELATAN	3.358.819.434	4.031.640.139	
					Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik			
					KECAMATAN PARINGIN SELATAN	74.419.500	170.603.200	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik				
					KECAMATAN PARINGIN SELATAN	3.284.399.934	3.861.036.939	
				Tingkat Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
					KECAMATAN PARINGIN SELATAN	3.358.819.434	4.031.640.139	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan				
					KECAMATAN PARINGIN	77.063.800	64.999.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase Desa Dengan Pemberdayaan Masyarakat Yang Aktif				
					KECAMATAN PARINGIN	256.050.000	251.454.000	
				Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan				
					KECAMATAN PARINGIN	1.104.999.200	1.104.999.200	
				Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				
					KECAMATAN PARINGIN	256.050.000	251.454.000	

					KECAMATAN PARINGIN	1.105.000.000	1.104.997.500	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah				
					KECAMATAN PARINGIN	7.650.000	10.030.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				Persentase penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa				
					KECAMATAN PARINGIN	116.995.000	116.910.000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Desa Dengan Administrasi Pencatatan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Aturan; Persentase Desa Yang Menyampaikan Usulan Musyawarah Pembangunan Desa Sesuai Aturan				
					KECAMATAN PARINGIN	18.125.000	18.125.000	
				Persentase usulan musrenbang yang di akomodir; Persentase jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu				
					KECAMATAN PARINGIN SELATAN	272.860.000	272.860.000	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	6. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif							
		Meningkatnya Budaya Balangan yang Terlestarikan						
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
				Persentase Pembinaan Sejarah Lokal				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	359.845.000	834.845.000	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
				Persentasi Cagar Budaya Terlestarikan dan Terkelola Dengan Baik				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	322.870.000	455.410.000	
		Meningkatnya Ketentaraman dan Ketertiban Umum						
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Angka Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8.129.650.000	13.367.813.000	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.399.343.120	6.350.167.320	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
				Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana dan Prosentase Desa Siaga Bencana				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.146.738.000	1.146.738.000	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan Awayan				
					KECAMATAN AWAYAN	34.180.000	25.180.000	
		Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	22.065.463.635	28.895.742.885	
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	77.000.000	77.000.000	
		Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan						



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					
				Jumlah Kerjasama yang disepakati di pedesaan				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	112.280.300	172.080.150	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.327.316.000	2.371.251.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang mendapatkan biaya operational dan Persentase BUMDes yang berkembang				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.207.603.700	4.331.385.750	
		Menurunnya Angka Kemiskinan						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20.684.878.408	23.924.729.308	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	967.450.000	993.850.000	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				prosentase cakupan ppks (lansiaDisabilitasAnak Terlantar Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan				



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				pelayanan sosial				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.801.831.000	2.137.030.500	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				Persentase Fakir Miskin yang difasilitasi bantuan sosial				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.824.385.206	8.850.406.006	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	540.722.000	1.119.728.800	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
				Persentase Makam yang terawat				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	70.000.000	118.900.000	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.008.670.000	2.033.070.000	
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.008.670.000	2.033.070.000	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase ARG di SKPD/ Lembaga/ Instansi di Kabupaten				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.008.670.000	2.033.070.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
				Persentase Perempuan Korban Kekerasan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	83.120.000	93.360.000	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	230.430.000	229.183.500	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
				Cakupan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang Mendapatkan Penanganan Secara Komprehensif				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	115.679.800	120.940.200	
		Terjaganya kehidupan sosial yang kondusif						
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
				Persentase Peran Aktif Kelompok Masyarakat				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	60.850.000	1.581.630.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
				Persentase Ormas yang aktif				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	62.006.000	89.486.000	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.176.521.615	5.387.577.465	
				Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	236.571.112	391.571.112	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)				
					KECAMATAN JUAI	9.000.000	9.000.000	
				Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	41.185.000	75.245.000	



4. Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja

Tabel 3.4

Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi	100 %	100 %	1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	70,40 (BB) Nilai	70,40 (BB) Nilai										
									1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	3 Buah	4 Buah	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peresentse Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	100 Persen	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									1.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
					1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.01.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	Kab. Balangan
					1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pengelolaan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Jumlah Pakaian Dinas	141 Lembar	141 Lembar	Semua Kab/Kota Kab. Balangan
									1.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Bimtek	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan
					1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan
									1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	null		4 Paket	Kab. Balangan
									1.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Balangan
									1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan
									1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan



Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan TA. 2022

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		23 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									1.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel				Kab. Balangan	
									1.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan jasa Surat Menyurat	100 Persen	100 Persen	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 Persen	100 Persen	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Balangan	



Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan TA. 2022

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Operasional				
									1.01.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Peningkatan Pemeliharaan Aset	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Balangan	
									1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan gedung kantor		1 unit	Kab. Balangan	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOAA N PENDIDIKAN	Angka rata-rata lama sekolah	8,09 tahun	8,09 tahun	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Peningkatan Jumlah Ruang Kelas Baru	4 Sekolah	4 Sekolah	Kab. Balangan	
		Harapan Lama Sekolah	12,72 tahun	12,72 tahun										
									1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Peningkatan Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 Sekolah	1 Sekolah	Kab. Balangan	
									1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Peningkatan Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5 Bangunan	5 Bangunan	Kab. Balangan	
									1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terrehabnya sejumlah ruang kelas yang terehabilitasi	9 Sekolah	14 Sekolah	Kab. Balangan	
									1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Penyediaan Ruang Guru/Kepala Sekolah yang Layak	1 Sekolah	1 Sekolah		
									1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	null		0 null	Kab. Balangan	
									1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	null		0 null		
									1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pemenuhan Cetakan Raport K 13	2000 Eksemplar	2000 Eksemplar		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum			
									1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Penerima Beasiswa dan Program Balangan Pintae	600 Siswa	600 Siswa		
									1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		27 paket		
									1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Balangan	
									1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Balangan	
									1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pelaksanaan Kegiatan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3 Lomba	3 Lomba	Kab. Balangan	
									1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					
									1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Pengelolaan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	175 Sekolah	175 Sekolah	Kab. Balangan	
									1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Peningkatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	175 Sekolah	175 Sekolah	Kab. Balangan	
					1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Peningkatan Jumlah Pagar SMP	1 Sekolah	1 Sekolah	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		3 ruang		
									1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		2 ruang		
									1.01.02.2.02.16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1 ruang		
									1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1 ruang		
									1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Perbaikan Gedung Laboratorium	1 Sekolah	2 Sekolah		
									1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		3 ruang		
									1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pemberian Beasiswa	600 Orang / Siswa	700 Orang / Siswa	Kab. Balangan	
									1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		2 paket		
									1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang mendapatkan kegiatan pelatihan EDS dan akreditasi sekolah	25 Sekolah	25 Sekolah	Kab. Balangan	
									1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan lomba tingkat Provinsi dan Nasional	26 Sekolah	26 Sekolah	Kab. Balangan	
									1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya kegiatan lomba sekolah sehat dan lomba kader kesehatan remaja	26 Sekolah	26 Sekolah	Kab. Balangan	
									1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP/Sederajat	26 Sekolah	26 Sekolah	Kab. Balangan	
					1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Tersedianya Sarana dan Prasaraan Lembaga Pendidikan	3 lembaga	3 lembaga	Kab. Balangan	
									1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		6 unit	Kab. Balangan	
									1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terlaksananya rehap TK Swasta	1 lembaga	3 lembaga	Kab. Balangan	
									1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD	Tersedianya Sarana dan Prasarana TKN Pembina Tebing Tinggi	1 lembaga	1 lembaga	Kab. Balangan	
									1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan TKN Pembina Tebing Tinggi	1 lembaga	1 lembaga	Kab. Balangan	
									1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Tersedianya Sarana /Media Pembelajaran	1 lembaga	6 lembaga	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Tersedianya operasional TKN Pembina dan Lembaga PAUD Binaan Dinas Pendidikan	9 PAUD	9 PAUD	Kab. Balangan	
									1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Terpenuhinya kesejahteraan pendidik, guru pendamping/pengasuh PAUD	12 bulan	12 bulan	Kab. Balangan	
									1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Tersedianya Insentif Tenaga Kependidikan dan Pendidik TKN dan PAUD Binaan Dinas Pendidikan	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Balangan	
									1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Sosialisasi Akreditasi Lembaga PAUD	100 orang	100 orang	Kab. Balangan	
									1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	tersedianya hibah uang TK.PAUD. DAK (BOP)	100 persen	100 persen	Kab. Balangan	
					1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1.01.02.2.04.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	tersedianya sarana dan prasarana pendidikan non formal	3 Lembaga	3 Lembaga	Kab. Balangan	
									1.01.02.2.04.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Rehap Aula SKB Balangan	1 Ruangan	1 Ruangan	Kab. Balangan	
									1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Terpenuhinya Kesejahteraan Tutor dan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	3 program	3 program	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.01.02.2.04.14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terpenuhinya Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal	237 orang	278 orang	Kab. Balangan	
									1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	terlaksanannya pendidikan kesetaraan	12 PKBM/SKB	12 PKBM/SKB	Kab. Balangan	
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum Penerapan Kurikulum Yang Sesuai	100 Persen	100 Persen	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kurikulum	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1.01.03.2.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terlaksananya Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
									1.01.03.2.01.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rapat Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Balangan	
									1.01.03.2.01.03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Belanja Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	500 Buah	500 Buah	Kab. Balangan	
									1.01.03.2.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Balangan	
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase PTK bersertifikasi	84,76 Persen	84,76 Persen	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kegiatan Pelatihan PTK/ sertifikasi PTK	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		8 Dokumen	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	500 orang	500 orang	Kab. Balangan	
	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Akreditasi Lembaga PAUD	150 Lembaga	150 Lembaga	1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Peningkatan Pembinaan Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formas	150 Lembaga	150 Lembaga	1.01.05.2.02.03 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Tersedianya Dana Bantuan Pendirian Lembaga PAUD	41 lembaga	41 lembaga	Kab. Balangan	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	70,40 (BB) Nilai	70,40 (BB) Nilai	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentasi dokumen perencanaan perangkat daerah yang telah disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentasi ketersediaan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang telah disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Balangan	
					1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentasi dokumen keuangan yang diverifikasi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	100 %	1.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	10 Orang	477 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	100 %	1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 Jenis	15 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentasi ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Kab. Balangan	
									1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2910 eksemplar	2910 eksemplar	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase perjalanan dinas luar daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
										Persentasi terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100 %		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum			
					1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga kontrak yang dibayar untuk membantu pengelolaan surat menyurat, kepegawaian dan kearsipan	5 Orang	5 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentasi terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Balangan	
					1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah tenaga kerja yang dibayar untuk menjaga/memelihara keamanan kantor dan lingkungannya	100 %	100 %	Kab. Balangan	
									1.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung layak fungsi	100 %	100 %	Kab. Balangan	
					1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Persen	90 Persen	1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Terlaksananya Penerapan BLUD Pada Rumah Sakit	100 Persen	100 Persen	Kab. Balangan	
						Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	60 Persen	60 Persen						



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	15	15	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kumulatif Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) di Fasilitas Kesehatan	60 %	60 %	1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	1 Buah	1 Buah	Kab. Balangan	
		Angka Kematian Ibu (AKI) per 100,000 Kelahiran Hidup	177	177										
		Prevalensi Stunting	18,4 %	18,4 %										
		Usia Harapan Hidup (UHH)	68,12 tahun	68,12 tahun										
									1.02.02.2.01.06 Pengembangan Puskesmas	Terlaksananya Pembangunan Puskesmas yang Refresentatif sesuai Prototipe		2 Puskesmas		
									1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang direhabilitasi	3 Buah	25 Buah	Kab. Balangan	
									1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan alat kesehatan di fasilitas kesehatan sesuai standar (Puskesmas,Poskesdes , Pustu)	32 %	32 %	Kab. Balangan	
									1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
									1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase puskesmas yang memiliki ketersediaan obat, BMHP dan vaksin minimal 80%	100 %	100 %	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase ketersediaan jenis obat termasuk bahan habis pakai di Puskesmas	93 %	93 %	Kab. Balangan	
									1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemeliharaan sarana fasilitas sesuai standar	100 %	100 %	Kab. Balangan	
									1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemeliharaan prasarana pendukung fasilitas kesehatan yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %		
									1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemeliharaan alat kesehatan, alat penunjang medik dan kefarmasian	100 %	100 %	Kab. Balangan	
									1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		156 Paket		
					1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perseentase Capaian SPM bidang Kesehatan	100 %	100 %	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentasi Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	100 %	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Persalinan	100 %	100 %	Kab. Balangan	
									1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentasi Pelayanan Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Bayi Baru Lahir	100 %	100 %	Kab. Balangan	
									1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Presentasi Pelayanan Balita sesuai standar	100 %	100 %	Kab. Balangan	
									1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Kader Kesehatan Sekolah yang Dilatih	300 Kader	300 Kader	Kab. Balangan	
										Jumlah UKS yang dibina	12 UKS	12 UKS		
										Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah Kelas 1-9	100 %	100 %		
									1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	50 %	50 %	Kab. Balangan	
									1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 th keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	Kab. Balangan	
									1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	45 %	45 %	Kab. Balangan	
									1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM Yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	45 %	45 %	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	100 %	Kab. Balangan	
									1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Insidensi TB Per 100.000 penduduk	460 Kasus	460 Kasus	Kab. Balangan	
										Persentase orang terduga tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %	100 %		
										Treatment covarege pada pasien TB	90 %	90 %		
									1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan deteksi dini HIV sesuai standar	100 %	100 %	Kab. Balangan	
									1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		100 %		
									1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Cakupan Tingkat Kejadian Kegawatdaruratan yang ditangani sesuai standar	100 %	100 %		
									1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Wasting	17 %	17 %	Kab. Balangan	
										Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	18.4 %	18.4 %		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah instansi pemerintah yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani	13 Buah	13 Buah		
										Jumlah Pos UKK yang dibina	12 Buah	12 Buah		
										Persentase jemaah haji yang diukur kebugaran jasmani	90 %	90 %		
									1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase desa/kelurahan yang mencapai SBS	57 %	57 %	Kab. Balangan	
									1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap	80.5 %	80.5 %	Kab. Balangan	
										Persentase imunisasi lanjutan anak usia 12 - 24 bulan	48 %	48 %		
										Persentase jemaah haji yang memenuhi syarat Istita	80 %	80 %		
										Persentase ketetapan dan kelengkapamn laporan surveilans	88 %	88 %		
									1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Wilayah Terpencil dan Pelayanan Sunatan Massal	120 Orang	120 Orang	Kab. Balangan	
									1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	API per 1000 penduduk kurang dari	1 kasus	1 kasus	Kab. Balangan	
										Insiden rate DBD per 100.000 penduduk	74 kasus	74 kasus		



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t a h
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Persentase penderita dengan masalah kesehatan indera yang ditangani sesuai standar	100 %	100 %		
										Persentasi cakupan Pneumonia balita di sarana kesehatan	85 %	85 %		
										Prevalensi kusta per 10.000 penduduk	1 <	1 <		
									1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang menjadi peserta JKN-KIS	100 %	100 %	Kab. Balangan	
									1.02.02.2.02.27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan dll)	2 buah	2 buah	Kab. Balangan	
										Jumlah puskesmas melaksanakan layanan upaya berhenti merokok	2 buah	2 buah		
										Persentase merokok penduduk pada usia 10-18 th	10 %	10 %		
										persentase sosialisasi penyebaran informasi tentang penyalahgunaan zat adiktif	20 %	20 %		
									1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri	60 %	60 %	Kab. Balangan	
									1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase Penyelenggaraan operasional Pelayanan Rumah Sakit	100 %	100 %	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum			
									1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.5	83.5	Kab. Balangan	
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.56	83.56		
										Persentase Penyelenggaraan operasional Pelayanan Puskesmas	100 %	100 %		
										Persentase peserta JKN terlayani di Puskesmas	100 %	100 %		
					1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase data dan informasi yang dikelola (Profil,Website,dll)	100 %	100 %	1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase data dan informasi yang dikelola (Profil,Website,dll)	100 %	100 %	Kab. Balangan	
					1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas dengan Kategori Akreditasi Utama	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Puskesmas dapat melengkapi dokumen Penilaian Kinerja	100 %	100 %	Kab. Balangan	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar	100 %	100 %	1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	12 Puskesmas	12 Puskesmas	1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	12 Puskesmas	12 Puskesmas	Kab. Balangan	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
						Persentase Puskesmas yang terpenuhi Kebutuhan SDMK	100 %	100 %						
					1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan dengan Kompetensi Sesuai Standar	72 orang	72 orang	1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan untuk peningkatan kompetensi	72 Orang	94 Orang	Kab. Balangan	
						Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan untuk peningkatan kompetensi	72 orang	72 orang						
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jumlah Produksi Rumah Tangga Yang Mempunyai Sertifikat Keamanan Pangan	100 persent	100 persent	1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sarana P IRT	20.5 sertifi kat	20.5 sertifi kat	1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk P-IRT (Produksi pangan Industri Rumah tangga) yang diawasi	10 Produk	10 Produk	Kab. Balangan	
		Persentase sarana produksi UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan	100 persent	100 persent										



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
		Perizinan												
		Pesentase Pelayanan Kefarmasian (Apotik dan Toko Obat) Yang Memenuhi Standar dan Persyaratan	100 %	100 %										
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase keluarga yang melaksanakan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	50 %	50 %	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Kebijakan yang Berwawasan Kesehatan	1 kebijaka n	1 kebijaka n	1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa/Kelurahan yang Dilakukan Penyuluhan	157 desa/kel urahan	157 desa/kel urahan	Kab. Balanga n	
										Jumlah Kebijakan Daerah yang Berwawasan Kesehatan	1 kebijakan	1 kebijakan		
										Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Memanfaatkan Sumber Dayanya untuk Mendukung Kesehatan	1 omas	1 omas		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga (RT) yang telah disurvei PHBS (%)	50 %	50 %	1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Rumah Tangga (RT) yang ber-PHBS	50 % RT	50 % RT	Kab. Balangan	
										Persentase Sekolah yang ber-PHBS	30 % sekolah	30 % sekolah		
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	70,40 (BB) Nilai	70,40 (BB) Nilai	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	2 Dokumen	2 Dokumen	1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Pembayaran Gaji PNS dan Laporan Keuangan	14 Bulan	14 Bulan	1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	14 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									1.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen usulan pencairan anggaran Keuangan yang telah terverifikasi/teruji	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang dilaksanakan	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Balangan	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah		Sebelum		
					1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100 %	100 %	1.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	150 Stell	450 Stell	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									1.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	50 Orang	60 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi perangkat daerah yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	3 Buah	9 buah	Kab. Balangan	
									1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pelaksanaan Bahan Logistik kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Balangan	
									1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pelaksanaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelaksanaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan		14 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
										null		0 null		



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.03.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat Berat yang diadakan		3 Unit	Kab. Balangan	
										null		0 null		
									1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebeler kantor yang diadakan		4 Paket	Kab. Balangan	
										null		0 null		
					1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan administrasi pelayanan, sarana dan prasarana SOPD	100 %	100 %	1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Balangan	
					1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan sarana dan prasarana SOPD	100 %	100 %	1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Perlengkapan Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Balangan	
									1.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan pemeliharaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Buah	12 bulan	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	12.41 %	12.41 %	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	12.411 %	12.411 %	1.03.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Balangan
									1.03.02.2.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Embung dan Penampung Air Lainnya yang dibangun	2 Ha	2 Ha	Kab. Balangan
									1.03.02.2.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	750 meter	750 meter	Kab. Balangan
									1.03.02.2.01.11 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Embung dan Penampung Air Lainnya yang dibangun		2 Unit	Kab. Balangan
										null		0 null	
									1.03.02.2.01.26 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang direhab	1 Buah	1 Buah	Kab. Balangan
									1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya normalisasi/ restorasi		50 m3	Kab. Balangan
									1.03.02.2.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang dibina dan diberdayakan	12 Berkas	12 Berkas	Kab. Balangan



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	24.2 %	24.2 %	1.03.02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun	500 Meter	500 Meter	Kab. Balangan	
									1.03.02.2.02.15 Rehabilitasi Bendung Irigasi	Bendung Irigasi yang direhabilitasi	2 Buah	2 Buah	Kab. Balangan	
									1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	12 Lokasi	12 Lokasi	Kab. Balangan	
									1.03.02.2.02.23 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	2 Lokasi	2 Lokasi	Kab. Balangan	
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SR yang terbangun di kawasan perdesaan		500 SR	Kab. Balangan	
										null		0 null		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Keterangan
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.03.03.2.01.19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan		1006 SR		
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik	92.4 %	92.4 %	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik yang layak	14.07 %	14.07 %	1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah prasarana sanitasi yang dibangun	140 Unit	665 Unit	Kab. Balangan	
									1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sarana sanitasi yang tersedia	1 Unit	1 Unit	Kab. Balangan	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik	89.38 %	89.38 %	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan gedung yang dibangun dan dipelihara	5 Unit	5 Unit	1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang dibangun	7 Unit	9 Unit	Kab. Balangan	
									1.03.08.2.01.05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Monitoring	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Balangan	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.03.08.2.01.12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang direhab	3 Unit	4 Unit	Kab. Balanga n	
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN NYA	Jumlah bangunan yang ditata	1 bh	1 bh	1.03.09.2.01 Penyelenggara an Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Bangunan yang ditata	1 Unit	1 Unit	1.03.09.2.01.04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Bangunan yang di pelihara	1 Unit	5 Unit	Kab. Balanga n	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi mantap	62.91 %	62.91 %	1.03.10.2.01 Penyelenggara an Jalan Kabupaten/Kot a	Panjang Jalan dalam kondisi mantap	39 Km	39 Km	1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	null		0 null	Kab. Balanga n	
										panjang jalan yang dibangun		500 M		
									1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	panjang jalan yang di rekonstruksi	38.57 Km	43.43 Km	Kab. Balanga n	
									1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan	panjang jalan yang di rehabilitasi	0.8 KM	0.8 KM	Kab. Balanga n	
									1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	panjang jalan yang di pelihara secara rutin	0.25 Km	0.25 Km	Kab. Balanga n	
									1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	panjang jembatan yang dibangun	182 Meter	182 Meter	Kab. Balanga n	
									1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan	null		0 null		
										panjang jembatan yang di rehabilitasi		5 M		
									1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang di pelihara secara rutin	50 Meter	50 Meter	Kab. Balanga n	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANG AN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM jasa konstruksi dan BUJK yang dibina	50 %	50 %	1.03.11.2.01 Penyelenggara an Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	100 Orang	100 Orang	1.03.11.2.01.06 Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta sertifikasi tenaga terampil konstruksi	100 Orang	100 Orang	Kab. Balanga n	
					1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan bagi BUJK	30 IUJK	30 IUJK	1.03.11.2.03.02 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah rekomendasi teknis IUJK yang diterbitkan	30 Rekomen dasi	30 Rekomen dasi	Kab. Balanga n	
									1.03.11.2.03.03 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah peserta pembinaan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi	30 Orang	100 Orang	Kab. Balanga n	
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraa n penataan ruang	42 %	42 %	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang	9 Dokume n	9 Dokume n	1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	jumlah bahan substansi penetapan rtrw yang tersusun.	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Balanga n	
					1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pemanfaatan ruang	3 Dokume n	3 Dokume n	1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang	jumlah bahan informasi penataan ruang	3 dokumen	3 dokumen	Kab. Balanga n	
					1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	4 Dokume n	4 Dokume n	1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	jumlah dokumen substansi rapat koordinasi	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Balanga n	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 persen	100 persen	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Data rumah layak huni yang rusak akibat korban bencana	1 dok	1 dok	1.04.02.2.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang dibuat	1 dok	1 dok	Kab. Balangan	
					1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah rusak akibat korban bencana yang telah direhab dan dibangun	15 Unit	15 Unit	1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rehabilitasi rumah layak huni untuk korban bencana yang tertangani	10 unit	10 unit	Kab. Balangan	
									1.04.02.2.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah pembangunan rumah layak huni untuk korban bencana yang tertangani	5 unit	5 unit	Kab. Balangan	
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	78,49 persen	78,49 persen	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	100 Persen	100 Persen	1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen yang dibuat	1 dok	1 dok	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	luas kawasan kumuh yang tertangani	2.1 ha	2.1 ha	1.04.03.2.03.03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU	Panjang drainase dibangun	284 M	284 M	Kab. Balangan	
										Panjang jalan yang dibangun	269 M	269 M		
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	95 persen	95 persen	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh yang telah direhab	95 persen	95 persen	1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rehabilitasi rumah layak huni bagi MBR yang tertangani	20 unit	110 unit	Kab. Balangan	
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	85 %	85 %	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan urusan penyelenggaraan PSU perumahan	100 Perse n	100 Perse n	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen identifikasi PSU Perumahan	1 dok	1 dok	Kab. Balangan	
									1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah rumah yang terlayani jalan dan drainase	160 unit	1500 unit	Kab. Balangan	
									1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	70,40 (BB) Nilai	70,40 (BB) Nilai		Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen						
		Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen										
									1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Balangan	
										Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen		
									1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
						Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan yang Berlaku	100 Persen	100 Persen		Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan		
									1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Balangan	
									1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Balangan	
					1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		265 Stell	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
						Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Mendapat Peningkatan Disiplin dan Kapasitas	100 Persen	100 Persen		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan yang Diadakan	46 Stell	38 Stell		
										null		0 null		
									1.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	20 Orang	106 Orang	Kab. Balangan	
									1.05.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang diikuti	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										"Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan"	20 Orang	25 Orang		
					1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang diadakan	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
						Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen						
									1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 buah	5 buah	Kab. Balangan	
									1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Balangan	
									1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
										Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan		
									1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
										Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan		
									1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	90 kali	90 kali		
									1.05.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD		6 Bulan	Kab. Balanga n	
										null		0 null		
					1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Waktu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	1.05.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Operasional yang diadakan		12 Unit	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	
										Jumlah Unit Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan		1 Unit		
										null		0 null		
									1.05.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang dibangun		1 Gedung	Kab. Balanga n	
									1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	
					1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Perse n	100 Perse n	1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
						Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan						
									1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
										Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan		
									1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Diadakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Balangan	
					1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Balangan	
						Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin atau berkala dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 bulan		
									1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Balangan	
										Waktu Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	12 Bulan		



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t e r a n
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan Perlengkapan Gedung kantor Perlengkapan kantor dan Pos terpadu Pol PP		3 Unit	Kab. Balangan	
										Jumlah Ruang gedung kantor yang terpelihara		3 Ruangan		
										null		0 null		
									1.05.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	Kab. Balangan	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Angka Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	23 Angka Pelanggaran	23 Angka Pelanggaran	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	750 Kegiatan	750 Kegiatan	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kegiatan Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	750 Kegiatan	750 Kegiatan	Kab. Balangan	
									1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang dibina	2355 orang	2355 orang	Kab. Balangan	
									1.05.02.2.01.07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah MoU antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4 MoU	4 MoU	Kab. Balangan	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t a h u n	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
					1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kot a dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Ditegakkan	24 Perda	24 Perda	1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	8 Kegiatan	8 Kegiatan	Kab. Balanga n		
									1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Diawasi	24 Perda	24 Perda	Kab. Balanga n		
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULA NGAN BENCANA	Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan	100 %	100 %	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kot a	Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	40 desa	40 desa	1.05.03.2.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah berpotensi bencana yang terpantau	100 Persen	100 Persen	Kab. Balanga n		
						Prosentase Penanganan Pra Bencana	100 Perse n	100 Perse n							
									1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Wilayah Berpotensi Bencana yang Mendapatkan Informasi tentang rawan bencana	2 kegiatan	2 kegiatan	Kab. Balanga n		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase Penanganan Pra Bencana dan Tanggap Darurat Bencana	100 Perse n	100 Perse n	1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Paket	1 Paket	Kab. Balanga n	
									1.05.03.2.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Balanga n	
									1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100 Persen	100 Persen	Kab. Balanga n	
									1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Anggota TRC	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Balanga n	
					1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	45 Paket	45 Paket	1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan logistik yang tersalurkan kepada korban bencana	50 Paket	50 Paket	Kab. Balanga n	
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULA NGAN, PENYELAMAT AN, KEBAKARAN DAN PENYELAMAT AN NON KEBAKARAN	Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana dan Prosentase Desa Siaga Bencana	100 %	100 %	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	100 Perse n	100 Perse n	1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana Kebakaran yang Tertangani	15 Kegiatan	20 Kegiatan	Kab. Balanga n	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tersedianya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	200 Orang	200 Orang	1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapat pembinaan dan pelatihan tentang penanganan bencana kebakaran	200 Orang	200 Orang	Kab. Balanga n	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	76,48 Nilai	76,48 Nilai	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100 %	100 %	1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Balanga n	
									1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Balanga n	
					1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang- undangan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balanga n	
									1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentasi Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai ketentuan perundang-undangan		100 %	Kab. Balanga n	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum			
									1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan SKPD		12 Dokumen	Kab. Balangan	
					1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.06.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah kain sasirangan yang diadakan	110 Lembar	96 Lembar	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
										Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	110 stell	90 stell		
										Jumlah pakaian korpri yang diadakan		152 stell		
									1.06.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	38 orang	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentasi ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentasi ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Kab. Balangan	
									1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	100 buah	100 buah	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	480 eksampl ar	62 eksamplar	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	
									1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentasi terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100 %	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	
					1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.06.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dibeli		9 buah	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	
									1.06.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan		42 buah	Kab. Balanga n	
					1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola	100 %	100 %	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	
									1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentasi terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	
									1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	Kab. Balanga n	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum			
					1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas Jabatan Layak Fungsi		100 %	Kab. Balangan	
									1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraa n kesejahteraan sosial	78 %	78 %	1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah warga KAT yang mendapatkan Pelayanan sosial	110 KK	110 KK	1.06.02.2.01.01 Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah lokasi KAT yang dipetakan untuk mendapatkan bantuan Perumahan KAT dari KEMENSOS RI	1 Lokasi	1 Lokasi	Kab. Balangan	
									1.06.02.2.01.02 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Warga KAT yang mendapatkan Pembinaan	70 KK	70 KK	Kab. Balangan	
					1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang diberikan	2 Buah	2 Buah	1.06.02.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah rapat tentang usulan Pengumpulan uang dan Barang (PUB) yang direkomendasikan	2 kali	2 kali	Kab. Balangan	
					1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan dan organisasi sosial yang mendapatkan bantuan	6054	6054	1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang terampil	40 orang	40 orang	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang terampil	8 TKSK	8 TKSK	Kab. Balangan	
									1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga fakir miskin yang diberi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tervalidasi	9336 KK	9336 KK	Kab. Balangan	
										Jumlah Keluarga fakir miskin yang diberi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tervalidasi	3757 KK	3757 KK		
									1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LKS yang mendapatkan pendampingan dan pembinaann Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	8 LKS	8 LKS	Kab. Balangan	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	prosentase cakupan ppks (lansiaDisabilitas Anak Terlantar Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial	100 %	100 %	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	800 Orang	800 Orang	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	600 orang	600 orang	Kab. Balangan	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Lansia yang mendapatkan bantuan alat Bantu	185 Orang	96 Orang	Kab. Balanga n	
									1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah anak terlantar yang dilayani	10 orang	10 orang	Kab. Balanga n	
									1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PPKS (Lansia, Penyandang disabilitas, korban NAFZA, pengemis dan tuna sosial)yang dibimbing di panti rehabilitasi	27 orang	27 orang	Kab. Balanga n	
									1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	20 Orang	20 Orang	Kab. Balanga n	
										Jumlah wanita rawan sosial yang mendapatkan fasilitasi pendidikan dan pelatihan serta bantuan alat keterampilan	8 Orang	8 Orang		
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGA N DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang difasilitasi bantuan sosial	67 %	67 %	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah data fakir miskin yang dilakukan pemutakhiran terpadu penanggulangan kemiskinan	12065 KK	12065 KK	1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga miskin yang masuk dalam BDT yang diValidasi	12000 Ruta	11500 Ruta	Kab. Balanga n	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.06.05.2.02.03 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase jiwa yang mendapatkan fasilitas Bantuan Sosial bersyarat	100 %	100 %	Kab. Balangan	
									1.06.05.2.02.04 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan KUBE	2 Kelompok	2 Kelompok	Kab. Balangan	
										Jumlah Rumah layak huni setelah mendapat bantuan	2 Buah	2 Buah		
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %	100 %	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan bantuan	500 KK	500 KK	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	500 KK	500 KK	Kab. Balangan	
					1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Tagana yang Aktif	73 Orang	73 Orang	1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Anggota Tagana yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan kebencanaan	72 orang	30 orang	Kab. Balangan	
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Makam yang terawat	100 %	100 %	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam pahlawan yang dirawat	1 Buah	1 Buah	1.06.07.2.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam Pahlawan yang terpelihara	1 buah	1 buah	Kab. Balangan	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAA N TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana tenaga kerja	30 %	30 %	2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja (RTK)	70 %	70 %	2.07.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja	1 dokumen	1 dokumen		
						Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam RTK	70 %	70 %						
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenga kerja yang kompetensi/bersertifikat kompetensi	4 %	4 %	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang memiliki keterampilan berdasarkan klaster kompetensi	13.87 %	13.87 %	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah paket pelatihan klaster kompetensi dan pelatihan berbasis masyarakat / Jumlah calon pencari kerja yang kompeten dan memiliki keterampilan	1 Paket pelatihan	2 Paket pelatihan	Kab. Balangan	
						Persentase pencari kerja yang memiliki keterampilan berdasarkan klaster kompetensi	24 %	24 %						
									2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah MoU dengan pihak ketiga	3 Paket Pelatihan	4 Paket Pelatihan	Kab. Balangan	
									2.07.03.2.01.03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sarana pelatihan BLK	100 Persen	100 Persen	Kab. Balangan	
					2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS (kejuruan) terakreditasi	3 LPK	3 LPK	2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS terdaftar di OSS/memiliki izin	10 LPK	10 LPK	Kab. Balangan	
						Persentase LPKS yang terakreditasi	100 %	100 %		Jumlah LPKS terakreditasi	3 LPK	3 LPK		



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah lulusan LPKS yang kompeten	100 orang	100 orang		
					2.07.03.2.04 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah pelaku usaha kecil yang mengikuti konsultasi peningkatan produktivitas	20 orang	20 orang	2.07.03.2.04.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah peserta konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	20 orang	20 orang	Kab. Balanga n	
						Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktifitas	100 %	100 %						
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri	65 %	65 %	2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelayanan Antar Kerja	1500 oran g	1500 oran g	2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelayanan perantaraan kerja	750 orang	750 orang	Kab. Balanga n	
						Jumlah Pencari Kerja Yang mendapatkan pelayanan Antar Kerja	750 Orang	750 Orang						
									2.07.04.2.01.04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan ketenagakerjaan	5 orang	5 orang	Kab. Balanga n	
									2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap melalui kegiatan Padat Karya Produktif, TTG dan atau TKM/ Wirausaha Baru	20 orang	20 orang	Kab. Balanga n	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Keterangan
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial	100 %	100 %	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	10 %	10 %	2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah dokumen informasi sarana HI setiap tahun	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Balangan	
		Persentase PPHI yang difasilitasi	100 %	100 %		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	100 %	100 %		Jumlah monitoring perusahaan	5 kali	5 kali		
										Jumlah pembinaan aturan ketenagakerjaan	3 kali	3 kali		
					2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui mediasi	80 %	80 %	2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan pencegahan PHI	2 kali	2 kali	Kab. Balangan	
						Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	100 %	100 %						



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus PHI yang difasilitasi	3 kasus	3 kasus		
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92.74	92.74	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	30 lembaga pemerintah	30 lembaga pemerintah	2.08.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG					
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72	72										
		Persentase ARG di SKPD/ Lembaga/ Instansi di Kabupaten	21 %	21 %										
									2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	200 orang	200 orang	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perencana/ PPTK/ Petugas yang terampil dalam penyusunan ARG termasuk PPRG	50 Orang	50 Orang	Kab. Balangan	
					2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah	3 Organisasi	3 Organisasi	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peserta Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	150 orang	138 orang	Kab. Balangan	
									2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	3 organisasi	3 organisasi	Kab. Balangan	
										Jumlah penyaluran Bakti Sosial Peningkatan Partisipasi	10 paket	17 paket		
										Jumlah Penyaluran Bantuan Spesifik Peningkatan Partisipasi Perempuan yang paham tentang keteladanan serta peran perempuan	220 paket	260 paket		



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan n	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGA N PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %	100 %	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah desa yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4 Desa	4 Desa	2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi , advokasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	264 orang	205 orang	Kab. Balanga n	
					2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	2 Lembaga	2 Lembaga	2.08.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan Korban Kekerasan yang terlayani	100 %	100 %	Kab. Balanga n	
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Perempuan Berumur 20-24 Tahun Yang Pernah Kawin Yang Umur Perkawinan Pertamanya Dibawah 18 Tahun	17,28 %	17,28 %	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Indeks Ketahanan Keluarga (Rata-rata)	61 %	61 %	2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Desa	10 kali	10 kali	Kab. Balanga n	
										Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan	15 orang	15 orang		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah		Sebelum		
					2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PUSPAGA	77 %	77 %	2.08.04.2.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah klien pada PUSPAGA yang terlayani	200 orang	200 orang	Kab. Balangan	
										Jumlah Peserta Yang mengikuti Penyuluhan	360 orang	460 orang		
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data gender dan anak	100 %	100 %	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data yang disusun dan divalidasi	1 dokumen	1 dokumen	2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak yang disajikan	122 tabel	1 dokumen	Kab. Balangan	
										Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang Lengkap dapat tersaji dengan baik	1 dokumen	1 dokumen		
									2.08.05.2.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Kekerasan Perempuan dan Anak yang diverifikasi, Jumlah Dokumen Data Pelaporan e-Kekerasan Simfoni PPA yang telah tersaji di Website	12 dokumen	12 dokumen	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	68	68	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Desa Layak Anak	4 %	4 %	2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah anggota GT KLA yang mengetahui tentang pemenuhan hak anak	48 orang	64 orang	Kab. Balangan	
						Persentase Desa Layak Anak	4 Desa	4 Desa		jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemenuhan hak anak di desa	225 orang	270 orang		
									2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah mesjid yang memenuhi kriteria ramah anak	5 buah	5 buah	Kab. Balangan	
										jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pola asuh dalam pengasuhan anak	100 buah	80 Orang		
										jumlah ponpes yang memenuhi kriteria ramah anak	3 buah	1 buah		
										jumlah sekolah yang ramah anak	21 buah	21 buah		
					2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	100 %	100 %	2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kader Posyandu, Lembaga dan Masyarakat yang terlatih pemenuhan hak anak	314 orang	130 orang	Kab. Balangan	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiat an	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah		
									2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak Desa yang terbentuk	5 kelompok	5 kelompok	Kab. Balanga n	
									2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pendataan profil anak	2 kecamatan	2 kecamatan	Kab. Balanga n	
									2.08.06.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang terstandar ramah anak	12 buah	12 buah	Kab. Balanga n	
										Jumlah Ruang Laktasi	3 buah	0 buah		
										Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dan berkompeten dalam pelayanan Puskesmas Ramah Anak	35 orang	24 orang		
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGA N KHUSUS ANAK	Cakupan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang Mendapatkan Penanganan Secara Komprehensif	100 %	100 %	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	2 Buah	2 Buah	2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Advokasi kebijakan kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkkan para pihak	100 orang	200 anak	Kab. Balanga n	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan bagi anak	78 indeks	78 indeks	2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban anak yang terlayani	100 %	100 %	Kab. Balangan	
					2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	4 lembaga	4 lembaga	2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan kader dan fasilitator PATBM desa	60 orang	138 orang	Kab. Balangan	
										Jumlah peserta sosialisasi dan pembentukan kader PATBM	120 orang	280 orang		
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	11 %	11 %	2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dibangun	2 Buah	2 Buah	Kab. Balangan	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t a h a n
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah Sosialisasi Pemanfaatan LPM dan RPK	3 Kegiatan	4 Kegiatan		
										Jumlah RPK yang di bangun	2 Buah	0 Buah		
									2.09.02.2.01.03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	jumlah Sarana pendukung kemandirian pangan (Paket)	2 Paket	1 Paket	Kab. Balanga n	
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	87,30 %	87,30 %	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kot a dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Pangan Pokok atau Pangan lainnya yang sudah tersalurkan	92 %	92 %	2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	JUmlah Dokumen Laporan Informasi harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	13 Dokumen	13 Dokumen	Kab. Balanga n	
									2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kegiatan lomba cipta menu pangan lokal yang terlaksana	2 keg	2 keg	Kab. Balanga n	
									2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan Terpantaunya perkembangan harga pangan pokok Kabupaten (laporan)	12 doc	12 doc	Kab. Balanga n	
										Jumlah Operasi Pasar dan Pasar Murah tang Terlaksana	5 Kegiatan	5 Kegiatan		
									2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	JUmlah Kelompok PUPM Yang Dibina	4 Kelompok	4 Kelompok	Kab. Balanga n	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan cadangan pangan (ton)	22 ton	22 ton	2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan (Ton)	65 Ton	65 Ton	Kab. Balangan	
					2.09.03.2.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan penentuan harga minimum daerah panga lokal	2 dokumen	2 dokumen	2.09.03.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah petugas Enumerator	9 Orang	9 Orang	Kab. Balangan	
					2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase capaian target konsumsi pangan	80 %	80 %	2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Pangan Masyarakat	12 Kelompok	12 Kelompok		
									2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Laporan Konsumsi Energi Dan Protein	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	5 %	5 %	2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase pembuatan peta kerentanan dan ketahanan pangan	100 persen	100 persen	2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Pemetaan Rawan pangan (Kecamatan)	1 Kabupaten	1 Kabupaten	Kab. Balangan	
					2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (desa)	5 desa	5 desa	2.09.04.2.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah yang Terdata pada FSVA (Kecamatan)	2 Kecamatan	2 Kecamatan	Kab. Balangan	
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	90 %	90 %	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif (kali)	90 kali	90 kali	2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian pangan Segar asal Tumbuhan (PSAT)	24 kali	24 kali	Kab. Balangan	
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													
	2.10.02 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pengelolaan izin lokasi	100 %	100 %	2.10.02.2.01 Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten	100 %	100 %	2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan data penerbitan Izin Lokasi dalam 1 tahun	12 kali	12 kali		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum			
	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100 %	100 %	2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten	100 %	100 %	2.10.04.2.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Penanganan Permasalahan Pertanahan Di Daerah	8 Kegiatan	8 Kegiatan		
	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian kelebihan tanah maksimum dan tanah absentee	100 %	100 %	2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dalam 1 (satu) Daerah	100 %	100 %	2.10.06.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan kegiatan PPL dalam rangka redistribusi tanah objek reforma agraria	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
	2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase pengelolaan izin membuka tanah	100 %	100 %	2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase penerbitan izin membuka tanah	100 %	100 %	2.10.09.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dalam rangka penghimpunan bahan penyusunan dasar hukum IMT	5 Kali	5 Kali		
									2.10.09.2.01.02 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah terdaptarnya permohonan hak di Kantor Pertanahan	6 persil	6 persil		
	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penatagunaan tanah	100 %	100 %	2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan tanah yang hamparannya dalam 1 daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	2.10.10.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	2 kali	2 kali		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	70,40 (BB) Nilai	70,40 (BB) Nilai	2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Sampaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.11.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja yang disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Balangan	
					2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.11.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100 %	100 %	Kab. Balangan	
									2.11.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase penyusunan laporan keuangan SKPD	100 %	100 %	Kab. Balangan	
					2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.11.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	19 Bimtek	19 Bimtek	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum			
					2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Buah	3 Buah	Kab. Balangan	
									2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13000 lembar	13000 lembar	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.11.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	360 sampler	360 sampler	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.11.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Balangan	
									2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Keterangan
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan oerorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	10 Buah	10 Buah	Kab. Balangan	
									2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Buah	1 Buah	Kab. Balangan	
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perencanaan lingkungan hidup	100 %	100 %	2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)	100 %	100 %	2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah pembuatan dan pelaksanaan KLHS rencana Tata Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen		
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas udara, air dan tutupan lahan	50 %	50 %	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	100 %	100 %	2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik tanah,air dan udara yang diamati	30 titik pantau	30 titik pantau	Kab. Balangan	
									2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	10 %	10 %		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Parameter Sampel yang di Uji	20 Parameter	20 Parameter		
					2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	100 %	100 %	2.11.03.2.02.03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Penghentian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Lokasi	1 Lokasi		
					2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	100 %	100 %	2.11.03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Rehabilitasi	1 Lokasi	1 Lokasi		
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi yang terpelihara dengan baik	100 %	100 %	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi yang terpelihara baik	100 %	100 %	2.11.04.2.01.03 Pengelolaan Kebun Raya	Jumlah Pengelolaan Kebun Raya	1 Lokasi	1 Lokasi		
									2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	3 Lokasi	3 Lokasi	Kab. Balangan	
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah berbahaya dan beracun (limbah B3)	100 %	100 %	2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase pengawasan pengendalian B3 dan limbah B3	100 %	100 %	2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara B3	10 Verifikasi	10 Verifikasi		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengumpulan limbah B3	100 %	100 %	2.11.05.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Limbah B3 yang di kelola	2 Usaha/kegiatan	2 Usaha/kegiatan		
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan	100 %	100 %	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	100 %	100 %	2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan usaha/kegiatan yang ijin lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	10 Usaha/kegiatan	10 Usaha/kegiatan		
	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH	100 %	100 %	2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH	100 %	100 %	2.11.07.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan keraifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang di verifikasi	1 Lokasi	1 Lokasi		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Keterangan
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup masyarakat	100 %	100 %	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	2.11.08.2.01.03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	1 Penyuluhan	1 Penyuluhan		
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 %	100 %	2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerimaan penghargaan lingkungan hidup	100 %	100 %	2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penilaian kinerja masy, lembaga, dunia usaha, pendidikan dalam perlindungan dan pengelolaan LH	3 Penilaian	3 Penilaian		
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100 %	100 %	2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	5 Kasus	5 Kasus		
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan	99 %	99 %	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah terkelola	100 %	100 %	2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Pengurangan Sampah	26 %	26 %	Semua Kab/Kota	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t a h
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Sampah	73 %	73 %		
									2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		8 Unit	Kab. Balangan	
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUK AN DAN PENCATATAN SIPIl													
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	70,40 (BB) Nilai	70,40 (BB) Nilai	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentasi Dokomen perencanaan perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan undang- undangan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.12.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentasi Dokomen keuangan yang di verifikasi	100 %	100 %	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	
					2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	2.12.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	8 OK	8 OK	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	
					2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	100 %	2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	100 %	100 %	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	
									2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentasi dan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Kab. Balanga n	
									2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentasi ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	100 %	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	
									2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	100 %	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	
									2.12.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sosialisasi pelaksanaan pelayanan adminduk di desa		8 kecamatan	Kab. Balanga n	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyedian Jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Balangan	
					2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraaan Dinas opsional Layak fungsi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	waktu Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Balangan	
									2.12.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung layak fungsi	100 %	100 %	Kab. Balangan	
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	100 %	100 %	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP elektronik	100 %	100 %	2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah permohonan KK yang diverifikasi	12000 KK	12000 KK	Kab. Balangan	
										Jumlah permohonan KTP el yang diverifikasi	10000 KTP el	10000 KTP el		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.12.02.2.01.05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah SKPWNI dan SKDWNl yang diverifikasi	2000 berkas	2000 berkas	Kab. Balangan	
					2.12.02.2.03 Penyelenggara an Pendaftaran Penduduk	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	30 %	30 %	2.12.02.2.03.02 Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah permohonan KIA yang diverifikasi	6000 KIA	6000 KIA	Kab. Balangan	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	73 %	73 %	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	98 %	98 %	2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100 %	100 %	Kab. Balangan	
									2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah permohonan Akta Kelahiran yang diverifikasi	6000 berkas	4500 berkas	Kab. Balangan	
										Jumlah permohonan Akta Kematian yang diverifikasi	1000 berkas	1000 berkas		
					2.12.03.2.02 Penyelenggara an Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	100 %	100 %	2.12.03.2.02.01 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah permohonan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian yang diverifikasi	50 dokumen	50 dokumen	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
						Persentase cakupan kepemilikan Buku Nikah/ Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100 %	100 %						
									2.12.03.2.02.04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan langsung adminduk dan pencatatan sipil di Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	Kab. Balangan	
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	100 %	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan	80 %	80 %	2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun	100 %	100 %	Kab. Balangan	
									2.12.04.2.01.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	8 SKPD	5 SKPD	Kab. Balangan	
					2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100 %	100 %	2.12.04.2.03.03 Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Fasilitas Layanan adminduk	23 Jenis	23 Jenis	Kab. Balangan	
									2.12.04.2.03.05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi terkait PIAK	1 Kali	1 Kali	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum			
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100 %	100 %	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan Buku Profil Perkembangan Kependudukan	100 %	100 %	2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Buku Profil Perkembangan Kependudukan	1 Buku	1 Buku	Kab. Balangan	
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Kerjasama yang disepakati di pedesaan	1 kerjasama	1 kerjasama	2.13.03.2.01 Fasilitas Kerja sama antar Desa	Terfasilitasinya Kerjasama Antar Desa	1 Kerjasama	1 Kerjasama	2.13.03.2.01.02 Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar desa dengan pihak ketiga yang difasilitasi		1 Kerjasama	Kab. Balangan	
									2.13.03.2.01.03 Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah pembangunan kawasan perdesaan yang difasilitasi	1 Kawasan	1 Kawasan	Kab. Balangan	
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	80 %	80 %	2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	154 Orang	154 Orang	2.13.04.2.01.01 Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang terfasilitasi jaminan kesehatan	92 %	92 %	Kab. Balangan	
									2.13.04.2.01.02 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan produk hukumnya	154 Desa	154 Desa	Kab. Balangan	
									2.13.04.2.01.03 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	154 Desa	154 Desa	Kab. Balangan	
									2.13.04.2.01.04 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Menetapkan Pertanggungjawaban APBDes Tepat Waktu	75 %	75 %	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa yang telah dibina Aparatur Pemerintah desanya	154 Desa	154 Desa	Kab. Balangan	
									2.13.04.2.01.13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Penyampaian Laporan Inventaris Aset Desa Tepat Waktu	70 %	70 %	Kab. Balangan	
									2.13.04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa Peserta Lomba Desa dengan Klasifikasi berkembang dan cepat berkembang	9 Desa/Kelurahan	9 Desa/Kelurahan	Kab. Balangan	
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang mendapatkan biaya operasional dan Persentase BUMDes yang berkembang	50 %	50 %	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	10 Desa	10 Desa	2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kader PKK Tk. Desa yang dibina	164 Orang	164 Orang	Kab. Balangan	
										Jumlah Kader Posyandu yang terampil	80 Orang	80 Orang		



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t a h a n
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah KPM (Kader Pembangunan Manusia) yang terampil	80 Orang	80 Orang		
										Jumlah LPM dibina	8 LPM	8 LPM		
									2.13.05.2.01.05 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang aktif dan memiliki PAD	56 BUMDes	56 BUMDes	Kab. Balanga n	
									2.13.05.2.01.06 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Inovasi dan teknologi pedesaan	3 Desa/Kelur ahan	3 Desa/Kelur ahan	Kab. Balanga n	
										Jumlah KP-SPAMS didesa	140 KP- SPAMS	140 KP- SPAMS		
										Jumlah Posyantek didesa	40 Desa/Kelu rahan	40 Desa/Kelu rahan		
									2.13.05.2.01.09 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah TP PKK Desa Kelurahan dan Kecamatan yang dibina	165 -	165 -	Kab. Balanga n	
	2.14 URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	38 %	38 %	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	38 %	38 %	2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen grand design pembangunan kependudukan (GDPK)	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Balangan	
									2.14.02.2.01.07 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Pembentukan Koalisi Muda Kependudukan (KMK)	2 KMK	2 KMK	Kab. Balangan	
									2.14.02.2.01.09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	3 Sekolah	3 Sekolah	Kab. Balangan	
					2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan Pemetaan perkiraan Pengendalian Penduduk	100 %	100 %	2.14.02.2.02.08 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	capaian jumlah rumah data ku dikampung KB	30 %	30 %	Kab. Balangan	
									2.14.02.2.02.12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa	30 %	30 %	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Keterangan
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.14.02.2.02.14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana)		8 Laporan		
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan KIE KB	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan KIE KB	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase pembiayaan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes	15 %	15 %	Kab. Balangan	
									2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Rasio petugas pembantu pembina KB Desa (PPKBD) disetiap desa/kelurahan	1 Banding	1 Banding	Kab. Balangan	
					2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didaya gunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	95	95	2.14.03.2.02.03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Capaian jumlah desa di kampung KB untuk mendapatkan akseptor yang mendapatkan pelayanan (daerah yang sulit dijangkau faskes)	50 %	50 %	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
						Cakupan PKB/PLKB yang didaya gunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan plaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	95 %	95 %						
									2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Cakupan klasifikasi kader kelompok institusi masyarakat pedesaan	38 %	38 %	Kab. Balangan	
					2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100 %	100 %	2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	20 %	20 %	Kab. Balangan	
									2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persentase Angka prevalensi kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate/mCPR)	81.27 %	81.27 %	Kab. Balangan	
									2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya sarana penunjang pelayanan KB		31 Unit		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8.21 %	8.21 %	Kab. Balangan	
									2.14.03.2.03.09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Total Fertility Rate (TFR)	2.34 %	2.34 %	Kab. Balangan	
									2.14.03.2.03.11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan dukungan Operasional Pelayanan KB		8 Laporan		
					2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	15 %	15 %	2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Capaian jumlah kampung KB yang memiliki peningkatan klasifikasi	100 %	100 %	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	19,94 %	19,94 %	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	19.94 %	19.94 %	2.14.04.2.01.01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Cakupan Tribina (BKB)	60.02 %	60.02 %	Kab. Balangan	
										Cakupan Tribina (BKL)	52.52 %	52.52 %		
										Cakupan Tribina (BKR)	61.82 %	61.82 %		
									2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	0.71 %	0.71 %	Semua Kab/Kota	
									2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	66 %	66 %	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Keterangan
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)	21 %	21 %	2.14.04.2.02.02 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	57.26 %	57.26 %	Kab. Balangan	
									2.14.04.2.02.03 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling remaja/Mahasiswa	60 %	60 %	Kab. Balangan	
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	68,20 Nilai/Angka	68,20 Nilai/Angka	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100 %	100 %	2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah		
									2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Balangan	
					2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.15.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentasi dokumen keuangan yang diverifikasi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.15.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		38 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	93 Buah	204 Buah	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32 Buah	30 Buah	Kab. Balangan	
									2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.725 Lembar	28599 Lembar	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	112 Eks/Bulan	112 Eks/Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minum yang disediakan untuk mendukung kegiatan rapat	594 Porsi	894 Porsi	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	
										Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	126 Kali	223 Kali		
					2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola	900 Surat	900 Surat	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	
									2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	
									2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Balanga n	
					2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100 %	100 %	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	
									2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung kantor layak fungsi	100 %	100 %	Kab. Balanga n	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan	39,48 %	39,48 %	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	39.48 %	39.48 %	2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpasang	39.48 %	39.48 %	Kab. Balangan	
									2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpelihara	100 %	100 %	Kab. Balangan	
					2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	PAD dari retribusi pelayanan terminal	6000000 R upiah	6000000 R upiah	2.15.02.2.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Pengelola Terminala Tipe C	1 Orang	1 Orang	Kab. Balangan	
					2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Presentase Pelayanan Perparkiran	49.63 %	49.63 %	2.15.02.2.04.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Parkir yang Terbangun		2 Buah	Kab. Balangan	
										Jumlah Izin Penyelenggaraan Parkir Yang Dikeluarkan	10 Izin	10 Izin		
					2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	82 %	82 %	2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan bermotor	1 Unit	1 Unit	Kab. Balangan	



Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan TA. 2022

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.15.02.2.05.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Penguji Kendaraan Bermotor	2 Orang	2 Orang	Kab. Balangan	
									2.15.02.2.05.03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang laik jalan	1494 Kendaraan	1494 Kendaraan	Kab. Balangan	
									2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji	1500 Set	0 Set	Kab. Balangan	
									2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	10 Buah	10 Unit	Kab. Balangan	
					2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diselenggarakan	2 Buah	2 Buah	2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan & Pengendalian Keselamatan Lalu lintas yang dilaksanakan	200 Kegiatan	200 Kegiatan	Kab. Balangan	
									2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan	4 Laporan	1 Laporan	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	30 Laporan	30 Laporan	2.15.02.2.08.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Inspeksi, Audit & Pemantauan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten / Kota yang memenuhi Persyaratan	1 Laporan	0 Laporan	Kab. Balangan	
					2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum	14 Unit	10 Unit	2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum	14 Unit	10 Unit	Kab. Balangan	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	70,40 (BB) Nilai	70,40 (BB) Nilai	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
		Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran; Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik; Tingkat Disiplin Aparatur; Tingkat Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Nilai SAKIP SKPD	100 %	100 %										
									2.16.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SOPD	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan	13 Bulan	13 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
						Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13 Bulan	13 Bulan						
					2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 orang	5 orang	2.16.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		60 paket	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
						Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Orang	5 Orang						



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
						Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan						
									2.16.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	5 orang	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.16.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.16.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.16.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Gedung Kantor		1 Paket	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang diadakan	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Frekuensi perbaikan peralatan kerja Jumlah PNSD yang menerima honorarium sesuai dengan beban tugas Jumlah TKHL yang menjalankan tugas kebersihan Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Balangan	
					2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.16.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.16.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan keterbukaan informasi publik	80 %	80 %	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan keterbukaan informasi publik	80 %	80 %	2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Informasi Tentang Aspirasi Publik	24 Aspirasi	24 Aspirasi	Kab. Balangan	
									2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Produksi konten berita siap tayang	48 Konten/Berita	48 Konten/Berita	Kab. Balangan	
									2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Pengelolaan Data Informasi Publik	681 artikel	681 artikel	Kab. Balangan	
									2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Konten Berita	12 Konten/Berita	12 Konten/Berita	Kab. Balangan	
									2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media	Jumlah dokumentasi kegiatan pembangunan kabupaten Balangan	23 Media	40 Media	Kab. Balangan	
									2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Balangan	20 Kelompok	20 Kelompok	Kab. Balangan	
	2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Inseks Sistem Pemerintahan. Berbasis Elektronik (SPBE)	1,84 %	1,84 %	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi dengan Aplikasi Dashboard Pemerintah Kabupaten Balangan	70 %	70 %	2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Tersebarluasnya Informasi Regulasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum			
		Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	0 %	0 %		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	70 %	70 %						
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	10 %	10 %										
					2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi Layanan Publik dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Terintegrasi Aspirasi Publik	100 %	100 %	2.16.03.2.02.02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik		1 Dokumen		
						Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi dengan Aplikasi Dashboard Pemerintah Kabupaten Balangan	70 %	70 %						
						Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	80 %	80 %						
									2.16.03.2.02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Operasional PPID/ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Pemkab Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.16.03.2.02.08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Pembangunan Jaringan Infrastruktur E-Government SKPD Di Kabupaten Balangan	4 Desa	2 Desa	Kab. Balangan	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100 persen	2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja		12 bulan	2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	12 bulan	Kab. Balangan	
					2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah Penyediaan gaji dan tunjangan	14 Bulan	14 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.17.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah asn yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	2.17.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peningkatan disiplin dan kapasitas suber daya aparatur	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum	12 bulan	12 bulan	2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	Kab. Balangan	
									2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah konsultasi skpd	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
										jumlah penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan		
					2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	Kab. Balangan	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan	12 bulan	12 bulan	2.17.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah jasa pemeliharaan dan biaya pemeliharaan Pajak Kendaraan Dinas	12 bulan	12 bulan	Kab. Balanga n	
									2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 bulan	12 bulan	Kab. Balanga n	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkualitas	3 %	3 %	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanny a dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	6 koperasi	6 koperasi	2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabiliitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	70 Koperasi	22 Koperasi		
									2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan Pemeriksaan kepatuhan	22 %	6 Koperasi		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE KOPERASI YANG MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	10,18 %	10,18 %	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang Dilaksanakan	4 kegiatan	3 kegiatan	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	100 orang	85 peserta	Kab. Balangan	
					2.17.05.2.03 Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidkn dan pelatihan usaha mikro yang dilaksanakan		2 kegiatan	2.17.05.2.03.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro		60 orang		
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE PERTUMBUHAN WIRUSAHA BARU PERTAHUN	57,8 %	57,8 %	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Kegiatan Pendataan, Kemitraan dan Pelatihan Perijinan Usaha Mikro	6 kegiatan	6 kegiatan	2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terdata	11317 UM	11417 UMKM	Kab. Balangan	
		Persentase usaha mikro yang labanya meningkat		28 %										
									2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitasi kemitraan	12 UM	12 UMKM		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Keterangan
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang skala usahanya bertambah		0,30 %	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UKM yang skala usahanya meningkat	7 UKM	45 UKM	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitas teknologi, promosi dan pemasaran	7 Kegiatan	65 UMKM		
		PERSENTASE USAHA MIKRO YANG SUDAH MENERAPKAN E-COMMERCE	0,30 %	0,30 %										
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	63 (B) Nilai	63 (B) Nilai	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100 %	100 %	2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.18.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA- SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Balangan	
									2.18.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Balangan	
									2.18.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.18.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Balangan	
									2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan	Kab. Balangan	
									2.18.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun	8 laporan	8 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.18.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.18.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi dan keuangan	12 laporan	12 laporan	Kab. Balangan	
									2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	Kab. Balangan	
									2.18.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Balangan	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.18.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran	2 laporan	2 laporan	Kab. Balanga n	
									2.18.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	2 laporan	2 laporan	Kab. Balanga n	
					2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.18.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	43 Stell	50 Stell	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	
										Jumlah pakaian kedaerahan	45 Stell	50 Stell		
									2.18.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	20 OK	20 OK	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	
					2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	80 Buah	80 Buah	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	
									2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Buah	12 Buah	Kab. Balanga n	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum			
									2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	234 Pak	468 Pak	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
										Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	40000 Lembar	8000 Lembar		
									2.18.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Bahan bacaan	3 Bahan bacaan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	252 orang/hari	252 orang/hari	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 buah	0 buah	2.18.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan	0 Buah	0 Buah	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.18.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	0 Buah	0 Buah	Kab. Balangan	
									2.18.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	0 buah	0 buah	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	2.18.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Balangan	
					2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	2.18.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin berkala	4 buah	5 buah	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
						Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan						
									2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	Kab. Balangan	
									2.18.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	Kab. Balangan	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha	2 Kerjasama	2 Kerjasama	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	PERDA/Perbup mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Draft Perbup	1 Draft Perbup	2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perda dan Perbup mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	2 Perda/Perbup	2 Perda/Perbup		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
		Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan	1 Potensi Investasi Daerah	1 Potensi Investasi Daerah		Persentase Penyusunan draft Perda dan Perbup Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	20 %	20 %						
					2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	2.18.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Review Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupeten/Kota	1 dokumen review RUPM	1 dokumen review RUPM	Kab. Balangan	
						Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Peta Potensi	1 Peta Potensi						
									2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Terupdate	1 dokumen peta potensi	1 dokumen peta potensi	Kab. Balangan	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Persetujuan Investasi/Rencana Investasi	200 Milyar	200 Milyar	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	2.18.03.2.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah calon investor yang berminat investasi	2 investor	2 investor	Kab. Balangan	
						Jumlah Promosi Potensi Investasi Daerah yang diminati	2 kegiatan	2 kegiatan		Jumlah item media promosi	5 item	5 item		
									2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan promosi investasi	2 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Balangan	
										Jumlah promosi potensi investasi daerah yang diminati	1 laporan	1 laporan		



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t a h u n
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP	100 %	100 %	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	100 %	100 %	2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai Standar Pelayanan	100 %	100 %	Kab. Balanga n	
		Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	100 %	100 %										
									2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase Izin yang dievaluasi	100 %	100 %	Kab. Balanga n	
									2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase konsultasi dan pengaduan diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Balanga n	
									2.18.04.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilayani	100 %	100 %	Kab. Balanga n	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum			
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIA N PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 %	100 %	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	100 %	100 %	2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan kegiatan penanaman modal	100 Laporan	100 Laporan	Kab. Balanga n	
						Persentase Perusahaan yang aktif dalam investasinya	100 %	100 %						
									2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid dan tepat waktu	25 Perusahaa n	30 Perusahaa n	Kab. Balanga n	
									2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya	25 Perusahaa n	30 Perusahaa n	Kab. Balanga n	
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAA N DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100 %	100 %	2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Updating Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100 %	100 %	2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berdasarkan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah data penanaman modal yang tersedia	1 data	1 data	Kab. Balanga n	
										Jumlah data perizinan dan non perizinan	20 data	20 data		
										Jumlah layanan informasi penanaman modal	1 dokumen	1 dokumen		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah layanan informasi perizinan dan non perizinan	6 layanan	6 layanan		
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran; Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik; Tingkat Disiplin Aparatur; Tingkat Pengembangan Kapasitas Sumber DayaAparatur; Nilai SAKIP SKPD	100 %	100 %	2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	7 dokumen	7 dokumen	2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah yang Disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	Semua Kab/Kot a Kab. Balangan	
						"Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD "	3 eks	3 eks						
									2.19.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan realisasi keuangan	20 dokumen	20 dokumen	Kab. Balangan	
					2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	Semua Kab/Kot a Kab.	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					Perangkat Daerah								Balangan	
									2.19.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		2 Dokumen	Kab. Balangan	
					2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	"Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya, Jumlah pakaian kedaerahan"	25 Orang	25 Orang	2.19.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, Jumlah Pakaian Kedaerahan	45 Stell	45 Stell	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
						Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	25 Orang						
									2.19.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	45 Orang	45 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	2.19.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
						Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 unit	5 unit						
						Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan						
						Penyediaan Alat- alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan						



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
						Perbaikan peralatan kantor	12 Bulan	12 Bulan						
									2.19.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	Kab. Balangan	
									2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2000 Lembar	2000 Lembar	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.19.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	7 Jenis	7 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5400 Orang	5400 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
						Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan						
									2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Balangan	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	5 unit	5 unit	2.19.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	5 Unit	5 Unit	Kab. Balanga n	
						Waktu Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Banguna n	1 Banguna n						
									2.19.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Buah	5 Buah	Kab. Balanga n	
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	60 %	60 %	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kot a, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kot a	Jumlah Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) yang terpilih	4 KUPP	4 KUPP	2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) yang Terpilih	4 KUPP	4 KUPP		
						"Terselenggaranya seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera"	8 Orang	8 Orang						



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan n	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
						"Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota"	1 kegiatan	1 kegiatan						
									2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Penigkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen		
									2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Terselenggaranya Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	8 Orang	8 Orang		
					2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	"Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota"	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang Mengikuti Pelatihan/BIMTEK	100 Orang	100 Orang		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAN	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100 %	100 %	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Fasilitas Sarana Olahraga	2 Lapangan	2 Lapangan	2.19.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pelajar Berkebutuhan Khusus untuk mengikuti kejuaraan Peparpeda dan Solna Tk. Prov	2 medali	2 medali		
		TERFASILITASINYA KEGIATAN POPDA	7 Cabor	7 Cabor		Meningkatnya Minat dan Terfasilitasinya Jumlah Atlet Penyandang Cacat (Berkebutuhan Khusus) Menuju Prestasi Pada Kejuaran Soina dan Peparpeda Tingkat Provinsi	2 Kegiatan	2 Kegiatan						
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %						
									2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Sarana Prasarana Olahraga	2 lapangan	2 lapangan	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10 cabor	10 cabor	2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Terfasilitasinya Kegiatan POPDA	10 CABOR	10 CABOR		
					2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100 %	100 %	2.19.03.2.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	25 Orang	25 Orang		
					2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terselenggaranya Kegiatan Lomba Olahraga Tradisional (Balogo, Sumpit, Enggrang,Trompah Panjang, Silat Budaya, Panahan Trdisional dan Tarik Tambang) dalam Rangka HUT RI Kab. Balangan dan Haornas	2 kegiatan	2 kegiatan	2.19.03.2.05.02 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Terselenggaranya Kegiatan Senam Mingguan, Festival Fun Bike dan Festival Jalan Santai Dalam Rangka HUT RI, HUT Kab. Balangan Haornas	40 Orang	40 Orang		
						Terselenggaranya Kegiatan Senam Mingguan, Festival Fun Bike dan Festival Jalan santai Dalam Rangka HUT RI , HUT Kab. Balangan Haornas	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
									2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tradisional Masyarakat	1 cabor	1 cabor		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Prosentase kegiatan kepramukaan tingkat Kabupaten dan Kecamatan	100 %	100 %	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Kwarcab yang dibina	8 kecamatan	8 kecamatan	2.19.04.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Terfasilitasinya Anggota Pramuka Mengikuti Kursus Mahir	100 Persen	100 Persen		
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data yang tersedia untuk mengukur target kinerja perencanaan	45 %	45 %	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Membangun Metadata Statistik Sektoral	5 Data	5 Data	2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Buku Ekonomi Kabupaten Balangan Jumlah Buku Indikator Sosial Budaya Jumlah Buku Infrastruktur Pembangunan Daerah Jumlah Sumber Data Survey Statistik	5 Data	5 Data		
		Persentase elemen data dan informasi yg terpublikasikan dan terupdate	70 %	70 %		Membangun Metadata Statistik Sektoral	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi						
						Persentase Data Sektoral Kabupaten Balangan yang akurat	45 %	45 %						
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	18 %	18 %	2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah OPD yang dilayani kebutuhan persandian dan keamanannya secara tepat waktu	5 OPD	5 OPD	2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Terselenggaranya Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah	24 kasus serangan	24 kasus serangan		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Keterangan
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum			
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	10 SKPD	10 SKPD		Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah	20 %	20 %						
		Terfasilitasinya pengamanan informasi pemerintah daerah	15 kasus	15 kasus		Persentase Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	70 %	70 %						
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	50 %	50 %	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mega event kebudayaan yang dibuat dengan skala besar dan berdampak langsung pada masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	100 orang	100 orang	Kab. Balangan	
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal	33,33 %	33,33 %	2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Kab/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2.22.04.2.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	100 orang	100 orang	Kab. Balangan	
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentasi Cagar Budaya Terlestarikan dan Terkelola Dengan Baik	66,7 %	66,7 %	2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	persentase cagar budaya	66.7 persen	66.7 persen	2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dilindungi	10 buah	10 buah	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Keterangan
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
						Persentase cagar budaya yang dikelola	66.7 persen	66.7 persen						
									2.22.05.2.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dimanfaatkan	2 buah	2 buah	Kab. Balangan	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	62.00 (B) Nilai/Angka	62.00 (B) Nilai/Angka	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang telah disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.23.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase tersusunnya Dokumen RKA-SKPD yang telah disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Balangan	
									2.23.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketersediaan dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang telah disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Balangan	
					2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai Perundang-undangan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan n	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
						Persentase terlaksananya administrasi keuangan Perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	100 %						
									2.23.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.23.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai ketentuan Perundang-undangan	100 %	100 %	Kab. Balangan	
									2.23.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai ketentuan Perundang-undangan	100 %	100 %	Kab. Balangan	
					2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan tang berlaku	100 %	100 %	2.23.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Tersediannya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32 potong	120 potong	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
						Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	100 %						



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.23.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		3 orang	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	2.23.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan jasa perawatan jaringan sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
						Persentase terlaksananya administrasi umum Perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	100 %						
									2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.23.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60 Eksemplar	60 Eksemplar	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					Daerah									
									2.23.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Balanga n	
									2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	Kab. Balanga n	
					2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan barang milik daerah	100 %	100 %	2.23.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan terpelihanya Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	
									2.23.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12 bulan	12 bulan	Kab. Balanga n	
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAA N	Persentase terlaksananya pengelolaan Perpustakaan sesuai Standart Nasional Perpustakaan	25 %	25 %	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Tercapainya Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	100 %	100 %	2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Perpustakaan yang terotomasi dengan lancar	1 Perpustaka an	1 Perpustaka an	Kab. Balanga n	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimtek Pengelola Perpustakaan yang bersertifikat	25 Peserta Bimtek	25 Peserta Bimtek	Kab. Balangan	
									2.23.02.2.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	60000 Pengunjung	60000 Pengunjung	Kab. Balangan	
									2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bertambahnya bahan pustaka yang diminati masyarakat	454 Eksemplar	1454 Eksemplar	Kab. Balangan	
									2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan Pustaka yang dikelola dan dikembangkan tepat waktu	1500 eksemplar	1500 eksemplar	Kab. Balangan	
					2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	100 %	100 %	2.23.02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Kegiatan Budaya Baca yang dilaksanakan dengan baik	3 kegiatan	3 kegiatan	Kab. Balangan	
						Tercapainya tingkat kegemaran membaca masyarakat	100 %	100 %						



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t a h
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.23.02.2.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	null		0 null	Kab. Balangan	
										Terbangunnya sarana dan prasarana Perpustakaan		2 paket		
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Cakupan Peningkatan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	20 %	20 %	2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelestarian naskah kuno	100 %	100 %	2.23.03.2.01.01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah naskah kuno yang dialihmediakan kebentuk cetak/digital	1 Naskah	1 Naskah	Kab. Balangan	
									2.23.03.2.01.02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah tersimpan, terawat, terlestariakan dan terdaftarnya naskah kuno	1 Naskah	1 Naskah	Kab. Balangan	
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Terwujudnya Revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	10 %	10 %	2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi pengelolaan arsip dinamis pencipta arsip	100 %	100 %	2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina kearsipannya	2 SKPD	20 SKPD	Kab. Balangan	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah		
					a									
									2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah tersedianya arsip Aktif dan Arsip In Aktif yang tertata di Unit Kearsipan Perangkat Daerah	2 SKPD	2 SKPD	Kab. Balanga n	
									2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbitnya Jumlah Hasil Laporan Pengawasan/Audit Kearsipan Internal pada Perangkat Daerah	2 SKPD	2 SKPD	Kab. Balanga n	
					2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	100 %	100 %	2.24.02.2.02.01 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Tersedianya daftar Jumlah Arsip yang dikumpul dan tersampaikan Salinan Otentik Naskah Arsip terjaga ke ANRI	2 Lembar	2 Lembar	Kab. Balanga n	
									2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis Yang terdaftar hasil akuisisi, preservasi, dan akses arsip statis	2 Daftar	2 Daftar	Kab. Balanga n	
					2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	100 %	100 %	2.24.02.2.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Arsip yang terdaftar untuk informasi Publik	400 Lembar	400 Lembar	Kab. Balanga n	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Kearsipan yang di DIKLAT/Bimtek dan Jumlah Sarpras Kearsipan terdaftar Penunjang JIKN Pencipta arsip dan Lembaga Kearsipan Daerah	1 orang	1 orang	Kab. Balanga n	
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGA N DAN PENYELAMAT AN ARSIP	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah	10 %	10 %	2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang terdaftar deselamatkan/dilindu ngi	1 Arsip	1 Arsip	2.24.03.2.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang terdaftar yang sudah dinilai dan ditetapkan untuk pemusnahan pada pencipta arsip	1 Daftar	1 Daftar	Kab. Balanga n	
					2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kot a yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Keluraha n	Jumlah yang terdaftar penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan yang terdaftar	1 Naskah	1 Naskah	2.24.03.2.03.03 Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	Kab. Balanga n	
	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP	Prosentasi Pelayanan Perijinan dan Penggunaan Arsip	20 %	20 %	2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kot a	Jumlah pengguna yang terdaftar pelayanan ijin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di lembaga kearsipan daerah	1 Penggun a	1 Penggun a	2.24.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Tersusunnya dan ditetapkannya SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	1 SOP	1 SOP	Kab. Balanga n	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Budidaya Ikan (ton)	675 Ton	675 Ton	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelembagaan Usaha Perikanan yang berkelanjutan (kelompok)	1 Kelompok	1 Kelompok	3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Penumbuhan Kelompok Perikanan (Kelompok)	5 Kelompok	5 Kelompok	Kab. Balangan	
									3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pelatihan yang Diselenggarakan (kali)	1 Kali	1 Kali	Kab. Balangan	
					3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah penyediaan Sarana dan Prasarana Usaha Budidaya Perikanan (kelompok)	4 Kelompok	4 Kelompok	3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Bibit Ikan Unggul (ekor)	1000000 ekor	1000000 ekor	Kab. Balangan	
									3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan yang Diberikan (Kelompok)	4 Kelompok	4 Kelompok	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum			
									3.25.04.2.04.04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemantauan dan Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Balangan	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luas Kawasan Perikanan Lestari (Ha)	290 Ha	290 Ha	3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Koservasi Perikanan (Ha)	220 Ha	220 Ha	3.25.05.2.01.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Konservasi Perikanan Tangkap yang Terawasi (Ha)	220 Ha	220 Ha	Kab. Balangan	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	46,25 Kg/Kapita/Tahun	46,25 Kg/Kapita/Tahun	3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah diversifikasi dan promosi hasil perikanan (hasil Olahan)	8 Olahan	8 Olahan	3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Usaha Pengolahan dan Pemasaran (Pelatihan)	3 Pelatihan	3 Pelatihan	Kab. Balangan	
					3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bahan baku industri pengolahan ikan yang diberikan ke kelompok pengolah hasil perikanan (paket)	1 Paket	1 Paket	3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha Kelompok yang Diberikan (kelompok)	1 Kelompok	1 Kelompok	Kab. Balangan	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Jumlah Kunjungan Wisata	100 %	100 %	3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisata	24000 orang	24000 orang	3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Wisata	2 Objek Wisata	2 Objek Wisata	Kab. Balangan	
									3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Wisata	2 Objek Wisata	2 Objek Wisata	Kab. Balangan	
									3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah POKDARWIS	2 POKDARWIS	2 POKDARWIS	Kab. Balangan	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Event Promosi	20 %	20 %	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event Promosi Daerah yang Terlaksana Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Event	5 Event	3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Promosi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum			
									3.26.03.2.01.02 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event	3 Event	3 Event	Kab. Balangan	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	20 %	20 %	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM dalam Pembekalan Sektor Kepariwisata	20 Orang	20 Orang	3.26.05.2.01.05 Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Event/Kegiatan/Konten Promosi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Balangan	
									3.26.05.2.01.06 Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Kompeten	50 Orang	50 Orang	Kab. Balangan	
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100 %	100 %	3.27.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang Dibuat Dan Diarsipkan (Dokumen)	11 Dokumen	11 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Sekretariat Daerah	BB (72,16) Nilai	BB (72,16) Nilai										



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.27.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang Dibuat Dan Diarsipkan	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									3.27.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.27.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Harian Tertentu Yang Tersedia	440 Buah	440 Buah	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									3.27.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah BIMTEK Yang diikuti	15 Ok	15 Ok	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	100 %	3.27.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedia instalasi Listrik Penerangan Bangunan	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.27.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terkoordinasinya rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	3.27.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya alat dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
										Tersedanya Alat dan Peralatan Kantor	12 Bulan	12 Bulan		
										Tersedianya alat dan bahan kebersihan	12 Bulan	12 Bulan		
										Tersedianya Gaji Pegawai	12 Bulan	12 Bulan		
										tersedianya Makan dan Minum	12 Bulan	12 Bulan		
										tesedianya alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan		
					3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	3.27.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Kebutuhan akan Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan n	K e t a n
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	3.27.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Gaji yang terbayar	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	
										Terpeliharanya Kendaraan Dinas	12 Bulan	12 Bulan		
										Terpenuhinya Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	12 Bulan	12 Bulan		
										Tersedianya Bahan Bakar dan Pelumas	12 Bulan	12 Bulan		
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN SARANA PERTANIAN	Persentasi UPPB / Kelompok Tani penerima bantuan Sarana Pertanian	20,50 %	20,50 %	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Produksi Perkebunan yang Tersedia	13 Paket	13 Paket	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengadaan Pestisida	2000 Liter	2000 Liter	Semua Kab/Kot a	
						Peningkatan Luas Indeks Pertanaman	225 Ha	225 Ha		Pengadaan Pupuk NPK	13300 Kg	13300 Kg		
						Peningkatan Penggunaan Pupuk Berimbang Padda Indeks Pertanaman	225 Ha	225 Ha		Pengawasan dan Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten	150 Orang	150 Orang		
										Pengawasan dan Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan	200 Orang	200 Orang		



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Alat Uji Kadar Karet Kering	2 Buah	2 Buah	Semua Kab/Kot a	
										Jumlah Asap Cair u/ Pembeku / Penggumpal Lateks	10000 Liter	10000 Liter		
										Jumlah Benih/Bibit dan Sarana Produksi Hortikultura	9 Paket	9 Paket		
										Jumlah Combine harvester	1 Paket	1 Paket		
										Jumlah cultivator	1 Paket	1 Paket		
										Jumlah Demostrasi Plot Budidaya Porang	1 Unit	1 Unit		
										Jumlah Demplot Sarana Penyuluhan dalam budidaya tanaman Hortikultura	0 Unit	0 Unit		
										Jumlah Hand Traktor Rotary yang tersedia	5 Buah	5 Buah		
										Jumlah Kecamatan Penyusunan Calon Petani Calon Lokasi	8 Kecamatan	8 Kecamatan		
										Jumlah Kegiatan Hari Lapang Tani dalam rangka Panen Raya dan Tanam Perdana	4 Kali	4 Kali		
										Jumlah Kelompok Penerima Alat Pasca Panen Perkebunan	5 Kelompok	5 Kelompok		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Keterangan
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum			
										Jumlah Kelompok yang Mendapatkan Sosialisasi dan Monitoring Tanaman Hortikultura	12 Kelompok	12 Kelompok		
										Jumlah Luas Rehabilitasi dan Penanaman Tanaman Perkebunan	75 Ha	75 Ha		
										Jumlah Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan yang bernilai ekonomi tinggi	8 Kecamatan	8 Kecamatan		
										Jumlah Pembuatan Papan Nama UPPB	10 Buah	10 Buah		
										Jumlah Pengadaan Hansprayer	179 Buah	179 Buah		
										Jumlah Pengadaan Hansprayer Elektrik	52 Paket	52 Paket		
										Jumlah Pengadaan Pestisida	500 Kg	500 Kg		
										Jumlah Pengambilan sampel ubinan	120 Sampel Ubinan	120 Sampel Ubinan		
										Jumlah Peningkatan Indeks Pertanaman	100 Ha	100 Ha		
										Jumlah peserta Kegiatan Penyampaian Informasi tentang program tanaman pangan	150 Orang	150 Orang		
										Jumlah Pompa Air yang tersedia	1 Buah	1 Buah		
										Jumlah Power Thraser	4 Paket	4 Paket		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum			
										Jumlah Pupuk Yang tersedia	125000 Kg	125000 Kg		
										Jumlah Rice Transplanter	5 Paket	5 Paket		
										Jumlah Springkler dan Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket		
										Jumlah traktor	12 Paket	12 Paket		
										Pengembangan Porang Dengan Pola Supradin		200 Ha		
										Pengembangan Produktivitas Jagung		300 Ha		
					3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit yang bersertifikat (btg)	5000 Bata ng	5000 Bata ng	3.27.02.2.02.01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah benih kelas tinggi yang dihasilkan	2500 Kg	2500 Kg	Semua Kab/Kota	
						Jumlah event promosi Hasil Produksi Perkebunan Unggul Daerah yang diikuti	0 Kegiatan	0 Kegiatan		Jumlah Benih Padi Kelas BR	20000 Kg	20000 Kg		
						Jumlah Pelatihan pengolahan hasil tanaman hortikultura (Pasca Panen)	0 Kegiatan	0 Kegiatan		Jumlah Benih Padi (untuk Penangkar)	1100 Kg	1100 Kg		
						Pameran Anggrek	0 Kegiatan	0 Kegiatan		Jumlah Kebun Koleksi dan Entrys yang terpelihara	12 Ha	12 Ha		
						Pameran Produk unggulan Hortikultura	0 Kegiatan	0 Kegiatan		Jumlah Penangkar Tanaman Pangan dan Hortikultura	4 Kelompok	4 Kelompok		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Keterangan
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum			
						Pembinaan kelompok Wanita Tani (KWT) pengolahan hasil	0 Kegiatan	0 Kegiatan		Jumlah Pertemuan / Rapat Jalur Alur Benih	300 Orang	300 Orang		
						Pengadaan Mesin Pemotong Porang	0 Kegiatan	0 Kegiatan		Jumlah tanaman Varietas baru yang dikembangkan	3 Varietas	3 Varietas		
						Pengadaan Mesin Pencuci Porang	0 Kegiatan	0 Kegiatan						
						Pengadaan Mesin Pengereng Porang	0 Kegiatan	0 Kegiatan						
						Terfasilitasinya Penangkaran Tanaman Pangan	0 Kegiatan	0 Kegiatan						
						terlaksananya kontes buah langka, buah durian jenis lainnya dan kontes buah durian	0 Kegiatan	0 Kegiatan						
						Terlaksananya Pelatihan pengolahan chip porang	0 Kegiatan	0 Kegiatan						
									3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Kegiatan pasca Panen Yang dilaksanakan	3 Kali	3 Kali	Semua Kab/Kota	
										Jumlah Pengadaan Mesin Pemotong Porang	1 Unit	8 Unit		
										Jumlah Pengadaan Mesin Pencuci Porang	5 Unit	0 Unit		
										Jumlah Pengadaan Mesin Pengereng Porang	400 Orang	1 Unit		
										Jumlah Promosi produk unggulan	4 Produk	4 Produk		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Keterangan
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Pelatihan pengolahan chip porang	11 Kegiatan	11 Kegiatan		
					3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelahiran Ternak	210 Ekor	210 Ekor	3.27.02.2.03.02 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Ketersediaan Straw dan N2 Cair	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota	
					3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Populasi Ternak Ayam Buras	42096 Ekor	42096 Ekor	3.27.02.2.05.01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Aneka Ternak yang didistribusikan	500 Ekor	500 Ekor	Semua Kab/Kota	
						Peningkatan Populasi Ternak Itik	112831 Ekor	112831 Ekor		Jumlah Ternak Besar Yang didistribusikan	200 Ekor	200 Ekor		
						Peningkatan Populasi Ternak Kambing	112831 Ekor	112831 Ekor		Jumlah Ternak Kecil Yang didistribusikan	200 Ekor	200 Ekor		
						Peningkatan Populasi Ternak Sapi	112831 Ekor	112831 Ekor		Jumlah Ternak Unggas Yang didistribusikan	4430 Ekor	4430 Ekor		
									3.27.02.2.05.05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Kelahiran dan Ternak yang terpelihara Di Sentra pembibitan Peternakan	5 Ekor	5 Ekor	Semua Kab/Kota	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan n	K e t a n
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah Luas kebun hijauan makanan ternak	8 Ha	8 Ha		
										Jumlah Vaksin dan Obat-obatan Yang Tersedia (Paket)	1 Paket	1 Paket		
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Pertanian	20 %	20 %	3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana yang Terpenuhi	18 Paket	18 Paket	3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Pembangunan/Rehab irigasi pertanian	750 M2	2 Paket	Semua Kab/Kot a	
									3.27.03.2.02.02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Pembangunan/Rehab embung pertanian	500 m3	500 m3	Semua Kab/Kot a	
									3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan/Rehab Jalan Produksi/Jalan Usaha Tani	750 m2	68 Paket	Semua Kab/Kot a	
									3.27.03.2.02.04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit					
									3.27.03.2.02.06 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air					



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan n	K e t a n
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya					
									3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah bangunan UPPB yang dibangun	5 Unit	4 Unit	Semua Kab/Kot a	
										Jumlah Pembangunan/Rehab Pondok Pertemuan	2 Unit	4 Unit		
					3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terbangunnya Kandang Ternak	7 Paket	7 Paket	3.27.03.2.03.01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Prasarana dan Sarana Peternakan terfasilitasi	12 Paket	12 Paket	Semua Kab/Kot a	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIA N KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah Pelayanan Kesehatan Ternak	550 Ekor	550 Ekor	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Pelayanan dan Pengobatan Ternak	550 Ekor	550 Ekor	3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah obat - obatan dan vaksinasi ternak yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kot a	
										Jumlah Pelayanan Vaksinasi Pengobatan Ternak	400 Ekor	400 Ekor		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.27.04.2.01.03 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah obat - obatan dan vaksinasi ternak yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota	
										Jumlah Pelayanan Vaksinasi Pengobatan Ternak	150 Ekor	150 Ekor		
					3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Kegiatan yang dilakukan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pameran peternakan yang diikuti	2 Kegiatan	2 Kegiatan		
									3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Kegiatan Pasar Murah	7 Kegiatan	7 Kegiatan	Semua Kab/Kota	
										Jumlah Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan	5 KWT	5 KWT		
										Jumlah Pertemuan Asuransi Usaha Ternak Sapi	3 Kelompok	3 Kelompok		
										Jumlah Rehab Kandang Karantina Rumah Potong Hewan	1 Paket	1 Paket		
					3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Penyuluhan yang dilakukan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	3.27.04.2.05.01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Peternak yang mengikuti Penyuluhan KIE Peternakan	100 Orang	100 Orang	Semua Kab/Kota	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIA N DAN PENANGGULA NGAN BENCANA PERTANIAN	Persentasi Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	20 %	20 %	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulanga n Bencana Pertanian Kabupaten/Kot a	Jumlah Organisme Penggangu Tanaman yang terkendali dan Jumlah Kebakaran Lahan Perkebunan yang teratasi	25 Ha	25 Ha	3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Pekebun yang Menerima Bantuan Pengendalian OPT Perkebunan	100 Orang	100 Orang	Semua Kab/Kot a	
						Terkendalnya serangan OPT Tanaman Pangan	2000 Ha	2000 Ha		Jumlah Peserta Sekolah Lapang, Sosialisasi Kebakaran Lahan/ Kebun, Bimtek Pembuatan Pengendali OPT	200 Orang	200 Orang		
										Jumlah Petani Mengikuti SLPHT Tanaman pangan dan Hortikultura	150 Orang	200 Orang		
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentasi Petani Peserta Pelatihan yang Memperoleh Sertifikat	100 %	100 %	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	jumlah Kelompok Tani yang mendapat sosialisasi dalam penguatan kelembagaan	425 Kelom pok	425 Kelom pok	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Bimtek/Pelatihan yang Terlaksana	10 Kegiatan	10 Kegiatan	Semua Kab/Kot a	
						Jumlah Petani yang mengikuti Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	500 Orang	500 Orang		Jumlah Penyuluh yang mengikuti Bimtek/Pelatihan dan Penyuluh yang Lulus Uji Kompetensi	10 Orang	10 Orang		
						kenaikan kelas kelompok Tani	500 Orang	500 Orang						
									3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Kelompok Pertanian yang meningkat kelasnya (kelompok)	70 Kelompok	70 Kelompok	Semua Kab/Kot a	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (@50 org)	400 Orang	400 Orang		
										Jumlah Peserta Rapat Teknis UPPB	50 Orang	50 Orang		
										Jumlah Peserta Sekolah Lapang, Sosialisasi Kebakaran Lahan/ Kebun, Bimtek Pembuatan Pengendali OPT	50 orang	50 orang		
									3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian	85 Orang	85 Orang	Semua Kab/Kota	
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan		9,26 %	3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah rekomendasi dan perizinan yang dikeluarkan	590 buah	590 buah	3.30.02.2.01.01 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah peserta sosialisasi yang lulus post test	50 Orang	50 Orang		
		PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI	22 %	22 %										



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
		DENGAN KETENTUAN												
					3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri				3.30.02.2.03.01 Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	jumlah fasilitas perizinan waralaba	15 Buah	20 Buah		
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PENINGKATAN SARPRAS	44,44 %	44,44 %	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dikelola		4 buah	3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar / fasilitas pendukung pasar yang direvitalisasi/dibangun	2 Buah	2 Buah		
						Jumlah pembangunan dan atau revitalisasi pasar		2 buah						
						Jumlah pembangunan dan atau revitalisasi pasar dan Jumlah pasar yang dikelola	6 buah	6 buah						
									3.30.03.2.01.02 Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang bersih	4 Buah	4 Buah		
					3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase peningkatan pedagang yang tertata	20 persen	20 persen	3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang yang berjualan pada tempatnya	300 Orang	300 Orang		



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang yang dibina	100 Orang	100 Orang		
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok		7,8 %	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	54 kali	54 kali	3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah monitoring informasi harga kebutuhan pokok dan bahan penting	54 Data	54 kali		
		PERSENTASE STABILITAS DAN JUMLAH KETERSEDIAAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK	7 %	7 %										
									3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pasar murah	8 Kali	8 Kali		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANG AN EKSPOR	PERSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN PELAKU USAHA SETELAH PROMOSI	26 %	26 %	3.30.05.2.01 Penyelenggara an Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan promosi	1 kali	1 kali	3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran Yang Diikuti	1 Kali	1 Kali	Kab. Balangan	
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISA SI DAN PERLINDUNGA N KONSUMEN	PERSENTASE ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPAN NYA (UTTP) BERTANDA TERA SAH		77 %	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang sudah ditera/tera ulang	1100 buah	1100 buah	3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat uttp yang sudah ditera/tera ulang	1100 Buah	1100 Buah		
		PERSENTASE BARANG BEREDAR YANG DIAWASI YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	77 %	77 %		Jumlah temuan barang tidak layak edar	90 buah	90 buah		Jumlah ASN yang mengikuti diklat kemetrologian	2 Orang	1 Orang		
										Jumlah data uttp yang dimutakhirkan	70000 Buah	70000 Buah		
									3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah masyarakat dan pedagang yang paham penitngnya perlindungan konsumen	50 Orang	50 Orang		
										Jumlah temuan barang tidak layak edar	90 Buah	88 Buah		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Jumlah produk yang dipasarkan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga	25 %	25 %	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaksanaan promosi dan pemasaran	8 kali	8 kali	3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					
									3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah pemasaran produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	8 Kali	8 Kali		
										Jumlah peserta yang lulus post test mengikuti pelatihan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	50 Orang	50 Orang		
									3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah aplikasi yang di sediakan	1 Buah	1 Buah	Kab. Balangan	
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang menerapkan teknologi industri		10 %	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	1 kegiatan	1 laporan	3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang difasilitasi penerapan teknolog, jumlah IKM yang dilatih GMP, Jimlah IKM yang mengikuti pelatihan teknik produksii Industri	26 IKM	10 IKM		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
		PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI	30 %	30 %						Jumlah IKM yang dilatih GMP		10 IKM		
										Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan teknik produksi		10 IKM		
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PRODUK INDUSTRI YANG BERSERTIFIKAT HALAL	7,75 %	7,75 %	3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan rekomendasi penerbitan izin usaha industri	3 kegiatan	3 kegiatan	3.31.03.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikat produk	6 IKM	6 IKM		
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PROFIL IKM YANG BERKEMBANG	0,38 %	0,38 %	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan informasi	1 laporan	1 laporan	3.31.04.2.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah IKM yang didata	2589 IKM	2589 IKM		



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan n	K e t.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.31.04.2.01.02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah produk IKM yang dipamerkan		15 Produk		
	3.32 URUSAN PEMERINTAH N BIDANG TRANSMIGRAS I													
	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANG AN KAWASAN TRANSMIGRAS I	Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi	18,91 %	18,91 %	3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Bertambahnya Lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan ekonomi warga transmigrasi	63.8 ha	63.8 ha	3.32.04.2.01.01 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah frekuensi Kegiatan Penguatan SDM	2 kali	2 kali	Kab. Balanga n	
						Luas Lahan yang dapat dikelola oleh warga transmigrasi di kawasan transmigrasi	64.5 Ha	64.5 Ha						
									3.32.04.2.01.02 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	2 Paket	2 Paket	Kab. Balanga n	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	70,40 (BB) Nilai	70,40 (BB) Nilai	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentasi dokumen perencanaan perangkat daerah yang telah disampaikan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t a n
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentasi ketersediaan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang telah disampaikan tepat waktu (%)	100 Persen	100 Persen	Kab. Balanga n	
					4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang- undangan	100 Persen	100 Persen	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	
									4.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentasi dokumen keuangan yang diverifikasi tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	
									4.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentasi Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai ketentuan perundang-undangan	100 Persen	100 Persen	Kab. Balanga n	
									4.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Persentasi Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran sesuai ketentuan perundang- undangan	100 Persen	100 Persen	Kab. Balanga n	
					4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Keterangan
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	100 %	4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia dan jaringan listrik yang dapat terpenuhi cakupannya	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentasi ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	100 Persen	100 Persen	Kab. Balangan	
									4.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekda	1 Paket	1 Paket	Kab. Balangan	
									4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelayanan logistik	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Balangan	
									4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pelayanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dan pengadaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentasi terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Persen	100 Persen	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (unit)		5 Unit	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (unit)		41 Unit		
					4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentasi terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 Persen	100 Persen	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Sarpras kantor setda yang dapat dipenuhi cakupannya	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Balangan	
									4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 Persen	100 Persen	Kab. Balangan	
					4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas operasional layak fungsi	100 Persen	100 Persen	Kab. Balangan	
									4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Balangan	
									4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	100 Persen	100 Persen	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana gedung kantor/bangunan layak fungsi	100 Persen	100 Persen	Kab. Balangan	
									4.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor/bangunan layak fungsi	100 Persen	100 Persen	Kab. Balangan	
					4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pimpinan yang dilayani administrasi keuangannya	100 %	100 %	4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan KDH dan WKDH	100 Persen	100 Persen		
									4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk KDH/ WKDH	10 Stel	10 Stel	Kab. Balangan	
									4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah penyerapan Dana Operasional KDH/WKDH	100 Persen	100 Persen		
					4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	persentase skpd yang indeks pelayanan publiknya baik	100 %	100 %	4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah produk hukum terkait penataan dan evaluasi organisasi tupoksi dan uraian tugas	25 Produk Hukum	36 Produk Hukum	Kab. Balangan	
						Persentase SKPD yang memiliki nilai RB baik	100 %	100 %		Jumlah SKPD yang memiliki dokumen jabatan lengkap	3 Dokumen	30 Dokumen		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
						Persentase SKPD yang peringkat efektivitas kelembagaanya kategori cukup efektif	100 %	100 %						
						Persentase skpd yg nilai akuntabilitas kinerja baik	100 %	100 %						
									4.01.01.2.13.02 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah bagian dengan nilai SKM baik	30 SKPD	9 Bagian	Kab. Balangan	
										Jumlah SKPD yang menyusun SOP dengan baik dan sesuai aturan	3 SKPD	30 SKPD		
										Jumlah UPP dengan kriteria pelayanan publik baik	2 Laporan	2 UPP		
										Jumlah UPP dengan nilai SKM baik	1 Dokumen	30 UPP		
									4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen LKIP yang disusun dengan baik dan sesuai aturan		1 Dokumen	Kab. Balangan	
										Jumlah SKPD yang memiliki agen perubahan	1 Dokumen	8 SKPD		
										Jumlah SKPD yang memiliki nilai budaya kerja baik	1 Dokumen	8 SKPD		
										Jumlah SKPD yang menyusun laporan kinerja tahunan dengan baik		30 SKPD		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Keterangan
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah SKPD yang menyusun laporan pengukuran kinerja triwulan dengan baik	30 SKPD	30 SKPD		
					4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	persentase cakupan media informasi komunikasi publik yang mempublikasikan kegiatan pembangunan daerah	100 %	100 %	4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Pelayanan Kegiatan Keprotokolan kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	300 Kegiatan	100 %	Kab. Balangan	
						Persentase kegiatan kedinasan KDH/WKDH yang dilayani sesuai standart	100 %	100 %						
									4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase pelayanan Bahan komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah di Kabupaten Balangan	12 Kegiatan	100 %	Kab. Balangan	
									4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase Pendokumentasian Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	12 Kegiatan	100 %	Kab. Balangan	
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi dan kerjasama daerah yang terlaksana dan berkualitas	100 %	100 %	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase IKK urusan Pemerintahan yang dan lengkap	100 %	100 %	4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan peringatan hari jadi Kabupaten Balangan, Peringatan Hari Otonomi Daerah, dan Peringatan HUT RI	12 Bulan	3 Laporan	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
						Persentase SKPD yg menyusun LPPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	100 %		Jumlah laporan program/kerja dan permasalahan yang ditindaklanjuti dan/atau dimediasi	2 Pejabat	12 Laporan		
									4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Desa yang penamaan rupabumi sesuai ketentuan	100 Persen	8 Desa	Kab. Balangan	
										Jumlah pilar batas daerah yang dimonitoring dan evaluasi	100 Persen	15 Pilar		
										Rata-rata skor pelayanan PATEN di Kecamatan	8 Kec	0 Dokumen		
									4.01.02.2.01.03 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporna SPM yang disampaikan tepat waktu	6 SKPD	6 Laporan		
										Jumlah SKPD yang Menyampaikan LPPD dan LKPj tepat waktu	30 SKPD	100 %		
					4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang tepat sasaran	100 %	100 %	4.01.02.2.02.01 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah permasalahan kerukunan keagamaan yang dapat dirumuskan kebijakannya	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Balangan	
						Persentase Tempat Ibadah yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %		persentase sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang mendapat rekomendasi bantuan	100 Persen	100 Persen		



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan n	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum			
									4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah bahan untuk perumusan kebijakan yang tepat sasaran	3 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Balanga n	
										Jumlah Organisasi keagamaan dan tempat ibadah yang diberikan bantuan hibah	23 Organisasi	45 Organisasi		
										Jumlah Organisasi keagamaan yang diberi bantuan operasional	3 Laporan	5 Organisasi		
									4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah bahan untuk perumusan kebijakan	3 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Balanga n	
					4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase kasus/pengaduan yang terselesaikan	100 %	100 %	4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi sesuai SOP	60 Produk Hukum	100 Persen		
						persentase produk hukum yang berhasil di harmonisasikan	100 %	100 %						
						Tingkat kepuasan Layanan produk hukum dan informasi hukum	100 %	100 %						
									4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah pelaporan RANHAM	1 Kasus	3 Laporan	Kab. Balanga n	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Persentase penanganan kasus/pengaduan yang tertangani	2 Kasus	100 Persen		
									4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk hukum Daerah yang didokumentasi / publikasikan dan dapat di akses	500 Produk Hukum	100 Persen	Kab. Balangan	
					4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokume kesepakatan kerjasama daerah yang difasilitasi	2 dokume n	2 dokume n	4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen Kesepakatan Kerjasama yang di tindak lanjuti	2 MoU	10 Dokumen		
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, bidang perekonomian, bidang sumber daya alam yang terlaksana dan berkualitas	100 %	100 %	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase peningkatan pelaksanaan kebijakan sektor perekonomian yang berhasil ditindaklanjuti oleh SKPD terkait	20 %	20 %	4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah laporan kebijakan pengelolaan BUMD /BLUD yang direalisasikan dan laporan oleh BUMD /BLUD	2 Laporan	4 Laporan	Kab. Balangan	
									4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan analisis pengendalian inflasi daerah	1 Laporan	4 Laporan	Kab. Balangan	
									4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah laporan pengawasan ekonomi mikro	20 Persen	1 Laporan	Kab. Balangan	
									4.01.03.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi, evaluasi pendirian BUMD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah kebijakan yang dirumuskan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan	1 rumusan	1 rumusan	4.01.03.2.02.01 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja SKPD berdasarkan Gakor Asisten yang menjadi bahan rakor	30 Program	4 Laporan	Kab. Balangan	
									4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian pelaksanaan pembangunan	1 Laporan	4 Laporan	Kab. Balangan	
									4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah yang disampaikan tepat waktu	1 Dokumen	4 Laporan	Kab. Balangan	
					4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	40 %	40 %	4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan melalui PBJ yang selesai	100 Persen	100 Persen	Kab. Balangan	
						Pemanfaatan Sistem Pengadaan	100 %	100 %						
						Tingkat Kematangan UKPBJ	100 %	100 %						
									4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase Pemanfaatan aplikasi SPSE dalam PBJ	20 Persen	80 Persen	Kab. Balangan	
									4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi	5 Orang	50 Orang	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Keterangan	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
					4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase peningkatan penyelesaian permasalahan sektor perekonomian dan sumber daya alam pada SKPD terkait yang berhasil difasilitasi dan ditindaklanjuti (%)	20 %	20 %	4.01.03.2.04.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor pertambangan dan lingkungan hidup pada SKPD terkait	1 Laporan	1 Rekomendasi	Kab. Balangan		
	4.02 SEKRETARIAT DPRD														
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Sekretariat Daerah	BB (72,16) Nilai	BB (72,16) Nilai	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	60 Dokumen	60 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Balangan		
						Jumlah Dokumen RKA dan DPA	4 dokumen	4 dokumen							
						Persentase Laporan Capaian Kinerja dan keuangan	100 persen	100 persen							
									4.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA	90 Dokumen	90 Dokumen	Kab. Balangan		
									4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan keuangan	32 Dokumen	32 Dokumen	Kab. Balangan		
					4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan	2 dokumen	2 dokumen	4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
						Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 dokumen	2 dokumen						
						Waktu Pelayanan Administrasi Keuangan	12 bulan	12 bulan						
									4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	40 Dokumen	40 Dokumen	Kab. Balangan	
									4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Bulanan / Semesteran	20 Dokumen	20 Dokumen	Kab. Balangan	
					4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Asn yang mengikuti pelatihan	27 OK	27 OK	4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas dan atribut lainnya yang di sediakan	100 stel	100 stel	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
						Jumlah Pakaian dinas dan atribut lainnya yang di sediakan	100 Stel	100 Stel						
									4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Asn yang mengikuti pelatihan	27 OK	27 OK	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Bahan cetak dan penggandaan yang di selesaikan	100 persen	100 persen	4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Komponen Alat Listrik dan penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
						Persentase Fasilitas rapat dan kordinasi yang di sediakan	100 persen	100 persen						



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
						Persentasi peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	100 persen	100 persen						
						persentasi perbaikan peralatan kerja	100 persen	100 persen						
						Waktu Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 persen	100 persen						
									4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	69 kotak	69 kotak	Kab. Balangan	
									4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Bahan cetak dan penggandaan yang di selesaikan	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas rapat dan kordinasi yang di sediakan	10 kali	25 kali	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Roda Empat dan Dua yang di sediakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Penyediaan perbaikan peralatan kerja	12 bulan	12 bulan	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
						Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan						
						Waktu Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan						
									4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	Kab. Balangan	
					4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas / Oprasional yang di pelihara	100 persen	100 persen	4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemeliharaan Mobil / Kendaraan dinas	100 persen	100 persen	Kab. Balangan	
						Jumlah kendaraan dinas / Sarpras yang di pelihara	100 persen	100 persen						
						Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	100 persen	100 persen						
									4.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	100 persen	100 persen	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Pakaian dinas dan atribut lainnya yang di sediakan	12 bulan	12 bulan	4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Waktu Penyediaan Layanan Admistrasi Keuangan DPRD	12 bulan	12 bulan	Kab. Balangan	
						Waktu Penyediaan Layanan Admistrasi Keuangan DPRD	12 bulan	12 bulan						
									4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian dinas dan atribut lainnya yang di sediakan	156 stel	156 stel	Kab. Balangan	
					4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase Penyediaan kebutuhan rumah tangga jabatan	12 bulan	12 bulan	4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase Penyediaan kebutuhan rumah tangga jabatan	100 persen	100 persen	Kab. Balangan	
						Waktu Penyediaan Layanan Admistrasi Keuangan DPRD	12 bulan	12 bulan						
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat pelayanan pelaksanaan tugas DPRD	Nilai IKM Baik	Nilai IKM Baik	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD	100 persen	100 persen	4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Naskah Raperda yang di bahas	3 naskah	3 naskah		
						Jumlah Pelaksanaan Kajian Perundang-undangan	100 persen	100 persen						
						Prosentase peraturan DPRD yang di tetapkan	100 persen	100 persen						
						Prosentase Raperda yang di setuju Bersama	100 persen	100 persen						
									4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Naskah Raperda yang di bahas	6 naskah	6 naskah		



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiata n	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Fasilitas Kegiatan kajian Perundang-undangan	3 kegiatan	3 kegiatan		
									4.02.02.2.01.04 Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Fasilitas Naskah akademik	1 naskah	1 naskah		
					4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	1. Prosentase dokumen kebijakan anggaran yang disepakati bersama 2. Prosentase dokumen Raperda kebijakan anggaranyang disetujui bersama	100 %	100 %	4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Kegiatan Rapat Yang di Fasilitasi	5 kali	2 kali		
						Jumlah notulen Rapat pembahasan APBD	2 Notulen	2 Notulen						
						Jumlah notulen Rapat pembahasan APBD Perubahan	4 Notulen	4 Notulen						
						Jumlah notulen Rapat pembahasan KUA dan PPAS	100 %	100 %						
						Jumlah notulen Rapat pembahasan Laporan semester	4 Notulen	4 Notulen						
						Jumlah notulen Rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD	4 Notulen	4 Notulen						
						Jumlah notulen Rapat pembahasan perubahan KUA dan PPAS	2 notulen	2 notulen						



Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan TA. 2022

N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan n	K e t .	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
									4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Kegiatan Rapat Yang di Fasilitasi	5 kali	2 kali			
									4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	Jumlah Kegiatan Rapat Yang di Fasilitasi	5 kali	4 kali			
									4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Kegiatan Rapat Yang di Fasilitasi	5 kali	5 kali			
									4.02.02.2.02.05 Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Kegiatan Rapat Yang di Fasilitasi	2 kali	2 kali			
									4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Kegiatan Rapat Yang di Fasilitasi	3 kali	3 kali			
					4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggara an Pemerintahan	Jumlah notulen Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	3 notulen	3 notulen	4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah notulen rapat pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	4 notulen	4 notulen	Kab. Balanga n		
						Jumlah notulen rapat pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	100 perse n	100 perse n							
						Jumlah notulen Rapat pengawasan Penggunaan Anggaran	1 notulen	1 notulen							



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
						Jumlah notulen Rapat Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4 notulen	4 notulen						
						Jumlah notulen Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 notulen	4 notulen						
						Jumlah notulen Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 notulen	4 notulen						
						Jumlah notulen Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 notulen	4 notulen						
						Jumlah notulen Rapat Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 notulen	4 notulen						
						prosentase Rapat kerja yang difasilitasi dengan baik	100 perse n	100 perse n						
									4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah notulen rapat pengawasan bidang pemerintahan dan hukumJumlah notulen rapat pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	4 notulen	4 notulen	Kab. Balanga n	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah notulen Rapat Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 notulen	0 notulen	Kab. Balangan	
									4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah notulen Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 notulen	4 notulen	Kab. Balangan	
									4.02.02.2.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah notulen Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 notulen	0 notulen	Kab. Balangan	
									4.02.02.2.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah notulen Rapat Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 notulen	0 notulen	Kab. Balangan	
									4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah notulen Rapat pengawasan Penggunaan Anggaran	3 notulen	4 notulen	Kab. Balangan	
									4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah notulen Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 notulen	2 notulen	Kab. Balangan	
					4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota dewan yang mengikuti	25 OK	25 OK	4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah anggota dewan yang mengikuti bimtek	25 OK	25 OK		



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
						Jumlah Anggota dewan yang mengikuti orientasi jabatan	25 OK	25 OK						
						Jumlah Kelompok Pakar	100 perse n	100 perse n						
						Jumlah NotulenRapat Program Kerja DPRD	4 notulen	4 notulen						
						Jumlah Notulen RDP	5 OK	5 OK						
						Jumlah Tenaga Ahli yang di rekrut	2 OK	2 OK						
						Persentasi kegiatan DPRD yang di publikasikan	30 OK	30 OK						
									4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Waktu Penyediaan Dokumentasi dan Publikasi DPRD	12 bulan	12 bulan		
									4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Rapat Dengar Pendapat	12 bulan	12 bulan		
									4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Fasilitasi Rapat Progra Kerja DPRD	6 bulan	6 bulan		
					4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah	100 perse n	100 perse n	4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Waktu Penyediaan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	6 bulan	6 bulan	Kab. Balanga n	
						Jumlah laporan Reses	2 notulen	2 notulen						
						Jumlah Notulen rapat pokir	4 dokume n	4 dokume n						
						prosentase Pokir DPRD yang disampaikanke Bappeda	100 perse n	100 perse n						
									4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Kegiatan Rapat Yang di Fasilitasi	2 kali	2 kali	Kab. Balanga n	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	Jumlah Kegiatan Reses yang terfasilitasi	2 kegiatan	2 kegiatan	Kab. Balangan	
					4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi	4 dokume n	4 dokume n	4.02.02.2.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah dokumen rancangan program tahunan DPRD	70 Dokumen	70 Dokumen	Kab. Balangan	
					4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Laporan kinerja DPRD	4 dokume n	4 dokume n	4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dprd 4 x 25	100 kali	100 kali		
						Jumlah Laporan Hasil Kegiatan	4 dokume n	4 dokume n						
						Jumlah Notulen Rapat	4 dokume n	4 dokume n						
						Jumlah Risalah rapat paripurna DPRD	4 dokume n	4 dokume n						
						Persentase fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	100 perse n	100 perse n						
									4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen risalah rapat	42 Dokumen	42 Dokumen		
									4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Fasilitasi rapat	10 kali	12 kali		
									4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Risalah Rapat Paripurna	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Balangan	
	5.01 PERENCANAAN													



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	70,40 (BB) Nilai	70,40 (BB) Nilai	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja murni dan Renja Perubahan serta Renstra Bappeda (dokumen)	3 Dokumen	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Bappeda (dokumen)	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Balangan	
									5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumenTersusunnya LKIP, LPPD, Laporan e- Monev Bappeda	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Balangan	
					5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									5.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Pemenuhan jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Balangan	
									5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Balangan	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi,sarana & prasarana perkantoran	100 %	100 %	5.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	55 stell	55 stell	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									5.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Upaya peningkatan pengetahuan dan sumber daya manusia (SDM) pegawai	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi,sarana & prasarana perkantoran	100 %	100 %	5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 unit	4 unit	Kab. Balangan	
									5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan, koran, majalah, buku serta peraturan-peraturan	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan dan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah,	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	2 paket	2 paket	5.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perencanaan bangunan kantor bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Balangan	
					5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa penunjang kantor bappeda	12 bulan	12 bulan	5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan langganan telepon, air, listrik dan internet	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah peralatan kerja terpelihara dgn baik,	3 unit	3 unit	Kab. Balangan	
										jumlah peralatan kerja terpelihara dgn baik,persentase ruangan /tempat kerja yg bersihTersedianya kebutuhan alat tulis kantor	12 bln	12 bln		
										persentase ruangan /tempat kerja yg bersih	100 persen	100 persen		
					5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik daerah Bappeda	12 bulan	12 bulan	5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik	22 unit	22 unit	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang terpelihara dengan baik	22 unit	22 unit	Kab. Balangan	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi dan keselarasan antara perencanaan tahunan terhadap perencanaan jangka menengah	100 %	100 %	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan daerah yg baik & tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah pelaksanaan		4 dokumen	Kab. Balangan	
										Jumlah pelaksanaan Koordinasi Penelaahan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dokumen kebijakan daerah lainnya	4 kegiatan	4 kegiatan		
									5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	jumlah dokumen konsultasi publik	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Balangan	
									5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	jumlah dokumen pelaksanaan musrenbang	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Balangan	
									5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	70 %	70 %	5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data Informasi Pembangunan Daerah Yang dikelola	2 Data	2 Data	Kab. Balangan	
									5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Profil daerah Kabupaten Balangan.	2 buah	2 buah	Kab. Balangan	
					5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan daerah	4 dokumen	4 dokumen	5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	Kab. Balangan	
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKA PD dengan Renja PD) bidang infrastruktur & kewilayahan	92 %	92 %	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD dengan nilai baik (Gakor pemerintahan dan pembangunan manusia)	46 Dokumen	46 Dokumen	5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah bahan rancangan RKPD Sub Bidang Pemerintahan (ranwal RKPD Tahun n dan Perubahan RKPD Tahun Berjalan Garis koordinasi sub Bidang)	2 bahan	2 bahan	Kab. Balangan	
		Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKA PD dengan Renja PD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	92 %	92 %		Jumlah dokumen perencanaanSKPD dengan nilai baik & tepat waktu(gakorpemerintahan & pembangunan manusia)	18 dokumen	18 dokumen						



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiata n	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
		Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja PD dengan Renstra PD) bidang infrastruktur & kewilayahan	92 %	92 %										
		Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja PD dengan Renstra PD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	92 %	92 %										
									5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen renja yang di verifikasi	32 dokumen	36 dokumen	Kab. Balangan	
									5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan	64 dokumen	72 dokumen	Kab. Balangan	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah fasilitasi forum/pokja/pemang ku kepentingan	100 Persen	5 kegiatan	Kab. Balanga n	
									5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan RKPD Sub Bidang Sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa (Ranwal RKPD Tahun n dan Perubahan RKPD Tahun berjalan)	2 bahan	2 bahan	Kab. Balanga n	
									5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen renja yang diverifikasi sub bidang pembangunan manusia	8 dok	2 dok	Kab. Balanga n	
									5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang pembangunan manusia	16 dok	16 dok	Kab. Balanga n	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah fasilitasi forum/pokja/pemangku kepentingan Bidang Pembangunan Manusia	100 Persen	5 Kegiatan	Kab. Balangan	
					5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan SKPD dengan nilai baik (gakor ekonomi & SDA)	8 Dokumen	8 Dokumen	5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) Bidang perekonomian	2 bahan	2 bahan	Kab. Balangan	
						Jumlah dokumen perencanaanSKPD dengan nilai baik & tepat waktu(gakor ekonomi & SDA)	18 dokumen	18 dokumen						
									5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen perencanaan yang di verifikasi subbid ekonomi (Renstra, renja, dan renja perubahan)	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pengendalian tahun berjalan dan monev tahun n-2 SKPD subid ekonomi	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Balangan	
									5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah fasilitasi forum/pokja/pemangku kepentingan Bidang Pemerintahan	5 kegiatan	5 kegiatan	Kab. Balangan	
									5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) Bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	2 Bahan	2 Bahan	Kab. Balangan	
									5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan yang di verifikasi subbid ekonomi (Renstra, renja, dan renja perubahan)	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Balangan	



N o	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiata n	K e t .	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah			
									5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen pengendalian tahun berjalan dan monev tahun n-2 SKPD subid sumber daya alam dan lingkungan hidup	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Balanga n		
									5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah fasilitasi forum/pokja/pemang ku kepenitngan	5 kegiatan	5 kegiatan	Kab. Balanga n		
					5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD dengan nilai baik (gakor infrastruktur dan LH)	1 Dokume n	1 Dokume n	5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) Bidang infrastruktur dan kewilayahan	2 Bahan	2 Bahan	Kab. Balanga n		
						Jumlah dokumen perencanaanSKPD dengan nilai baik & tepat waktu(gakor infrastruktur dn LH)	18 dokum en	18 dokum en							
									5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan yang di verifikasi subbid ekonomi (Renstra, renja, dan renja perubahan)	6 dokumen	6 dokumen	Kab. Balanga n		



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t a h
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi (dokumen pengendalian tahun berjalan dan monev tahun n-2 SKPD) subid sinfrastruktur dan kewilayahan	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Balanga n	
									5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah fasilitasi forum/pokja/pemang ku kepentinganJumlah fasilitasi forum/pokja/pemang ku kepenitngan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Kab. Balanga n	
									5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) Bidang infrastruktur dan kewilayahan	2 Bahan	2 Bahan	Kab. Balanga n	
									5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan yang di verifikasi subbid ekonomi (Renstra, renja, dan renja perubahan)	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Balanga n	
									5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi (dokumen pengendalian tahun berjalan dan monev tahun n-2 SKPD) subid sinfrastruktur dan kewilayahan	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Balanga n	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
									5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah fasilitasi forum/pokja/pemangku kepentingan bidang kewilayahan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Kab. Balangan		
	5.02 KEUANGAN														
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	70,40 (BB) Nilai	70,40 (BB) Nilai	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	100 persen	100 persen	5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Balangan		
									5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketersediaan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disampaikan tepat waktu	100 persen	100 persen	Kab. Balangan		
									5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Balangan		
					5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 persen	100 persen	5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Balangan		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Keuangan Akhir sesuai ketentuan perundang-undangan	100 persen	100 persen	Kab. Balangan	
									5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran sesuai ketentuan perundang-undangan	Persentase Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran sesuai ketentuan perundang-undangan	100 persen	100 persen	Kab. Balangan	
					5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									5.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 persen	100 persen	Kab. Balangan	
									5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 persen	100 persen	5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	Persentase ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	100 persen	100 persen	Kab. Balangan	
									5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentasi terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan Jasa Surat Menyurat sesuai kebutuhan	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentasi terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									5.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	Kab. Balangan	
									5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan	100 persen	100 persen	Kab. Balangan	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	
									5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung kantor layak fungsi	100 persen	100 persen	Kab. Balanga n	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAA N KEUANGAN DAERAH	INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	87 %	87 %	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Rancangan APBD disampaikan tepat waktu	100 perse n	100 perse n	5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun sesuai ketentuan	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Balanga n	
									5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen		
									5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah unit kerja yang melaksanakan penyusunan dan review/asistensi RKA SKPD dan RKA-P SKPD	48 unit kerja	48 unit kerja		
									5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah unit kerja yang melaksanakan penyusunan dan review/asistensi DPA SKPD dan DPA-P SKPD	48 unit kerja	48 unit kerja		



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Balangan	
									5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Balangan	
									5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Balangan	
					5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	% SP2D sesuai ketentuan yang diterbitkan	100 persen	100 persen	5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Kas Daerah Kabupaten Balangan	12 laporan	12 laporan	Kab. Balangan	
									5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Monev Dana Transfer ke Kabupaten Balangan	12 laporan	12 laporan	Kab. Balangan	



N o	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan n	K e t a h an
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah SP2D yang diterbitkan sesuai ketentuan	10000 doku men	10000 doku men	Kab. Balanga n	
									5.02.02.2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah regulasi penatausahaan keuangan daerah	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Balanga n	
					5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	% Laporan Keuangan Daerah disampaikan Tepat Waktu	100 perse n	100 perse n	5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPKD	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Balanga n	
									5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Balanga n	



N o	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiata n	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Balanga n	
									5.02.02.2.03.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Balanga n	
									5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Balanga n	
									5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Realisasi Keuangan Triwulan SKPKD	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Balanga n	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	terlaksananya cakupan kelancaran penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100 persen	100 persen	5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	terlaksananya bantuan keuangan kepada desa berupa dana DD dan ADD	154 desa	154 desa	Kab. Balangan	
									5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya penyediaan dan penanggulangan bencana daerah	1 tahun	1 tahun	Kab. Balangan	
									5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa	154 desa	154 desa	Kab. Balangan	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	INDEKS PENGELOLAAN ASET DAERAH	40 %	40 %	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset tanah yang bersertifikat dan yang telah diajukan pendaftaran sertifikat	6.44 persen	6.44 persen	5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen SSH yang diterbitkan tepat waktu	50 buku	50 buku	Kab. Balangan	
						Persentase pemindah tanganan BMD yang selesai dilaksanakan	100 persen	100 persen						
						Persentase penyelesaian LBMD tahunan	100 persen	100 persen						
						Persentase RKBMD yang disusun sesuai dengan kondisi eksisting	100 persen	100 persen						
									5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen RKBMD yang disusun sesuai kondisi eksisting	31 dokumen	31 dokumen	Kab. Balangan	
									5.02.03.2.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Regulasi dan Prosedur Operasional Baku (POB) tentang Penatausahaan & Pemanfaatan BMD	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Balangan	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen terkait inventarisasi barang milik daerah	3 dokumen	3 dokumen	Kab. Balangan	
									5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah aset tanah yang diajukan pendaftaran sertifikat	50 persil tanah	50 persil tanah	Kab. Balangan	
									5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan bermotor yang telah membayar pajak	800 kendaraan bermotor	800 kendaraan bermotor	Kab. Balangan	
									5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dapat dipindah tangankan	100 item	100 item	Kab. Balangan	
										Jumlah Proses pemindah tanganan BMD yang sesuai regulasi	10 kegiatan	10 kegiatan		
									5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen LBMD yang disusun sesuai ketentuan	62 buku	62 buku	Kab. Balangan	
										Jumlah Dokumen rekonsiliasi bulanan aset dan persediaan dengan SKPD	720 Dokumen	720 Dokumen		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Peningkatan kapasitas SDM Pengelolaan BMD	80 orang	80 orang	Kab. Balangan	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	% Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB, % Penerimaan PAD selain PBB -P2 dan BPHTB, dan Persentase Pendapatan non PAD	100 %	100 %	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	% Penerimaan PBB P- 2 dan BPHTB, % Penerimaan PAD selain PBB -P2 dan BPHTB, dan Persentase Pendapatan non PAD	100 persen	100 persen	5.02.04.2.01.01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen pengelolaan pajak daerah	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Balangan	
									5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah SDM Aparatur Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang Mengikuti Penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah	30 orang	30 orang	Kab. Balangan	
									5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	jumlah objek pajak yang didata dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan	1000 objek pajak	1000 objek pajak	Kab. Balangan	
									5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah sistem informasi tentang PBB-P2 dan BPHTB	2 sistem informasi	2 sistem informasi	Kab. Balangan	
									5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah SPTPD yang diterbitkan	3000 SPTPD	3000 SPTPD	Kab. Balangan	
										Jumlah SSPD yang diterbitkan	3000 SSPD	3000 SSPD		



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Rekap Laporan Penelitian dan verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	12 laporan	12 laporan	Kab. Balangan	
									5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Penagihan dan Monitoring Pajak Daerah serta Meningkatnya Penerimaan Daerah dari Penagihan Piutang Pajak Daerah	12 laporan	12 laporan	Kab. Balangan	
									5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 dokumen	12 dokumen	Kab. Balangan	
									5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Balangan	
	5.03 KEPEGAWAIA N													
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) BKPSDM	65 (B) Nilai	65 (B) Nilai	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan dengan baik		100 %	5.03.01.2.01.01 Penyusunan Laporan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	
									5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum			
									5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku		100 %	5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS/CPNS	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									5.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %	Kab. Balangan	
					5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum		100 %	5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Kab. Balangan	
									5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	156 Eksampler	4680 Eksemplar	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Balangan	
					5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan layak fungsi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									5.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya layak fungsi	100 %	100 %	Kab. Balangan	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase tata kelola dan pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur berlaku		100 %	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase data kepegawaian yang mutakhir/terkini		100 %	5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	100 %	100 %	Kab. Balangan	
						Persentase pemenuhan pegawai berdasarkan ABK		55 %						
									5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Usulan Pensiun yang disampaikan	100 %	100 %	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Kelembagaan KORPRI Kabupaten Balangan	100 %	100 %	Kab. Balangan	
									5.03.02.2.01.12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pemutakhiran data kepegawaian pada database BKN	100 %	100 %	Kab. Balangan	
					5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi, fungsional yang terisi		100 %	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase layanan pengelolaan Mutasi ASN	100 %	100 %	Kab. Balangan	
						Persentase SK Kenaikan Pangkat yang terbit tepat waktu		100 %						
									5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase terbitnya SK Kenaikan Pangkat ASN yang memenuhi persyaratan	100 %	100 %	Kab. Balangan	
					5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat kompetensi teknis dan fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		35 %	5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang mengikuti Assesment	18 orang	43 orang	Kab. Balangan	
									5.03.02.2.03.03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang direkomendasikan dalam diklat/pelatihan/bimbingan diklat teknis, tugas dan fungsi	70 orang	850 Orang	Kab. Balangan	
										Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan UKPPI	500 orang	70 Orang		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Keterangan
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan bantuan dana untuk Belajar dan Ikatan Dinas sesuai kebutuhan daerah	5 orang	4 Orang	Kab. Balangan	
										Persentase ASN yang melaksanakan pendidikan S2/S3		15 %		
									5.03.02.2.03.06 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Persentase ASN Struktural/Administrasi yang dibiayai Diklat Teknis	10 %	10 %	Kab. Balangan	
									5.03.02.2.03.10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Persentase Jabatan Fungsional Tertentu (Non Guru dan Kesehatan) yang memiliki sertifikat kompetensi	50 %	50 %	Kab. Balangan	
					5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pegawai ASN yang disiplin		100 %	5.03.02.2.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase SKP Aparatur yang direviu	50 %	50 %	Kab. Balangan	
						Persentase penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat		100 %						
									5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan (reward)	6 orang	0 Orang	Kab. Balangan	
									5.03.02.2.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Persentase usulan Tanda Jasa bagi Pegawai yang diproses	100 %	100 %	Kab. Balangan	
									5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Laporan Pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Persentasi Permohonan Perceraian yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Kab. Balangan	
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur		66 %	5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase CPNS yang lulus Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar		100 %	5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti Pelatihan Struktural	6 orang	6 orang	Kab. Balangan	
						Persentase pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang lulus sertifikasi kompetensi manajerial		100 %		Persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar	137 orang	100 %		
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi	55 (Inovatif)	55 (Inovatif)	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	3 Dokumen	3 Dokumen	5.05.02.2.01.02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 dokumen	4 dokumen	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	100 %	100 %										
									5.05.02.2.01.12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Balangan	
					5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.05.02.2.02.03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Balangan	
					5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pengembangan	3 Dokumen	3 Dokumen	5.05.02.2.03.09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	2 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Balangan	
						Jumlah Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 dokumen	2 dokumen						
					5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi dan teknologi yang di jaring	2 Dokumen	2 Dokumen	5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Balangan	
						Jumlah inovasi dan teknologi yg di jaring	2 inovasi	2 inovasi						
									5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah diseminasi, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	1 Inovasi	1 Laporan	Kab. Balangan	



Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan TA. 2022

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH													
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	71 (BB) nilai	71 (BB) nilai	6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang baik	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketersediaan dokumen laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang baik	100 %	100 %	Kab. Balangan	
					6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 Persentase	100 Persentase	6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	6.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	35 Stel	190 Stel	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	4 Pegawai	11 Pegawai	Kab. Balangan	
					6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	prosentase pemenuhan administrasi perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentasi ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	100 persen	100 persen	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum			
									6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	120 Eksemplar	120 Eksemplar	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentasi terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan operasional		7 unit	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									6.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	4 unit	5 unit	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	12 Bulan	6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentasi terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Balangan	
					6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase gedung kantor dan bangunan lainnya yang layak fungsi	100 %	100 %	Kab. Balangan	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase SKPD yang mendapatkan nilai akuntabilitas baik	50 %	50 %	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal	100 %	100 %	6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang disampaikan tepat waktu	33 LHP	33 LHP	Kab. Balangan	
									6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	1 LHP	1 LHP	Kab. Balangan	
									6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja yang disampaikan tepat waktu	2 LHP	2 LHP	Kab. Balangan	
									6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu		1 LHP	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang disampaikan tepat waktu	3 LHP	3 LHP	Kab. Balangan	
									6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti	50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	Kab. Balangan	
					6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase OBRIK Tanpa Temuan Indikasi Kerugian Negara/Daerah	100 %	100 %	6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Prosentase penyelesaian kerugian daerah	70 %	70 %	Kab. Balangan	
									6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	73 LHP	73 LHP	Kab. Balangan	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Integritas	78 %	78 %	6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Cakupan pendampingan dan asistensi pada Obyek Pemeriksaan di lingkup Pememrintah Kabupaten Balangan	100 %	100 %	6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah SKPD yang diusulkan dalam penilaian Maturitas SPIP Level 3	9 SKPD	9 SKPD	Kab. Balangan	
									6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah SKPD yang dilakukan PMPRB	12 SKPD	31 SKPD	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Pemenuhan Data Dukung Indikator MCP	90 %	90 %	Kab. Balangan	
									6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang lulus seleksi administrasi WBK	3 SKPD	3 SKPD	Kab. Balangan	
	7.01 KECAMATAN													
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		66.50 Nilai		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan dengan baik	100 Persen	100 Persen		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun dengan benar dan tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen		
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	70,40 (BB) Nilai	70,40 (BB) Nilai		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan	100 %	100 %		Jumlah dokumen perencanaan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)				Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	6 Dokumen	6 Dokumen		Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen		
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	65,20 Nilai	65,20 Nilai		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100 %	100 %		Jumlah dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen		
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)		70,40 %		Persentase Dokumen Perencanaan,Penggaran,dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang disampaikan Tepat Waktu	6 Dokumen	6 Dokumen		Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disampaikan dengan baik	100 %	100 %		
		Persentasi ketersediaan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang telah disampaikan tepat waktu		70,40 %		Persentase ketersediaan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang telah disampaikan tepat waktu	100 %	100 %						
		Tingkat Disiplin Aparatur	100 Persen	100 Persen		Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100 %	100 %						
		Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	70,40 (BB) Nilai	70,40 (BB) Nilai										



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik	100 Persen	100 Persen										
		Tingkat Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 Persen	100 Persen										
									7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Balangan	
										Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen		
										Jumlah dokumen RKA - SKPD	1 dokumen	1 dokumen		
										Persentase dokumen RKA dan DPA yang disampaikan dengan baik	100 %	100 %		
									7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Balangan	
									7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan		2 dokumen	Kab. Balangan	
										Jumlah Dokumen laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen		



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan n	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun dengan benar dan tepat waktu	5 Dokumen	5 Dokumen		
										Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %		
										Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	3 dokumen		
										Persentase ketersediaan dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang telah disampaikan dengan baik	100 %	100 %		
									7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	3 dokumen	3 dokumen	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	
					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	12 Bulan	12 Bulan	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan waktu pembayaran gaji dan tunjangan		12 bulan	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan n	K e t a n
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
						Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	100 %		Gaji Dan Tunjangan Pegawai Kecamatan Paringin Selatan dan Kelurahan Batu Piring	14 Bulan	14 Bulan		
						Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Perse n	100 Perse n		Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	14 bulan	14 bulan		
						Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	2 Laporan	2 Laporan		Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan	14 Bulan	14 Bulan		
						Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Daerah	12 Bulan	12 Bulan		Persentase Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %		
						Lancarnya administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan		Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang- undangan	100 %	100 %		
						Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %		Terbayarnya Gaji Dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan		
										Terpenuhinya gaji dan tunjangan karyawan ASN	1 tahun	1 tahun		
									7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan waktu pembayaran honorarium sesuai dengan beban kerja	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	
										Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah waktu pelaksanaan jasa administrasi keuangan yang disediakan	12 bulan	12 bulan		
										Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	100 %	100 %		
										Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan		
									7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Balangan	
										Persentase koordinasi dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100 %	100 %		
					7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang melakukan bimtek		15 Orang / Perjalanan	7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	40 stell	40 stell	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
						Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 Persen	100 Persen		Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapannya yang diadakan	40 stel	40 stel		
						Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan		Jumlah pengadaan pakaian dinas	100 persen	100 persen		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
						Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Perse n	100 Perse n		null		0 null		
						Persentase kegiatan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	100 %	100 %						
						Persentase Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %						
						Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah		12 bulan						
						Waktu Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan						
									7.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah waktu pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Balanga n	
									7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 OP	6 OP	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	
										Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 OK	2 OK		
										Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	15 OP	15 OP		



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t a n
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 OP	1 OP		
										Jumlah waktu pelaksanaan keikutsertaan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan	12 Bulan	12 Bulan		
										null		0 null		
					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
						Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	100 %		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	100 persen	100 persen		
						Cakupan pelaksanaan administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 buah	9 buah		
						Cakupan pelaksanaan administrasi Umum Perangkat Daerah	11.068 buah	11.068 buah		Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	115 Buah	115 Buah		
						Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen		Jumlah waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan		
						Persentase pelaksanaan administrasi umum perkantoran	100 %	100 %		Persentase Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan	100 persen	100 persen		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 unit	6 unit	Kab. Balangan	
										Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan		100 %		
										Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	100 %	100 %		
										Persentasi ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	100 %	100 %		
									7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 jenis	2 jenis	Kab. Balangan	
									7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan, Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	12 bulan	12 bulan	Kab. Balangan	
										Persentase ATK dan Makan Minum yang diadakan	100 persen	100 persen		
										Waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	12 Bulan		
									7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan waktu penyediaan Barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
										Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	12 Bulan	12 Bulan		



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t a n
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	246 lembar	246 lembar		
										Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan		
										Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	14.25 lembar	14.25 lembar		
										Jumlah Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan		
										Persentase Barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	100 persen	100 persen		
										Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan		
									7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	
									7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah		12 bulan	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	
										Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Persen	100 Persen		



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t a h
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	87 Kali	87 Kali		
										Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan	214 OP	214 OP		
										Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	11 kali	30 kali		
										Jumlah waktu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan		
										Persentase perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan	100 persen	100 persen		
										Persentase terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	100 %		
					7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan Barang Milik Daerah	40 Buah	40 Buah	7.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	270000000		0 null	Kab. Balangan	
						Jumlah Waktu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		6 Bulan		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan		1 Unit		
						Meningkatnya kualitas pengadaan barang milik daerah		100 %		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Buah		



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t a n
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
						Persentase Jumlah BMD yang diadakan		100 %		Jumlah mobil Dinas Jabatan		1 Unit		
						Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Perse n	100 Perse n		Meningkatkan Operasional dalam Pelayanan Kepada Masyarakat		1 unit		
						Terpenuhinya Pelayanan Kepada Masyarakat		1 unit		null		0 null		
										Terlaksananya pengadaan kendaraan dengan baik		5 Unit		
									7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaaan kendaraan dinas/operasional yang diadakan		1 Unit	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	
										Meningkatkan Operasional dalam Pelayanan Kepada Masyarakat		1 unit		
										null		0 null		
									7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	45 buah	45 buah	Kab. Balanga n	
										Jumlah mebeleur yang diadakan	9 Buah	10 Buah		
										Jumlah Mebeleur yang tersedia		10 Buah		
									7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer dan perlengkapannya	4 Buah	15 Buah	Kab. Balanga n	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0 buah	0 buah		
										Jumlah Peralatan Kantor	1 Set	1 Set		
									7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan		7 Buah	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		12 bulan	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
						Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen		Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan		
						Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan						
						Persentase Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %						
						Waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Bulan	36 Bulan						
						Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan						



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
						Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan						
									7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
										Jumlah kebutuhan listrik, air dan telpon	12 Bulan	12 Bulan		
										Jumlah waktu yang disediakan untuk jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan		
										Persentase terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	100 %		
										Terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan		
										Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan		
										Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan		
										Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan		



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t a n
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		12 bulan	Kab. Balanga n	
										Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %		
									7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 bulan	12 bulan	Kab. Balanga n	
										Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 Persen	100 Persen		
										Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan publik	12 Bulan	12 Bulan		
										Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan		
										Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan		
										Waktu penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan		
										Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		12 bulan	7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan waktu pemeliharaan kendaraan dinas / operasional		12 bulan	Kab. Balangan	
						Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	32 unit	32 unit		
						"Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	100 Persen	100 Persen		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	14 Unit	14 Unit		
						Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	100 %	100 %		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 Persen	100 Persen		
						Waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	14 buah	14 buah		
						Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan		Persentase kendaraan dinas operasional layak fungsi	100 %	100 %		
						Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan		Persentase kendaraan Dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan	100 persen	100 persen		



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t a n
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
						Waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	12 Bulan						
									7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang berfungsi baik	0 0	10 unit	Kab. Balangan	
										Persentase Peralatan dan Mesin yang layak fungsi	100 %	100 %		
									7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan waktu pemeliharaan gedung kantor		12 bulan	Kab. Balangan	
										Jumlah gedung yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	3 Buah	3 Buah		
										Persentase pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor yang dilaksanakan	100 persen	100 persen		
										Persentase sarana dan prasarana gedung layak fungsi	100 %	100 %		
										Persentase Sarana dan Prasarana Gedung layak fungsi	100 %	100 %		



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung layak fungsi	100 %	100 %	Kab. Balangan	
									7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	12 bulan	1 buah	Kab. Balangan	
										Persentase pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor yang dilaksanakan	100 persen	100 persen		
					7.01.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD				7.01.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Paringin Selatan	0 %	0 %	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa dengan administrasi bidang pemerintahan desa yang baik	1 Desa	1 Desa	Kab. Balangan	
										Jumlah Waktu Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	100 Persen	100 Persen		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Waktu Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	100 Persen	100 Persen	Kab. Balangan	
						Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan	100 %	100 %		Jumlah waktu pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan		
						Persentase pelayanan publik sesuai SOP	75 Persen	75 Persen		Persentase pelaksanaan pelayanan yang dilimpahkan ke kecamatan	70 persen	70 persen		
						Persentase pelayanan publik sesuai SOP	100 %	100 %		Persentase pelaksanaan pelayanan yang dilimpahkan ke kecamatan	100 %	100 %		
						Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP; Persentase Pengaduan Masyarakat Tentang Pelayanan Publik Yang Ditindak Lanjuti	100 %	100 %		Persentase pelaksanaan pelayanan yang dilimpahkan ke kecamatan		100 %		
						Persentase pelayanan umum yang diberikan sesuai SOP	100 %	100 %		Persentase Pelaksanaan Pelayanan Yang Dilimpahkan Ke Kecamatan	100 %	100 %		
						Persentase pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik yang ditindak lanjuti	75 Persen	75 Persen						
						Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 %	100 %						



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
						Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %						
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif	75 %	75 %	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan desa dan kelurahan	100 %	100 %	7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa		1 kegiatan	Kab. Balangan	
		Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif kecamatan awayan	100 %	100 %		Persentase pelaksanaan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 %	100 %		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100 %	1 Kegiatan		
		Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif kecamatan batumandi	100 %	100 %		Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	2 Kegiatan	2 Kegiatan		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	2 kegiatan	2 kegiatan		
		Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif kecamatan lampihong	100 %	100 %		Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	75 Persen	75 Persen		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2 laporan		
		Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif kecamatan paringin selatan	100 %	100 %		Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	100 %	100 %		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 %	100 %		
		Persentase Desa Dengan Pemberdayaan Masyarakat Yang Aktif	100 %	100 %		Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 %	100 %		Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 Persen	100 Persen		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum			
		Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa	100 %	100 %		Tersedianya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	100 %		Jumlah waktu kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	12 Bulan	12 Bulan		
		Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		100 %						Persentase peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyrakat di wilayah kecamatan	100 %	100 %		
		Pesentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif kecamatan Juai	100 %	100 %						Terbayarnya tunjangan Ketua RT	12 bulan	12 bulan		
					7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Evaluasi Kelurahan	100 %	100 %	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Piring	100 Persen	100 Persen	Kab. Balangan	
						Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %		Persentase jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	100 %	100 %		
						Terlaksananya kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di kelurahan		100 %						
									7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Kab. Balangan	
										Persentase jumlah kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan	100 %	100 %		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Keterangan
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Kab. Balangan	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan Awayan	100 %	100 %	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pimpinan di wilayah kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pimpinan di wilayah kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Balangan	
		Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Batumandi	100 %	100 %		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 kegiatan	1 kegiatan		Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pimpinan di wilayah kecamatan		6 Kegiatan		
		Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Juai	100 %	100 %		Jumlah waktu koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1 kegiatan	1 kegiatan		Jumlah Pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan		
		Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Paringin	100 %	100 %		Jumlah waktu koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	12 Bulan	12 Bulan		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 kali	1 kali		
		Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor	100 %	100 %		Persentase koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %		Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor	100 %	100 %		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
		Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah		100 %		Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100 %	100 %		terlaksananya K3	100 persen	100 persen		
						Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %						
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraa n administrasi umum pemerintahan desa	100 %	100 %	7.01.05.2.01 Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Perse n	100 Perse n	7.01.05.2.01.07 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		1 dokumen	Kab. Balanga n	
		Persentase penyelenggaraa n administrasi umum pemerintahan desa		100 %		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	100 %	100 %		Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan	4 keg	4 keg		
		Persentase penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum kecamatan Awayan	100 %	100 %		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	100 Perse n	100 Perse n		Jumlah Kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen		



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan n	K e t a n
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
		Persentase penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum kecamatan Batumandi	100 %	100 %		Persentase pelaksanaan semua urusan pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	100 %	2 Kegiatan		
		Persentase penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum kecamatan Juai	100 %	100 %						Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	5 kegiatan	5 kegiatan		
		Persentase penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum kecamatan Paringin	100 %	100 %						Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	5 Kegiatan	5 Kegiatan		
		Persentase penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum kecamatan paringin selatan	100 %	100 %						Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	6 Kegiatan	6 Kegiatan		
		Persentase penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum kecamatan Tebing Tinggi	100 %	100 %						Kegiatan MTQ yang diikuti	1 kali	1 kali		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum			
										Peringatan Hari Besar Keagamaan	1 kali	1 kali		
										Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI	1 kali	1 kali		
									7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	Kab. Balangan	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik kecamatan Batumandi	100 %	100 %	7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Peserta Kegiatan Musrenbang Kecamatan	100 Persen	100 Persen	7.01.06.2.01.02 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Bulan	7 Bulan	Kab. Balangan	
		Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik kecamatan Juai	100 %	100 %		Jumlah Waktu Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Bulan	12 Bulan		Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen		
		Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik kecamatan Paringin	100 %	100 %		Persentase desa dengan administarsi pencatatan pengelolaan keuangan desa sesuai aturan	75 Persen	75 Persen		Jumlah RT yang menyampaikan laporan	558 Orang	558 Orang		
		Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik kecamatan Tebing Tinggi	100 %	100 %		Persentase desa dengan administarsi pencatatan pengelolaan keuangan desa sesuai aturan	100 %	100 %						



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan n	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
		Persentase Desa Dengan Administrasi Pencatatan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Aturan; Persentase Desa Yang Menyampaikan Usulan Musyawarah Pembangunan Desa Sesuai Aturan		100 %		Persentase Desa Dengan Administrasi Pencatatan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Aturan; Persentase Desa Yang Menyampaikan Usulan Musyawarah Pembangunan Desa Sesuai Aturan	100 %	100 %						
		Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa	100 %	100 %		Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa	100 %	100 %						
		Persentase usulan musrenbang yang di akomodir; Persentase jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100 Persen	100 Persen		Persentase pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %						
		Pesentase desa dengan administasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik kecamatan Awayan	100 %	100 %		Persentase usulan musrenbang yang di akomodir; Persentase RTPersentase jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100 %	100 %						



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang di monitor dan di Evaluasi Pengelolaan Keuangannya	23 Desa	23 Desa	Kab. Balangan	
										Jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	12 bulan	12 bulan		
										Jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	18 desa	18 desa		
										Jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100 Persen	100 Persen		
										Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		24 Dokumen		
										Persentase desa dengan administarsi pencatatan pengelolaan keuangan desa lengkap	100 %	100 %		
										Persentase desa dengan administarsi pencatatan pengelolaan keuangan desa lengkap		100 %		
									7.01.06.2.01.04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penerapan Peraturan Perundang undangan	100 Persen	100 Persen	Kab. Balangan	
									7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa		100 %	Kab. Balangan	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									7.01.06.2.01.13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		1 Dokumen	Kab. Balanga n	
										Jumlah kegiatan MUSRENBANG Kecamatan yang dilaksanakan	1 kali	1 kali		
										Jumlah Kegiatan musyawarah rencana pembangunan	1 keg	1 keg		
										Jumlah Musrenbang tingkat kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan		
										Jumlah Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
										Jumlah pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan dalam satu tahun	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
										Persentase desa yang menyampaikan usulan musyawarah pembangunan desa tepat waktu	100 %	100 %		
										Persentase desa yang menyampaikan usulan musyawarah pembangunan desa tepat waktu		100 %		
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	64,60 Nilai	64,60 Nilai	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100 %	100 %	8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	Semua Kab/Kot a Kab. Balanga n	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									8.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Balangan	
					8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									8.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan keuangan akhir tahun sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %	Kab. Balangan	
									8.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan keuangan semesteran (laporan)	100 %	100 %	Kab. Balangan	
					8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	8.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	17 stell	75 stell	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									8.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					
									8.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparat yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	23 OP	10 OP	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bu;lan	12 bu;lan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah komputer dan perlengkapan komputer yang diadakan, jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	1 paket	5 paket	Kab. Balangan	
									8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bu;lan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									8.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	12 bu;lan	12 bu;lan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
					8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan	8.01.01.2.08.01 Penyediaan jasa surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan jasa surat menyurat (bulan)	12 bu;lan	12 bu;lan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Balangan	
									8.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu perbaikan peralatan kerja (bulan)	12 bulan	12 bulan	Kab. Balangan	
									8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	8.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah bulan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional	12 bu;lan	12 bu;lan	Kab. Balanga n	
									8.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bu;lan	12 bu;lan	Kab. Balanga n	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peran Aktif Kelompok Masyarakat	100 %	100 %	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Dokume n	1 Dokume n	8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Balanga n	
										Jumlah koordinasi gugus tugas GNRM yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANG AN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Parpol yang aktif	100 %	100 %	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih	Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Dokume n	1 Dokume n	8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Pendidikan Politik	1 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Balanga n	



N O	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	K e t .
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					an Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik									
									8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah kegiatan Diskusi Politik dalam merumuskan kebijakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Balanga n	
									8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	Jumlah laporan hasil verifikasi bantuan parpol	9 Laporan	9 Laporan	Kab. Balanga n	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									Politik di Daerah					
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif	100 %	100 %	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 Dokumen	1 Dokumen	8.01.04.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase ormas yang direkomendasikan untuk mendapatkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar)	100 %	100 %	Kab. Balangan	
									8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas yang dibina melalui monev	5 ormas	5 ormas	Kab. Balangan	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Ormas Keagamaan yang Aktif	100 %	100 %	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Dokumen	1 Dokumen	8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah fasilitasi pelaksanaan P4GN (koordinasi dan atau pembinaan)	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan FKUB	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Balangan	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAA N NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik Sosial yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Dokume n	1 Dokume n	8.01.06.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Fasilitas FKDM	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Kab. Balangan	
										Persentase Daerah Rawan Potensi konflik yang terawasi	100 persen	100 persen		
									8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah rapat koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Kab. Balangan	



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah koordinasi deteksi dini konflik sosial	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Kab. Balangan	
									8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Forkopimda		7 Kegiatan	Kab. Balangan	



BAB IV
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berisikan perubahan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan/sub kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi berikut;

Tabel. 4.1

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	265.073.181.589	299.432.650.252	
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	265.073.181.589	299.432.650.252	
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	265.073.181.589	299.432.650.252	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	199.081.569.339	209.551.263.539	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.338.000	300.338.000	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.644.000	23.644.000	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.694.000	276.694.000	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	195.212.506.139	199.025.906.139	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	194.485.639.739	197.600.639.739	
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	726.866.400	1.425.266.400	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	829.940.000	
1.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	829.940.000	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	695.559.200	2.907.359.200	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42.300.000	107.100.000	
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	653.259.200	2.800.259.200	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.157.382.800	3.364.280.000	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.015.000	50.515.000	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	992.220.000	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.600.000	4.600.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	291.947.800	480.000.000	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.280.000	35.280.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	793.540.000	1.801.665.000	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	460.000.000	
1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	460.000.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.086.915.200	1.161.097.200	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	217.916.200	273.598.200	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	868.999.000	887.499.000	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	793.868.000	1.502.343.000	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	191.430.000	206.430.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	280.373.500	442.248.500	
1.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	322.064.500	325.664.500	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	528.000.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	64.989.842.250	87.715.306.713	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	28.604.561.450	42.182.549.869	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	500.350.000	900.350.000	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	747.050.000	4.977.050.000	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.706.750.000	5.743.174.000	



Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan TA. 2022

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	221.350.000	1.131.350.000	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	0	20.000.000	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	101.400.000	101.400.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	581.500.000	581.500.000	
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0	1.935.000.000	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	28.400.000	328.350.000	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	56.800.000	120.900.000	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	435.300.000	440.300.000	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	10.901.100.000	12.636.812.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	13.324.561.450	13.266.363.869	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	14.601.442.000	19.500.463.244	
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.050.000.000	1.050.000.000	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0	652.463.000	
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	0	603.400.000	
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	105.545.000	
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	209.000.000	
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	75.000.000	440.750.000	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	1.785.700.000	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	4.084.350.000	5.605.100.000	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0	51.310.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	93.650.000	152.510.000	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	24.400.000	87.200.000	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	311.392.000	321.392.000	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	4.627.800.000	5.047.400.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	4.334.850.000	3.388.693.244	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	16.500.338.800	21.930.871.600	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.060.000.000	2.919.040.000	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0	1.763.580.000	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	175.000.000	845.365.000	
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	18.550.000	18.550.000	
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	24.311.300	24.311.300	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	72.300.000	223.800.000	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	113.095.650	435.575.650	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	5.348.099.850	5.492.099.850	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.129.200.000	1.190.722.000	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	48.782.000	365.137.800	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	8.511.000.000	8.652.690.000	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.283.500.000	4.101.422.000	
1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	600.000.000	600.000.000	
1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	200.000.000	200.000.000	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	852.000.000	866.412.000	
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	853.200.000	1.000.800.000	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.778.300.000	1.434.210.000	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	101.000.000	152.750.000	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	101.000.000	152.750.000	
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	3.740.000	3.740.000	
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	3.740.000	3.740.000	
1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	28.400.000	28.400.000	
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal	65.120.000	116.870.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Pendidikan Dasar			
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	695.770.000	1.808.330.000	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	695.770.000	1.808.330.000	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	238.070.000	1.350.630.000	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	457.700.000	457.700.000	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	205.000.000	205.000.000	
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	205.000.000	205.000.000	
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	205.000.000	205.000.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	177.877.430.756	268.374.982.393	
1.02.2.14.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	177.877.430.756	268.374.982.393	
1.02.2.14.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	121.131.741.700	176.864.444.860	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	53.108.113.456	53.331.493.456	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	193.377.850	193.377.850	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99.516.600	99.516.600	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	93.861.250	93.861.250	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51.032.135.596	51.032.135.596	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50.862.678.196	50.862.678.196	
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	169.457.400	169.457.400	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	424.320.000	424.320.000	
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	424.320.000	424.320.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	406.048.100	406.048.100	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.297.000	8.297.000	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.000.000	79.000.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.387.100	38.387.100	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.900.000	18.900.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	261.464.000	261.464.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	461.781.910	461.781.910	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	81.760.000	81.760.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	249.099.960	249.099.960	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130.921.950	130.921.950	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	590.450.000	813.830.000	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182.980.000	182.980.000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	270.000.000	493.380.000	
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	137.470.000	137.470.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	52.854.642.594	106.868.798.144	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.731.162.914	27.919.696.214	
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	220.800.000	220.800.000	
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	0	5.200.000.000	
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.219.469.900	4.906.379.900	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.954.939.166	9.781.024.166	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	3.868.937.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	373.994.250	1.899.568.471	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	611.909.898	1.540.571.677	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13.490.000	13.490.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	285.900.000	299.500.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.659.700	83.755.000	
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	105.670.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.045.175.500	78.200.013.750	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	64.893.000	723.708.950	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	37.109.600	279.659.450	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	25.384.950	176.584.900	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	40.767.550	159.317.550	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	76.240.000	386.085.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	74.866.700	541.319.150	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	86.330.400	267.798.400	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	30.294.300	354.744.300	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	30.409.100	367.209.100	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	46.260.800	191.515.800	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	149.254.950	326.362.950	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	138.799.900	231.649.900	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	1.837.240.750	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	75.333.150	172.233.150	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	241.269.800	1.962.407.200	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Masyarakat			
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	52.714.700	288.623.400	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	132.879.900	810.981.900	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.483.743.650	6.424.109.650	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	245.961.400	839.861.400	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	153.097.350	1.047.518.350	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	27.960.439.400	36.185.219.600	
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	31.861.050	49.263.050	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	81.799.750	81.799.750	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	13.807.806.000	22.899.397.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	977.658.100	1.595.403.100	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	54.354.180	54.354.180	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	54.354.180	54.354.180	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.950.000	694.734.000	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	23.950.000	694.734.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	14.945.372.850	15.965.197.850	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	14.543.600.000	15.447.625.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	14.543.600.000	15.447.625.000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	401.772.850	517.572.850	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	401.772.850	517.572.850	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	36.119.750	43.821.710	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri	36.119.750	43.821.710	



Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan TA. 2022

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Rumah Tangga			
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	36.119.750	43.821.710	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	187.493.050	655.133.700	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	133.720.000	340.337.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	133.720.000	340.337.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.773.050	314.796.700	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	53.773.050	314.796.700	
1.02.2.14.0.00.01.0001	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN	50.000.000.000	84.764.848.477	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.000.000.000	84.764.848.477	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	50.000.000.000	84.764.848.477	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	50.000.000.000	84.764.848.477	
1.02.2.14.0.00.01.0002	PUSKESMAS PARINGIN	735.785.950	735.785.950	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	735.785.950	735.785.950	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	735.785.950	735.785.950	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	735.785.950	735.785.950	
1.02.2.14.0.00.01.0003	PUSKESMAS PARINGIN SELATAN	724.671.600	724.671.600	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	724.671.600	724.671.600	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	724.671.600	724.671.600	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	724.671.600	724.671.600	
1.02.2.14.0.00.01.0004	PUSKESMAS AWAYAN	739.365.058	739.365.058	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	739.365.058	739.365.058	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	MASYARAKAT			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	739.365.058	739.365.058	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	739.365.058	739.365.058	
1.02.2.14.0.00.01.0005	PUSKESMAS TEBING TINGGI	413.167.200	413.167.200	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	413.167.200	413.167.200	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	413.167.200	413.167.200	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	413.167.200	413.167.200	
1.02.2.14.0.00.01.0006	PUSKESMAS LOKBATU	249.685.116	249.685.116	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	249.685.116	249.685.116	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	249.685.116	249.685.116	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	249.685.116	249.685.116	
1.02.2.14.0.00.01.0007	PUSKESMAS BATUMANDI	661.812.564	661.812.564	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	661.812.564	661.812.564	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	661.812.564	661.812.564	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	661.812.564	661.812.564	
1.02.2.14.0.00.01.0008	PUSKESMAS TANAH HABANG	228.925.200	228.925.200	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	228.925.200	228.925.200	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	228.925.200	228.925.200	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	228.925.200	228.925.200	
1.02.2.14.0.00.01.0009	PUSKESMAS LAMPIHONG	724.056.600	724.056.600	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	724.056.600	724.056.600	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	724.056.600	724.056.600	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	724.056.600	724.056.600	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.2.14.0.00.01.0010	PUSKESMAS JUAI	832.350.868	832.350.868	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	832.350.868	832.350.868	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	832.350.868	832.350.868	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	832.350.868	832.350.868	
1.02.2.14.0.00.01.0011	PUSKESMAS PIRSUS	146.573.300	146.573.300	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	146.573.300	146.573.300	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	146.573.300	146.573.300	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	146.573.300	146.573.300	
1.02.2.14.0.00.01.0012	PUSKESMAS HALONG	1.003.400.400	1.003.400.400	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.003.400.400	1.003.400.400	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.003.400.400	1.003.400.400	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.003.400.400	1.003.400.400	
1.02.2.14.0.00.01.0013	PUSKESMAS UREN	285.895.200	285.895.200	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	285.895.200	285.895.200	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	285.895.200	285.895.200	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	285.895.200	285.895.200	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	158.082.331.368	291.580.255.347	
1.03.1.04.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	158.082.331.368	291.580.255.347	
1.03.1.04.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	158.082.331.368	291.580.255.347	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.426.819.119	25.091.080.815	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.360.000	32.860.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.360.000	32.860.000	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.080.496.219	8.102.557.115	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.946.112.363	7.946.112.363	
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.003.856	5.944.752	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	129.380.000	150.500.000	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	405.713.000	936.520.000	
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	112.500.000	390.883.000	
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	293.213.000	545.637.000	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.336.411.600	3.517.648.400	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.450.000	1.204.500.000	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.000.000	93.225.000	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	288.911.600	379.652.400	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	19.400.000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	983.050.000	1.820.871.000	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	9.554.885.000	
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	3.681.000.000	
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	0	5.783.885.000	
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0	90.000.000	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	945.678.800	1.175.543.300	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	610.800.000	562.500.000	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	334.878.800	613.043.300	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	633.159.500	1.771.067.000	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	402.790.000	636.379.500	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.500.000	113.700.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	178.869.500	1.020.987.500	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	10.133.145.000	12.233.145.000	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.098.105.000	10.018.635.000	
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	100.000.000	87.520.000	
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	594.720.000	569.400.000	
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	6.818.035.000	8.361.910.600	
1.03.02.2.01.11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	0	58.376.500	
1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	124.000.000	271.942.900	
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	0	74.800.000	
1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	461.350.000	594.685.000	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.035.040.000	2.214.510.000	
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	550.000.000	751.970.000	
1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	300.000.000	282.600.000	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	985.700.000	987.680.000	
1.03.02.2.02.23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	199.340.000	192.260.000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.700.000.000	12.033.498.000	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.700.000.000	12.033.498.000	
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.700.000.000	6.762.380.000	
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	0	5.271.118.000	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.429.396.000	10.672.035.000	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air	2.429.396.000	10.672.035.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2.228.956.000	10.470.135.000	
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	200.440.000	201.900.000	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	16.115.850.912	23.484.858.215	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	16.115.850.912	23.484.858.215	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	9.095.921.000	14.049.083.943	
1.03.08.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	140.807.912	296.810.272	
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahtsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.879.122.000	9.138.964.000	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.631.072.000	12.680.894.000	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.631.072.000	12.680.894.000	
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1.631.072.000	12.680.894.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	113.151.328.337	190.813.024.317	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	113.151.328.337	190.813.024.317	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	0	1.318.391.000	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	89.203.890.033	129.446.398.033	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	5.545.459.000	35.583.497.020	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	850.200.000	982.698.960	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	17.201.779.304	21.941.229.304	
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	0	1.190.810.000	
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	350.000.000	350.000.000	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	500.000.000	2.700.000.000	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	250.003.928	350.003.928	
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	250.003.928	350.003.928	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	249.996.072	2.349.996.072	
1.03.11.2.03.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	28.011.072	88.011.072	
1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	221.985.000	2.261.985.000	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	994.720.000	1.871.720.000	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	394.720.000	544.720.000	
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	394.720.000	544.720.000	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	377.000.000	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	200.000.000	377.000.000	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	950.000.000	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	400.000.000	950.000.000	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	49.756.284.417	55.826.161.567	
1.03.1.04.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	49.756.284.417	55.826.161.567	
1.03.1.04.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	49.756.284.417	55.826.161.567	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	801.006.000	788.886.000	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	156.030.000	164.510.000	
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	156.030.000	164.510.000	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	644.976.000	624.376.000	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	335.699.000	314.599.000	
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	309.277.000	309.777.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.390.102.450	1.535.324.450	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan	209.658.000	220.218.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	209.658.000	220.218.000	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.180.444.450	1.315.106.450	
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1.180.444.450	1.315.106.450	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.267.609.000	2.268.109.000	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2.267.609.000	2.268.109.000	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2.267.609.000	2.268.109.000	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	45.297.566.967	51.233.842.117	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	45.297.566.967	51.233.842.117	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	127.685.000	131.525.000	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	45.169.881.967	51.102.317.117	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	18.843.096.386	26.199.797.054	
1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.216.106.897	11.980.266.897	
1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.216.106.897	11.980.266.897	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.492.385.287	5.977.714.477	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	152.121.112	152.121.112	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	152.121.112	152.121.112	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.810.835.347	3.353.991.347	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.765.092.787	3.308.248.787	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.600.000	9.600.000	



Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan TA. 2022

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36.142.560	36.142.560	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96.150.000	226.150.000	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	11.700.000	11.700.000	
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	84.450.000	214.450.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	270.623.600	526.907.490	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.949.400	13.949.400	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	167.045.250	236.045.250	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.930.950	34.214.840	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.850.000	21.850.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.848.000	220.848.000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	225.000.000	
1.05.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	225.000.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	487.311.572	487.311.572	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	274.363.492	274.363.492	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.500.000	152.500.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.448.080	60.448.080	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	675.343.656	1.006.232.956	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	272.022.000	375.911.300	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.250.000	14.250.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	227.000.000	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	389.071.656	389.071.656	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.133.422.610	5.304.613.420	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	209.999.850	898.480.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	109.999.850	97.960.000	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	100.000.000	800.520.000	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.642.826.120	4.125.536.780	
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	343.751.350	418.557.510	
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	89.999.700	1.740.523.700	
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	168.427.470	248.427.470	
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	2.040.647.600	1.718.028.100	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	280.596.640	280.596.640	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	280.596.640	280.596.640	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	590.299.000	697.939.000	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	573.369.000	573.369.000	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	573.369.000	573.369.000	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	16.930.000	124.570.000	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	16.930.000	124.570.000	
1.05.0.00.0.00.03.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.626.989.489	14.219.530.157	
1.05.0.00.0.00.03.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.626.989.489	14.219.530.157	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.562.164.489	7.525.623.657	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	218.246.200	220.966.200	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.755.000	150.755.000	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.671.200	20.671.200	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.820.000	49.540.000	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.929.856.889	5.119.846.057	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.929.856.889	5.119.846.057	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	699.387.900	923.487.900	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	291.500.000	
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	573.797.900	537.277.900	
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	125.590.000	94.710.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	339.387.700	429.087.700	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.600.600	54.920.600	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.547.100	19.547.100	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.640.000	8.640.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257.600.000	295.980.000	
1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	50.000.000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.466.000	415.416.000	
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	200.000.000	
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.466.000	215.416.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.819.800	109.819.800	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.819.800	109.819.800	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.000.000	307.000.000	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	251.300.000	251.300.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.700.000	5.700.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	50.000.000	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.064.825.000	6.693.906.500	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.705.385.000	6.334.466.500	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	3.218.246.900	5.937.328.400	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	284.728.500	284.728.500	
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	202.409.600	112.409.600	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	359.440.000	359.440.000	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	56.340.000	56.340.000	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	303.100.000	303.100.000	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	16.444.633.307	16.828.873.307	
1.06.2.08.2.13.01.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16.444.633.307	16.828.873.307	
1.06.2.08.2.13.01.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16.444.633.307	16.828.873.307	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.342.439.204	10.726.679.204	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.026.000	136.466.000	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.766.000	80.486.000	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.260.000	55.980.000	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.366.011.604	8.366.011.604	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.366.011.604	8.366.011.604	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	194.200.000	194.200.000	
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	96.200.000	96.200.000	
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	98.000.000	98.000.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	434.611.400	434.611.400	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.727.800	15.727.800	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.550.000	46.550.000	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.817.300	34.817.300	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.600.000	9.600.000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	327.916.300	327.916.300	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	887.522.500	1.222.322.500	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	900.000	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.400.000	350.400.000	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	536.222.500	871.022.500	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373.067.700	373.067.700	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	373.067.700	373.067.700	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	483.725.000	483.725.000	
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	101.590.000	101.590.000	
1.06.02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	92.000.000	92.000.000	
1.06.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	9.590.000	9.590.000	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.485.000	5.485.000	
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5.485.000	5.485.000	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	376.650.000	376.650.000	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	52.300.000	52.300.000	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	79.850.000	79.850.000	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	230.850.000	230.850.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	13.650.000	13.650.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	900.915.500	900.915.500	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	900.915.500	900.915.500	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Perumahan	203.425.000	203.425.000	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	163.660.600	163.660.600	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	402.000.000	402.000.000	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	33.380.000	33.380.000	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	98.449.900	98.449.900	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4.412.192.603	4.412.192.603	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.412.192.603	4.412.192.603	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	168.140.000	168.140.000	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	4.090.043.003	4.090.043.003	
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	154.009.600	154.009.600	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	270.361.000	270.361.000	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	170.361.000	170.361.000	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	170.361.000	170.361.000	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	100.000.000	100.000.000	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	35.000.000	35.000.000	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	35.000.000	35.000.000	
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	35.000.000	35.000.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.453.869.600	3.310.797.600	
2.18.2.07.3.32.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	3.453.869.600	3.310.797.600	
2.18.2.07.3.32.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	3.453.869.600	3.310.797.600	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	121.422.000	120.702.000	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	121.422.000	120.702.000	
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	121.422.000	120.702.000	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.743.645.100	2.600.573.100	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.566.975.100	2.423.903.100	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	321.668.750	715.310.200	
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	225.000.000	368.072.000	
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	2.020.306.350	1.340.520.900	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	92.970.000	92.970.000	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	92.970.000	92.970.000	
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	83.700.000	83.700.000	
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	83.700.000	83.700.000	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	222.122.500	222.842.500	
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	222.122.500	222.842.500	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	124.532.500	127.992.700	
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	38.195.000	36.714.800	
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	59.395.000	58.135.000	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	366.680.000	366.680.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	110.620.000	110.620.000	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	110.620.000	110.620.000	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	256.060.000	256.060.000	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	216.850.000	216.850.000	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	39.210.000	39.210.000	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.647.974.100	1.647.974.100	
1.06.2.08.2.13.01.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.647.974.100	1.647.974.100	
1.06.2.08.2.13.01.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.647.974.100	1.647.974.100	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.004.335.000	1.004.335.000	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	87.470.000	87.470.000	
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	13.240.000	13.240.000	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	74.230.000	74.230.000	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	916.865.000	916.865.000	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	16.865.000	16.865.000	
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik,	900.000.000	900.000.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Hukum, Sosial dan Ekonomi			
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	65.103.000	65.103.000	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	41.560.000	41.560.000	
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	41.560.000	41.560.000	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	23.543.000	23.543.000	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	23.543.000	23.543.000	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	173.937.300	173.937.300	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	109.087.300	109.087.300	
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	109.087.300	109.087.300	
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	64.850.000	64.850.000	
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	64.850.000	64.850.000	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	94.445.000	94.445.000	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	94.445.000	94.445.000	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	62.915.000	62.915.000	
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	31.530.000	31.530.000	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	207.540.000	207.540.000	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan	95.820.000	95.820.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kabupaten/Kota			
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	73.215.000	73.215.000	
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	22.605.000	22.605.000	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	111.720.000	111.720.000	
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	19.395.000	19.395.000	
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.280.000	53.280.000	
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.360.000	24.360.000	
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.685.000	14.685.000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	102.613.800	102.613.800	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	16.820.000	16.820.000	
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	16.820.000	16.820.000	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.773.900	44.773.900	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.773.900	44.773.900	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.019.900	41.019.900	
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia	41.019.900	41.019.900	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.797.097.650	4.748.057.000	
2.09.3.27.3.25.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.797.097.650	4.748.057.000	
2.09.3.27.3.25.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.797.097.650	4.748.057.000	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	252.115.100	729.587.050	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	252.115.100	729.587.050	
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	183.560.250	366.460.250	
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	68.554.850	363.126.800	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.228.087.750	3.697.775.450	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	282.550.100	367.644.650	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	95.439.800	95.439.800	
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	106.171.200	92.673.050	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	37.382.250	123.622.250	
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	43.556.850	55.909.550	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1.721.139.850	1.201.433.000	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.721.139.850	1.201.433.000	
2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	158.509.800	250.095.650	
2.09.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	158.509.800	250.095.650	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.065.888.000	1.878.602.150	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi	57.445.050	71.193.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Pangan per Kapita per Tahun			
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.008.442.950	1.807.409.150	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	234.639.800	238.439.800	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	107.494.800	111.294.800	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	107.494.800	111.294.800	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	127.145.000	127.145.000	
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	127.145.000	127.145.000	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	82.255.000	82.254.700	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	82.255.000	82.254.700	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	82.255.000	82.254.700	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	268.250.000	268.250.000	
2.10.2.11.0.00.01.0000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	268.250.000	268.250.000	
2.10.2.11.0.00.01.0000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	268.250.000	268.250.000	
2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	12.200.000	12.200.000	
2.10.02.2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.200.000	12.200.000	
2.10.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	12.200.000	12.200.000	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	35.003.000	35.003.000	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.003.000	35.003.000	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.003.000	35.003.000	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	3.600.000	3.600.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.600.000	3.600.000	
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	3.600.000	3.600.000	
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	200.460.000	200.460.000	
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	200.460.000	200.460.000	
2.10.09.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	51.480.000	51.480.000	
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	148.980.000	148.980.000	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	16.987.000	16.987.000	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	16.987.000	16.987.000	
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	16.987.000	16.987.000	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	13.431.767.294	18.821.381.355	
2.10.2.11.0.00.01.0000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	13.431.767.294	18.821.381.355	
2.10.2.11.0.00.01.0000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	13.431.767.294	18.821.381.355	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.289.576.094	8.568.876.355	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.478.900	95.478.900	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.180.000	66.180.000	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.298.900	29.298.900	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.548.607.594	6.250.527.855	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.472.257.294	6.174.177.555	
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55.202.100	55.202.100	
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21.148.200	21.148.200	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	104.500.000	104.500.000	
2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	104.500.000	104.500.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.042.166.000	1.522.648.000	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.500.000	50.500.000	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.915.000	15.915.000	
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.400.000	8.400.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	967.351.000	1.447.833.000	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.155.600	303.053.600	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.200.000	19.200.000	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.998.500	119.998.500	
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.300.000	15.300.000	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	103.657.100	148.555.100	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.668.000	292.668.000	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.540.000	237.540.000	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.128.000	55.128.000	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	215.510.000	215.510.000	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	215.510.000	215.510.000	
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	215.510.000	215.510.000	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	777.444.000	777.443.650	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	677.444.000	677.443.650	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	150.000.000	124.999.800	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	50.000.000	74.999.900	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	477.444.000	477.443.950	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	
2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	50.000.000	50.000.000	
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	50.000.000	50.000.000	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.918.862.900	4.144.429.300	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.918.862.900	4.144.429.300	
2.11.04.2.01.03	Pengelolaan Kebun Raya	314.709.000	314.708.800	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.604.153.900	3.829.720.500	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	73.960.000	73.960.000	
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	38.280.000	38.280.000	
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	38.280.000	38.280.000	
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.680.000	35.680.000	
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	35.680.000	35.680.000	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	37.061.300	37.061.050	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	37.061.300	37.061.050	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	37.061.300	37.061.050	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	25.000.000	25.000.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	25.000.000	25.000.000	
2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	25.000.000	25.000.000	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	25.645.000	25.645.000	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.645.000	25.645.000	
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	25.645.000	25.645.000	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	119.340.000	119.340.000	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	119.340.000	119.340.000	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	119.340.000	119.340.000	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	40.900.000	40.900.000	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	40.900.000	40.900.000	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	40.900.000	40.900.000	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.908.468.000	4.793.216.000	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	3.908.468.000	4.793.216.000	
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	648.150.000	655.650.000	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.260.318.000	3.823.066.000	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0	314.500.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.123.754.990	6.505.913.040	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.123.754.990	6.505.913.040	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.123.754.990	6.505.913.040	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.791.287.640	4.698.245.690	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.739.950	55.739.950	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.739.950	55.739.950	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.889.245.490	3.372.646.167	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.886.749.690	3.370.150.367	
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.495.800	2.495.800	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000	
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000	40.000.000	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	362.148.650	754.906.023	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.907.300	12.907.300	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	176.849.000	176.849.000	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.180.350	16.180.350	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.212.000	353.306.523	
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	195.662.850	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.307.950	176.107.950	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.499.850	106.499.850	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.808.100	69.608.100	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	276.845.600	298.845.600	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	186.965.000	186.965.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.400.000	15.400.000	
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.480.600	96.480.600	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	565.138.400	595.938.400	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	481.292.800	512.092.800	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	438.149.800	468.949.800	
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	43.143.000	43.143.000	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	83.845.600	83.845.600	
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	83.845.600	83.845.600	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	345.303.600	376.103.600	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	231.464.600	262.264.600	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	103.152.350	103.152.350	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	128.312.250	159.112.250	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	113.839.000	113.839.000	
2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	113.839.000	113.839.000	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	402.345.450	815.945.450	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	68.245.900	77.045.900	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	32.380.000	41.180.000	
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	35.865.900	35.865.900	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	334.099.550	738.899.550	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	261.649.700	666.449.700	
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	72.449.850	72.449.850	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL	19.679.900	19.679.900	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	KEPENDUDUKAN			
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	19.679.900	19.679.900	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	19.679.900	19.679.900	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.647.200.000	10.847.200.000	
1.06.2.08.2.13.01.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.647.200.000	10.847.200.000	
1.06.2.08.2.13.01.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.647.200.000	10.847.200.000	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	112.280.300	2.312.280.300	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	112.280.300	2.312.280.300	
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	0	2.200.000.000	
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	112.280.300	112.280.300	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.327.316.000	2.327.316.000	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.327.316.000	2.327.316.000	
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.552.320.000	1.552.320.000	
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	27.705.000	27.705.000	
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	157.505.000	157.505.000	
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	414.860.000	414.860.000	
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	43.550.000	43.550.000	
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	54.770.000	54.770.000	
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	76.606.000	76.606.000	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	6.207.603.700	6.207.603.700	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang	6.207.603.700	6.207.603.700	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	299.000.000	299.000.000	
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	4.253.380.000	4.253.380.000	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	127.000.000	127.000.000	
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.528.223.700	1.528.223.700	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	778.498.000	4.247.631.600	
1.02.2.14.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	778.498.000	4.247.631.600	
1.02.2.14.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	778.498.000	4.247.631.600	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	129.720.000	1.101.085.000	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	95.970.000	95.970.000	
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	29.980.000	29.980.000	
2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	34.870.000	34.870.000	
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	31.120.000	31.120.000	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	33.750.000	1.005.115.000	
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	7.800.000	7.800.000	
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	25.950.000	25.950.000	
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan	0	971.365.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Pelaporan Program KKBPK			
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	467.180.000	2.572.028.600	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	197.120.000	399.618.200	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12.320.000	12.320.000	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	184.800.000	387.298.200	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	15.890.000	914.910.000	
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	5.970.000	5.970.000	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	9.920.000	908.940.000	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	212.600.000	1.215.930.400	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	54.610.000	67.655.500	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	72.950.000	72.950.000	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0	945.780.000	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	49.570.000	49.570.000	
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	35.470.000	35.470.000	
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	0	44.504.900	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	41.570.000	41.570.000	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di	41.570.000	41.570.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kampung KB			
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	181.598.000	574.518.000	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	89.990.000	89.990.000	
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	31.320.000	31.320.000	
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	22.000.000	22.000.000	
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	36.670.000	36.670.000	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	91.608.000	484.528.000	
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	27.908.000	420.828.000	
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	63.700.000	63.700.000	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	10.590.985.120	12.611.393.033	
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	10.590.985.120	12.611.393.033	
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	10.590.985.120	12.611.393.033	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.209.491.070	5.343.040.783	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.879.850	106.199.850	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	87.179.850	103.499.850	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.700.000	2.700.000	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.273.201.270	3.913.784.533	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.216.315.320	3.839.618.583	
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56.885.950	74.165.950	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	138.846.000	191.046.000	
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	138.846.000	191.046.000	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	313.655.050	457.180.300	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.645.100	49.299.900	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.000.000	9.000.000	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.742.300	23.572.750	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000	4.800.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.467.650	370.507.650	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.991.900	282.045.100	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.550.000	10.000.000	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.400.000	127.825.600	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.041.900	144.219.500	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.917.000	392.785.000	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	195.397.000	262.625.000	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.520.000	130.160.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6.381.494.050	7.268.352.250	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.543.775.100	5.187.309.200	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	233.000.000	724.290.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4.310.775.100	4.463.019.200	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	94.690.000	53.440.000	
2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	94.690.000	53.440.000	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	145.890.000	156.950.000	
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	145.890.000	156.950.000	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	559.549.450	540.389.450	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	253.350.000	253.350.000	
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20.000.000	20.000.000	
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	135.299.450	138.639.450	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	37.500.000	0	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	113.400.000	128.400.000	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	683.944.600	967.474.600	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	640.344.850	938.584.850	
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	43.599.750	28.889.750	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	6.299.900	0	
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	6.299.900	0	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	347.345.000	362.789.000	
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	347.345.000	362.789.000	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	13.100.096.343	18.021.229.592	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	13.100.096.343	18.021.229.592	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	13.100.096.343	18.021.229.592	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.716.159.559	6.033.879.300	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.003.400	66.003.400	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.820.000	54.820.000	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.183.400	11.183.400	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.483.011.509	3.535.886.000	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.483.011.509	3.535.886.000	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	245.000.000	336.000.000	
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	21.000.000	
2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	245.000.000	315.000.000	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	505.707.350	1.124.294.900	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.897.350	13.897.350	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.825.000	38.432.550	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.800.000	13.800.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	458.185.000	1.058.165.000	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	169.982.300	
2.16.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	169.982.300	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	346.338.300	473.020.700	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.400.000	35.200.000	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.600.000	103.670.000	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	226.338.300	334.150.700	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.099.000	328.692.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.099.000	328.692.000	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.213.598.924	6.221.993.932	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.213.598.924	6.221.993.932	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	70.000.700	105.080.700	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	86.070.000	92.090.000	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	151.996.000	169.096.000	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	63.375.000	273.275.000	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	2.731.207.524	5.421.207.232	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	110.949.700	161.245.000	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	5.170.337.860	5.765.356.360	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	712.700.000	747.900.000	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	712.700.000	747.900.000	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.457.637.860	5.017.456.360	
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	0	71.015.000	
2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	125.249.700	139.969.700	
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	4.332.388.160	4.806.471.660	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6.560.388.025	7.947.675.140	
2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.560.388.025	7.947.675.140	
2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.560.388.025	7.947.675.140	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.971.375.275	6.486.762.390	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	22.580.650	22.580.650	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kinerja Perangkat Daerah			
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.330.650	12.330.650	
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.250.000	10.250.000	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.063.019.475	5.451.546.175	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.929.345.075	5.264.926.975	
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	133.674.400	186.619.200	
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000	60.000.000	
2.17.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60.000.000	60.000.000	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	371.167.750	471.167.750	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.170.300	17.170.300	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.500.000	24.500.000	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.778.150	31.778.150	
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.600.000	9.600.000	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.119.300	388.119.300	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.605.000	324.165.415	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.290.900	134.851.315	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.314.100	189.314.100	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.002.400	157.302.400	
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	131.002.400	134.302.400	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.000.000	23.000.000	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	55.470.300	55.470.300	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	55.470.300	55.470.300	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian,	23.820.300	23.820.300	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	31.650.000	31.650.000	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	44.445.000	421.445.000	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	44.445.000	232.945.000	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	44.445.000	232.945.000	
2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	188.500.000	
2.17.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	0	188.500.000	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	229.647.600	238.447.600	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	229.647.600	238.447.600	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	136.943.100	145.743.100	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	92.704.500	92.704.500	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	259.449.850	745.549.850	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	259.449.850	745.549.850	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	259.449.850	745.549.850	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	10.036.018.447	11.387.243.847	
2.18.2.07.3.32.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	10.036.018.447	11.387.243.847	
2.18.2.07.3.32.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	10.036.018.447	11.387.243.847	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.332.868.447	10.281.220.847	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.280.000	115.160.000	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.900.000	19.348.000	
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.124.000	12.974.000	
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.184.000	6.184.000	
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.404.000	8.504.000	
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.184.000	6.184.000	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47.300.000	48.882.000	
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.184.000	13.084.000	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.546.322.647	7.877.473.047	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.151.713.847	7.261.264.247	
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	358.320.000	579.920.000	
2.18.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.684.000	6.234.000	
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.684.000	8.156.800	
2.18.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.684.000	8.432.000	
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.684.000	6.234.000	
2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.552.800	7.232.000	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	281.900.000	423.500.000	
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	37.500.000	47.500.000	
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	244.400.000	376.000.000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	263.381.400	553.000.300	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.205.400	20.205.400	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	40.000.000	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.616.000	71.181.900	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	4.000.000	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193.560.000	417.613.000	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	707.394.400	825.997.500	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	383.100.000	397.310.000	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.294.400	428.687.500	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	432.590.000	486.090.000	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	324.350.000	377.850.000	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	108.240.000	108.240.000	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	62.370.000	62.370.000	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	36.300.000	36.300.000	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	36.300.000	36.300.000	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	26.070.000	26.070.000	
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	11.850.000	11.850.000	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	14.220.000	14.220.000	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	265.640.000	265.640.000	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	265.640.000	265.640.000	
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	16.650.000	12.980.000	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	248.990.000	252.660.000	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	133.400.000	133.400.000	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/	133.400.000	133.400.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kota			
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	14.000.000	14.000.000	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	22.490.000	22.490.000	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	52.050.000	52.050.000	
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	44.860.000	44.860.000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	95.830.000	498.703.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	95.830.000	498.703.000	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	14.520.000	16.040.000	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	31.210.000	399.590.000	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	50.100.000	83.073.000	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	145.910.000	145.910.000	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	145.910.000	145.910.000	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	145.910.000	145.910.000	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	16.413.868.095	21.444.098.095	
2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	16.413.868.095	21.444.098.095	
2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	16.413.868.095	21.444.098.095	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.033.501.395	7.415.501.395	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	154.809.850	209.229.850	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.909.850	3.969.850	
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	150.900.000	205.260.000	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.833.042.895	5.847.042.895	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.833.042.895	5.833.042.895	
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	14.000.000	
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	127.000.000	147.000.000	
2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	37.000.000	57.000.000	
2.19.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90.000.000	90.000.000	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	306.700.850	374.700.850	
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.622.000	29.622.000	
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.000.000	41.000.000	
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.878.950	53.878.950	
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	9.000.000	
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.199.900	241.199.900	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.347.800	471.167.800	
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.200.000	109.500.000	
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	141.147.800	361.667.800	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	364.600.000	366.360.000	
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	174.000.000	174.000.000	
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190.600.000	192.360.000	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEPEMUDAAN	637.315.000	1.443.315.000	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	350.315.000	956.315.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kabupaten/Kota			
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	57.630.000	57.630.000	
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	68.170.000	68.170.000	
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	224.515.000	830.515.000	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	287.000.000	487.000.000	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	287.000.000	487.000.000	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	8.168.050.200	12.010.280.200	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.720.965.200	5.351.315.200	
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	136.210.000	286.210.000	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1.584.755.200	5.065.105.200	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.261.760.000	4.261.760.000	
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	4.261.760.000	4.261.760.000	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	67.205.000	67.205.000	
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	67.205.000	67.205.000	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.118.120.000	2.330.000.000	
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1.015.590.000	1.127.470.000	
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	1.102.530.000	1.202.530.000	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	575.001.500	575.001.500	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	575.001.500	575.001.500	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	575.001.500	575.001.500	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	185.679.700	205.280.800	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	185.679.700	205.280.800	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	185.679.700	205.280.800	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	185.679.700	205.280.800	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	185.679.700	205.280.800	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	185.679.700	205.280.800	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	26.400.000	30.800.000	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	26.400.000	30.800.000	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	26.400.000	30.800.000	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	26.400.000	30.800.000	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26.400.000	30.800.000	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	26.400.000	30.800.000	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.160.890.000	1.565.890.000	
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.160.890.000	1.565.890.000	
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.160.890.000	1.565.890.000	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	478.175.000	478.175.000	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	478.175.000	478.175.000	
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	478.175.000	478.175.000	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	359.845.000	684.845.000	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	359.845.000	684.845.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	359.845.000	684.845.000	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	322.870.000	402.870.000	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	322.870.000	402.870.000	
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	276.000.000	175.560.000	
2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	46.870.000	227.310.000	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	7.840.680.389	8.829.364.389	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.840.680.389	8.829.364.389	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.840.680.389	8.829.364.389	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.702.281.239	7.241.783.239	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.403.050	177.990.250	
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	81.805.950	160.078.000	
2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.599.850	12.915.000	
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.997.250	4.997.250	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.716.151.089	5.742.990.089	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.624.181.139	5.630.140.139	
2.23.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	83.079.950	103.959.950	
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.140.100	5.140.100	
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.749.900	3.749.900	
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.000.000	67.320.000	
2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36.000.000	36.000.000	
2.23.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	31.320.000	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	245.961.000	597.922.200	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.495.100	24.086.300	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.766.900	25.705.900	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.720.000	6.720.000	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.979.000	541.410.000	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313.130.200	332.100.500	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	186.787.500	186.787.500	
2.23.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.000.000	24.000.000	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	107.342.700	121.313.000	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.635.900	323.460.200	
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	190.065.000	208.190.000	
2.23.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.570.900	115.270.200	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.025.039.400	1.430.221.400	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	947.846.600	1.159.028.600	
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	52.800.000	48.400.000	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.321.150	70.571.150	
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	655.959.950	705.679.950	
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	126.079.000	280.691.000	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	53.686.500	53.686.500	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	77.192.800	271.192.800	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	77.192.800	121.192.800	
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	150.000.000	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	113.359.750	157.359.750	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	113.359.750	157.359.750	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	3.972.350	3.972.350	
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	109.387.400	153.387.400	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	513.998.950	898.966.450	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	513.998.950	898.966.450	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	513.998.950	898.966.450	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	451.874.300	697.801.800	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	315.134.800	473.062.300	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	100.189.850	241.617.350	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	133.365.450	133.365.450	
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	81.579.500	98.079.500	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	89.639.650	133.639.650	
2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	28.199.600	72.199.600	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	61.440.050	61.440.050	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	47.099.850	91.099.850	
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	31.400.000	31.400.000	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	15.699.850	59.699.850	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	46.424.700	141.464.700	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	25.724.750	69.724.750	
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	25.724.750	69.724.750	
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah	20.699.950	71.739.950	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kecamatan dan Desa/Kelurahan			
2.24.03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	20.699.950	71.739.950	
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	15.699.950	59.699.950	
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	15.699.950	59.699.950	
2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	15.699.950	59.699.950	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.317.976.270	8.513.933.220	
2.09.3.27.3.25.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.317.976.270	8.513.933.220	
2.09.3.27.3.25.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.317.976.270	8.513.933.220	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.031.098.320	8.219.135.520	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	93.762.800	94.032.800	
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	78.663.700	78.933.700	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	15.099.100	15.099.100	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.937.335.520	8.125.102.720	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	544.045.020	786.922.220	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.373.630.500	7.318.520.500	
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.660.000	19.660.000	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	103.825.000	106.464.900	
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	103.825.000	106.464.900	
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	103.825.000	106.464.900	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	183.052.950	188.332.800	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	167.617.950	178.297.800	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	167.617.950	178.297.800	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	15.435.000	10.035.000	
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.435.000	10.035.000	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.500.000.000	1.595.520.000	
2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA	1.500.000.000	1.595.520.000	
2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA	1.500.000.000	1.595.520.000	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.099.596.000	1.114.116.000	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.099.596.000	1.114.116.000	
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	899.412.000	903.372.000	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	75.436.000	79.396.000	
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	124.748.000	131.348.000	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	234.376.000	306.796.000	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	234.376.000	306.796.000	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	60.000.000	74.500.000	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	174.376.000	232.296.000	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	166.028.000	174.608.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	166.028.000	174.608.000	
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	54.440.000	54.440.000	
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	111.588.000	120.168.000	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	46.579.552.872	84.602.221.252	
2.09.3.27.3.25.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	46.579.552.872	84.602.221.252	
2.09.3.27.3.25.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	46.579.552.872	84.602.221.252	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.236.276.772	24.214.360.062	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	689.304.800	1.076.021.540	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	684.304.950	1.071.021.690	
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.850	4.999.850	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.123.687.122	18.147.287.122	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.111.687.122	18.111.687.122	
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.000.000	35.600.000	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	435.040.000	435.040.000	
3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	110.800.000	110.800.000	
3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	324.240.000	324.240.000	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	418.892.100	1.031.175.100	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.179.400	13.179.400	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	101.527.700	102.207.700	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.040.000	5.040.000	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.145.000	910.748.000	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	879.703.800	2.660.968.300	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	879.703.800	2.660.968.300	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	252.660.950	396.880.000	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.300.000	12.400.000	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.360.950	384.480.000	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	436.988.000	466.988.000	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	436.988.000	466.988.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	14.449.545.940	30.572.867.290	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	8.625.919.350	24.042.674.950	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	201.928.550	201.928.550	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	8.423.990.800	23.840.746.400	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.894.813.340	2.300.579.090	
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	1.011.683.340	1.411.449.440	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	883.130.000	889.129.650	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	127.938.000	127.938.000	
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	127.938.000	127.938.000	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.800.875.250	4.101.675.250	
3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	3.180.632.850	3.280.632.850	
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	620.242.400	821.042.400	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.186.523.760	25.785.034.850	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	6.383.475.810	22.924.835.650	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	189.950.000	189.950.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Jaringan Irigasi Usaha Tani			
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	1.748.000	1.748.000	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	5.436.917.810	21.543.782.650	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	754.860.000	1.189.355.000	
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.803.047.950	2.860.199.200	
3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	1.803.047.950	2.860.199.200	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	454.948.200	1.610.315.750	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	275.782.650	355.750.350	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	84.819.050	164.786.750	
3.27.04.2.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	190.963.600	190.963.600	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	108.227.800	1.113.227.650	
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	108.227.800	1.113.227.650	
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	70.937.750	141.337.750	
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	70.937.750	141.337.750	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	466.511.450	577.096.550	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	466.511.450	577.096.550	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	466.511.450	577.096.550	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.785.746.750	1.842.546.750	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.785.746.750	1.842.546.750	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	315.553.550	315.553.550	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	774.035.200	774.035.200	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	696.158.000	752.958.000	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.291.420.500	2.389.830.680	
2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.291.420.500	2.389.830.680	
2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.291.420.500	2.389.830.680	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	23.095.000	38.735.000	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	23.095.000	27.495.000	
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	23.095.000	27.495.000	
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	0	11.240.000	
3.30.02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	0	11.240.000	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	754.672.500	1.819.842.680	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	709.101.500	1.752.971.680	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	267.066.200	1.170.390.680	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	442.035.300	582.581.000	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	45.571.000	66.871.000	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	27.820.000	32.220.000	
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	17.751.000	34.651.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	102.546.000	106.946.000	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	102.546.000	106.946.000	
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	61.960.200	66.360.200	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	40.585.800	40.585.800	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	168.602.900	177.402.900	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	168.602.900	177.402.900	
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	168.602.900	177.402.900	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	209.304.100	213.704.100	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	209.304.100	213.704.100	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	124.705.100	124.705.100	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	84.599.000	88.999.000	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	33.200.000	33.200.000	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	33.200.000	33.200.000	
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	33.200.000	33.200.000	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	978.964.400	2.090.664.400	
2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	978.964.400	2.090.664.400	
2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	978.964.400	2.090.664.400	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	74.627.300	962.127.300	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana	74.627.300	962.127.300	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	74.627.300	962.127.300	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	34.897.200	34.897.200	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	34.897.200	34.897.200	
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	34.897.200	34.897.200	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	869.439.900	1.093.639.900	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	869.439.900	1.093.639.900	
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	69.439.900	93.639.900	
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	800.000.000	1.000.000.000	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	226.457.000	226.457.000	
2.18.2.07.3.32.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	226.457.000	226.457.000	
2.18.2.07.3.32.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	226.457.000	226.457.000	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	226.457.000	226.457.000	
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	226.457.000	226.457.000	
3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	50.730.000	49.230.000	
3.32.04.2.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan	175.727.000	177.227.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Pemukiman			
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	50.075.631.165	103.092.399.065	
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	50.075.631.165	103.092.399.065	
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	50.075.631.165	103.092.399.065	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.960.200.615	65.233.613.215	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	307.181.400	1.772.456.950	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	271.421.450	1.537.396.950	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.759.950	235.060.000	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.681.173.850	13.092.273.050	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.565.733.950	12.773.765.950	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81.526.000	208.461.700	
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.398.700	90.861.200	
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.515.200	19.184.200	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	905.000.000	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	905.000.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.941.254.639	22.142.592.139	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200.000.000	1.511.840.000	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.399.924.200	9.716.724.200	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	226.018.000	4.106.333.500	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	900.000.000	960.420.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	396.390.439	735.890.439	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.818.922.000	5.111.384.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.315.860.650	7.592.405.000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.881.684.300	2.973.100.000	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	310.753.350	2.116.003.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kantor			
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.123.423.000	2.503.302.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.168.840.376	14.518.271.076	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.154.383.000	3.152.546.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	284.435.000	507.252.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.859.255.932	7.066.501.632	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.738.386.500	2.105.846.500	
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.132.379.944	1.686.124.944	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.152.197.800	2.195.197.800	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	260.197.800	260.197.800	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	492.000.000	1.535.000.000	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	400.000.000	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	925.890.400	1.138.524.200	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	349.149.250	492.979.250	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	326.060.200	326.060.000	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	250.680.950	319.484.950	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.467.801.500	1.876.893.000	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	1.679.408.500	1.022.087.000	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	154.344.000	274.866.000	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	634.049.000	579.940.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	13.875.742.600	35.398.674.100	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	718.772.600	1.112.416.900	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	513.973.700	568.156.500	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	105.352.000	308.614.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	99.446.900	235.646.400	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	11.985.911.800	32.782.942.000	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8.377.476.050	14.882.006.250	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	3.487.358.000	17.779.858.000	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	121.077.750	121.077.750	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	768.577.200	1.035.190.200	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	321.256.000	540.456.000	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	355.865.700	355.865.700	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	91.455.500	138.868.500	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	402.481.000	468.125.000	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	402.481.000	468.125.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.239.687.950	2.460.111.750	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	388.767.600	722.878.600	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	42.170.000	65.116.000	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	175.115.900	192.401.900	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	44.036.750	243.643.750	
4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	127.444.950	221.716.950	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	265.828.800	591.737.000	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	100.287.000	169.733.200	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	96.708.900	238.064.900	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	68.832.900	183.938.900	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	548.389.550	1.042.122.150	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	182.149.850	259.998.850	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	168.750.000	401.276.000	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	197.489.700	380.847.300	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	36.702.000	103.374.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	36.702.000	103.374.000	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	42.845.649.547	50.845.648.927	
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	42.845.649.547	50.845.648.927	
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	42.845.649.547	50.845.648.927	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.185.970.397	35.476.119.277	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	316.558.000	373.648.000	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.950.000	80.670.000	
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	76.483.000	100.903.000	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	184.125.000	192.075.000	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.801.639.917	3.129.436.897	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.729.779.917	3.052.536.897	
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.800.000	42.800.000	
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	29.060.000	34.100.000	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	599.200.000	849.200.000	
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80.000.000	80.000.000	
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	519.200.000	769.200.000	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.410.889.000	4.781.914.000	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.017.000	75.013.500	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	211.400.000	727.374.000	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	78.000.000	128.054.800	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	146.650.000	196.650.000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.924.822.000	3.654.821.700	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.170.000.000	1.670.000.000	
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.170.000.000	1.670.000.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.056.944.700	3.788.864.600	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	723.000.200	723.000.200	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.333.944.500	3.065.864.400	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.616.730.000	4.288.047.000	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	207.080.000	437.087.000	
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.409.650.000	3.850.960.000	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	14.878.231.180	14.959.231.180	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	14.345.231.180	14.345.231.180	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	533.000.000	614.000.000	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.335.777.600	1.635.777.600	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.335.777.600	1.635.777.600	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	13.659.679.150	15.369.529.650	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5.207.549.500	5.902.381.500	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	801.348.300	801.348.300	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.046.974.000	4.346.974.000	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	171.057.200	394.057.200	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	188.170.000	360.002.000	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	307.504.800	252.554.800	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	46.160.000	25.160.000	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	44.100.000	21.600.000	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	82.144.800	70.694.800	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	72.250.000	72.250.000	
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	18.600.000	18.600.000	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	44.250.000	44.250.000	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	213.005.000	176.175.000	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	32.000.000	32.000.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	30.190.000	30.190.000	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	30.400.000	0	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	30.190.000	36.390.000	
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	30.190.000	0	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	9.140.000	0	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	28.520.000	38.520.000	
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	22.375.000	39.075.000	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.920.045.000	2.282.456.000	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	874.200.000	1.074.976.000	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	734.640.000	884.640.000	
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	123.500.000	123.500.000	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	187.705.000	199.340.000	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.027.973.000	1.170.746.500	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	57.000.000	57.000.000	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	39.200.000	19.006.000	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	931.773.000	1.094.740.500	
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	293.575.000	293.575.000	
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	293.575.000	293.575.000	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	4.690.026.850	5.291.640.850	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.257.711.850	4.825.410.850	
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	52.565.000	71.480.000	
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	82.500.000	130.500.000	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	297.250.000	264.250.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5.01	PERENCANAAN	12.661.902.625	14.001.999.075	
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	12.661.902.625	14.001.999.075	
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	12.661.902.625	14.001.999.075	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.454.152.125	9.974.798.025	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.533.700	163.023.600	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.979.350	40.979.350	
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	56.799.700	59.089.700	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.754.650	62.954.550	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.708.438.375	5.881.798.325	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.630.888.715	5.801.958.715	
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.744.860	60.744.860	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.400.100	8.400.100	
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.404.700	10.694.650	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.715.199.850	1.018.909.850	
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18.000.000	42.750.000	
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.697.199.850	976.159.850	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	584.129.200	1.025.157.250	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.667.700	23.667.700	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210.149.800	332.849.800	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.871.700	109.999.750	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.640.000	8.640.000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285.800.000	550.000.000	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	417.008.000	217.358.000	
5.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	417.008.000	217.358.000	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	574.113.000	574.113.000	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	196.000.000	196.000.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	dan Listrik			
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	378.113.000	378.113.000	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	304.730.000	1.094.438.000	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.290.000	195.998.000	
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	158.440.000	898.440.000	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.417.333.850	1.617.333.200	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	818.644.350	1.107.567.550	
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	149.125.850	153.683.850	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	32.299.750	13.800.000	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	206.288.800	125.419.800	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	430.929.950	814.663.900	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	502.073.700	391.722.850	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	251.225.850	185.436.850	
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	250.847.850	206.286.000	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	96.615.800	118.042.800	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	96.615.800	118.042.800	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.790.416.650	2.409.867.850	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	869.230.000	1.139.230.000	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	308.776.000	484.126.000	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	128.810.000	223.460.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	115.705.000	115.705.000	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	78.400.000	78.400.000	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	44.590.000	44.590.000	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	47.260.000	47.260.000	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	37.368.000	37.368.000	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	108.321.000	108.321.000	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	475.698.600	694.028.800	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	103.960.000	120.920.000	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	29.999.900	39.418.500	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12.999.850	18.260.000	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	54.898.300	127.862.750	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	90.266.000	99.066.000	
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	110.198.800	137.198.800	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	39.242.900	39.242.900	
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	34.132.850	112.059.850	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	445.488.050	576.609.050	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	91.776.800	130.366.800	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	22.399.700	24.295.950	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	104.024.950	104.024.950	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	227.286.600	317.921.350	
5.02	KEUANGAN	219.939.885.613	272.592.632.780	
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	219.939.885.613	272.592.632.780	
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	219.939.885.613	272.592.632.780	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.298.536.173	18.745.798.533	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147.125.750	218.716.110	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.000.000	63.799.800	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	83.699.900	110.340.460	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.425.850	44.575.850	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.149.739.073	11.372.831.073	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.056.282.323	11.279.374.323	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.992.800	30.992.800	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	53.254.300	53.254.300	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.209.650	9.209.650	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.264.486.500	2.964.486.500	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	48.000.000	48.000.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kelengkapannya			
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60.436.500	60.436.500	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.156.050.000	2.856.050.000	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	602.307.150	2.038.807.150	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	92.434.500	117.434.500	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	249.972.100	1.379.472.100	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.755.700	10.755.700	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.999.850	6.999.850	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.145.000	524.145.000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	518.070.000	604.070.000	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000	3.250.000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	365.730.000	440.730.000	
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.000.000	111.000.000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.090.000	49.090.000	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	616.807.700	1.546.887.700	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	288.650.000	294.650.000	
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	328.157.700	1.252.237.700	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	201.705.565.200	250.074.778.597	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.343.999.750	1.788.051.750	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	141.620.000	94.520.000	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	144.770.000	97.670.000	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	69.350.000	535.759.000	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	24.860.000	24.860.000	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah	323.800.000	304.000.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	321.119.750	305.319.750	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	318.480.000	425.923.000	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.519.635.000	1.569.635.150	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	170.000.000	206.200.500	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	310.000.000	283.151.250	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	200.000.000	268.048.400	
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	839.635.000	812.235.000	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.339.723.050	1.773.075.800	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	106.046.750	103.992.650	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	91.772.000	136.931.400	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	197.745.600	184.095.100	
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	325.728.200	694.863.900	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	492.120.000	534.722.250	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	126.310.500	118.470.500	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	197.502.207.400	244.944.015.897	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	182.644.826.700	235.267.912.111	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Keuangan			
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	13.500.000.000	8.264.018.431	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	1.357.380.700	1.412.085.355	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.836.029.250	2.157.355.250	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.836.029.250	2.157.355.250	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	120.489.150	120.489.150	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	105.605.600	82.005.600	
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	208.261.200	285.661.200	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	85.075.100	121.425.100	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	374.644.850	552.594.850	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	46.687.450	50.687.450	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	431.926.650	364.226.650	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	349.932.750	471.932.750	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	113.406.500	108.332.500	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.099.754.990	1.614.700.400	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.099.754.990	1.614.700.400	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	187.915.190	345.486.200	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	50.030.600	50.030.600	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	163.129.800	254.287.800	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	222.567.500	237.496.400	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	165.131.900	256.407.900	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	57.111.900	57.111.900	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	117.636.600	230.339.600	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	20.439.100	20.439.100	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	115.792.400	163.100.900	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.03	KEPEGAWAIAN	13.979.831.192	15.554.451.192	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	13.979.831.192	15.554.451.192	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	13.979.831.192	15.554.451.192	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.997.853.392	7.396.669.592	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.587.350	115.587.350	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.554.800	76.554.800	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.909.700	17.909.700	
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.122.850	21.122.850	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.380.920.182	4.835.920.182	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.248.476.382	4.703.476.382	
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	114.643.250	114.643.250	
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.800.550	17.800.550	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	542.741.450	904.357.650	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	240.150.500	509.550.500	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.023.000	19.023.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	286.567.950	375.784.150	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.165.700	363.365.700	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.200.000	116.200.000	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	124.965.700	247.165.700	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	727.438.710	1.177.438.710	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.765.000	112.765.000	
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	614.673.710	1.064.673.710	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7.981.977.800	8.157.781.600	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2.887.178.100	3.051.658.200	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2.683.001.000	2.800.001.000	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	40.099.300	40.099.300	
5.03.02.2.01.08	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	21.999.900	52.480.000	
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	142.077.900	159.077.900	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	142.957.150	183.207.150	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	69.357.200	109.607.200	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	73.599.950	73.599.950	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	4.738.448.200	4.707.506.550	
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	1.211.999.250	611.999.250	
5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1.696.232.250	1.925.272.250	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	394.323.000	561.315.350	
5.03.02.2.03.06	Fasilitas Sertifikasi Jabatan ASN	315.745.950	216.871.950	
5.03.02.2.03.10	Fasilitas Sertifikasi Fungsional ASN	1.120.147.750	1.392.047.750	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	213.394.350	215.409.700	
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	89.924.700	115.228.000	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	24.740.000	0	
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	26.415.700	26.415.700	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	49.264.750	48.603.000	
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	23.049.200	25.163.000	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.084.311.600	1.491.291.600	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.084.311.600	1.491.291.600	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.084.311.600	1.491.291.600	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.084.311.600	1.491.291.600	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.084.311.600	1.491.291.600	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	2.084.311.600	1.491.291.600	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.123.759.550	1.273.278.700	
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.123.759.550	1.273.278.700	
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.123.759.550	1.273.278.700	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.123.759.550	1.273.278.700	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	76.056.600	498.945.700	
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	0	375.060.000	
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	76.056.600	123.885.700	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	797.703.000	524.333.000	
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	797.703.000	524.333.000	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	249.999.950	250.000.000	
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	249.999.950	250.000.000	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	8.445.919.805	14.006.280.058	
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	8.445.919.805	14.006.280.058	
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	8.445.919.805	14.006.280.058	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.448.850.505	10.534.691.458	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.799.700	99.724.350	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.699.850	59.324.550	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.099.850	40.399.800	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.132.903.690	6.187.245.085	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.132.903.690	6.187.245.085	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	272.000.000	502.250.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.000.000	134.450.000	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	250.000.000	367.800.000	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	777.447.400	1.465.004.367	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	179.862.500	329.955.667	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.484.900	63.026.700	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.400.000	8.400.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	558.700.000	1.063.622.000	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	618.007.200	1.301.554.440	
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	500.500.000	
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	618.007.200	801.054.440	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.583.515	341.952.215	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.350.000	10.820.000	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.800.000	130.800.000	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.433.515	200.332.215	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.109.000	636.961.001	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.896.000	272.896.000	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	164.213.000	364.065.001	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.197.049.700	1.715.369.700	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	638.899.850	521.219.850	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	148.500.000	120.050.000	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	192.500.000	192.500.000	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	34.500.000	25.270.000	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	69.000.000	9.000.000	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	42.999.850	42.999.850	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil	151.400.000	131.400.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	558.149.850	1.194.149.850	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	57.000.000	693.000.000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	501.149.850	501.149.850	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	800.019.600	1.756.218.900	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	800.019.600	1.756.218.900	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	112.650.000	101.400.000	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	91.144.700	1.081.094.000	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	461.024.900	461.024.900	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	135.200.000	112.700.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			
7.01	KECAMATAN	34.326.521.754	39.725.679.790	
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN LAMPIHONG	4.135.243.376	4.806.551.776	
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN LAMPIHONG	4.135.243.376	4.806.551.776	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.524.465.676	4.191.188.076	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.931.000	20.131.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.948.700	15.548.700	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.982.300	4.582.300	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.019.733.376	3.027.063.276	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.019.733.376	3.027.063.276	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.000.000	60.000.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000	60.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.398.300	280.718.900	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.885.000	13.511.600	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.513.300	267.207.300	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	307.000.000	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	307.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.764.400	433.664.400	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.800.000	46.300.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.736.500	253.136.500	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.227.900	134.227.900	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.638.600	62.610.500	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.538.600	56.510.500	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.100.000	6.100.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	68.193.200	71.534.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	68.193.200	71.534.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	68.193.200	71.534.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	318.729.600	316.200.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	318.729.600	316.200.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	318.729.600	316.200.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	33.472.600	38.627.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33.472.600	38.627.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	33.472.600	38.627.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	145.309.200	159.039.200	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	145.309.200	159.039.200	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	sesuai Penugasan Kepala Daerah			
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	145.309.200	159.039.200	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	45.073.100	29.963.500	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.073.100	29.963.500	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36.147.600	21.538.000	
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8.925.500	8.425.500	
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN BATUMANDI	3.362.059.219	4.314.938.819	
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN BATUMANDI	3.362.059.219	4.314.938.819	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.812.238.983	3.736.666.319	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000	4.700.500	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	250.000	4.700.500	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.373.384.483	2.986.387.319	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.312.414.483	2.870.275.019	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.720.000	109.120.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	250.000	6.992.300	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.950.000	34.500.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20.000.000	24.500.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.950.000	10.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	191.042.500	274.942.500	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.625.000	2.625.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	72.400.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.925.500	48.925.500	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.242.000	13.242.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	91.250.000	137.750.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Konsultasi SKPD			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	230.000.000	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	230.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.912.000	101.936.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.400.000	77.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.512.000	24.936.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.700.000	104.200.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.600.000	40.100.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.480.000	18.480.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.620.000	45.620.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	106.327.736	118.675.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	106.327.736	118.675.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	106.327.736	118.675.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	267.080.000	271.260.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	267.080.000	271.260.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	267.080.000	271.260.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.750.000	8.500.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.750.000	8.500.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11.750.000	8.500.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	140.812.500	152.637.500	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	140.812.500	152.637.500	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	sesuai Penugasan Kepala Daerah			
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	140.812.500	152.637.500	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	23.850.000	27.200.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.850.000	27.200.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.050.000	17.400.000	
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	9.800.000	9.800.000	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN AWAYAN	4.060.814.867	4.476.814.867	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN AWAYAN	4.060.814.867	4.476.814.867	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.493.089.867	3.874.019.867	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.474.000	7.974.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.898.000	2.398.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.576.000	2.576.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.036.192.867	2.994.019.867	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.990.364.867	2.943.871.867	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	43.500.000	47.820.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.328.000	2.328.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000	40.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.322.000	305.285.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.304.500	15.304.500	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.449.200	74.522.200	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.642.300	19.642.300	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.926.000	195.816.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.833.200	349.833.200	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	230.000.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.833.200	119.833.200	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.399.800	79.399.800	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.000.000	55.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.399.800	24.399.800	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.868.000	97.508.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.620.000	41.620.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.500.000	16.500.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.748.000	39.388.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	61.885.000	129.325.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	61.885.000	129.325.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	61.885.000	129.325.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	267.740.000	257.240.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	267.740.000	257.240.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	267.740.000	257.240.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.090.000	12.590.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17.090.000	12.590.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	17.090.000	12.590.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	139.800.000	121.950.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	139.800.000	121.950.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	139.800.000	121.950.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	81.210.000	81.690.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	81.210.000	81.690.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	62.700.000	63.180.000	
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	18.510.000	18.510.000	
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN HALONG	3.738.941.643	4.299.178.603	
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN HALONG	3.738.941.643	4.299.178.603	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.048.504.843	3.573.295.803	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.216.000	45.216.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.006.000	4.006.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.335.000	2.335.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.875.000	38.875.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.670.814.843	2.808.291.803	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.568.214.843	2.703.651.803	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	102.600.000	104.640.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.880.000	40.880.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.880.000	40.880.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.476.000	190.042.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.987.000	7.987.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.489.000	182.055.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	296.000.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	230.000.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	66.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.978.000	111.842.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.200.000	24.200.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.778.000	87.642.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.140.000	81.024.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.940.000	63.424.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.200.000	17.600.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	108.418.000	134.818.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	108.418.000	134.818.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	108.418.000	134.818.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	328.200.000	328.200.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	328.200.000	328.200.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	328.200.000	328.200.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.014.000	9.014.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.014.000	9.014.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.014.000	9.014.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	179.940.000	158.186.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	179.940.000	158.186.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	179.940.000	158.186.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	64.864.800	95.664.800	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	64.864.800	95.664.800	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	57.300.000	88.100.000	
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7.564.800	7.564.800	
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN JUAI	3.478.609.352	4.140.076.353	
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN JUAI	3.478.609.352	4.140.076.353	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.762.760.252	3.333.586.453	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.596.700	55.396.700	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.390.000	47.190.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.066.700	3.066.700	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.140.000	5.140.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.357.686.752	2.540.823.953	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.284.944.152	2.463.681.353	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72.742.600	77.142.600	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.320.000	58.080.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	46.320.000	58.080.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.055.800	412.744.800	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.270.000	6.270.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.500.000	311.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.399.800	28.399.800	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.886.000	67.075.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.000.000	127.200.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.200.000	20.400.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	80.800.000	97.800.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	dan Listrik			
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000	9.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.101.000	139.341.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.750.000	76.750.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.351.000	62.591.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	116.107.300	136.848.100	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	116.107.300	136.848.100	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	116.107.300	136.848.100	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.897.200	32.897.200	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.897.200	32.897.200	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.897.200	32.897.200	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	43.200.000	56.400.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	43.200.000	56.400.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	43.200.000	56.400.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	222.035.000	234.035.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	222.035.000	234.035.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	222.035.000	234.035.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	323.609.600	346.309.600	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	323.609.600	346.309.600	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	53.519.800	67.419.800	



Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan TA. 2022

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Pendayagunaan Aset Desa			
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	258.000.000	258.000.000	
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12.089.800	20.889.800	
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN PARINGIN	7.644.151.131	8.209.696.501	
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN PARINGIN	5.434.151.931	5.999.697.301	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.958.268.131	5.537.844.301	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.777.900	12.777.900	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.777.900	12.777.900	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.793.049.131	3.988.900.071	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.793.049.131	3.988.900.071	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.025.000	107.742.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	23.150.000	34.650.000	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.875.000	3.092.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	70.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	455.389.900	540.108.650	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.049.600	16.449.600	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.700.000	89.940.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.523.800	31.288.950	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.440.000	8.160.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	385.676.500	394.270.100	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.483.000	263.183.000	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	230.700.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	19.483.000	32.483.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	465.942.800	493.127.280	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	116.470.000	126.470.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	dan Listrik			
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	349.472.800	366.657.280	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.600.400	132.005.400	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.205.280	74.610.280	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.395.120	57.395.120	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	77.063.800	64.999.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	77.063.800	64.999.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	77.063.800	64.999.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	256.050.000	251.704.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	256.050.000	251.704.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	256.050.000	251.704.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.650.000	10.030.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.650.000	10.030.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.650.000	10.030.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	116.995.000	116.995.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	116.995.000	116.995.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	116.995.000	116.995.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.125.000	18.125.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.125.000	18.125.000	
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	18.125.000	18.125.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.0.00.0.00.06.0001	KELURAHAN PARINGIN KOTA	1.105.000.000	1.105.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.105.000.000	1.105.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.105.000.000	1.105.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	805.000.000	805.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	300.000.000	300.000.000	
7.01.0.00.0.00.06.0002	KELURAHAN PARINGIN TIMUR	1.104.999.200	1.104.999.200	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.104.999.200	1.104.999.200	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.104.999.200	1.104.999.200	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	804.999.200	804.999.200	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	300.000.000	300.000.000	
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN TEBING TINGGI	2.842.323.132	3.322.723.132	
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN TEBING TINGGI	2.842.323.132	3.322.723.132	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.268.347.327	2.701.833.827	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.652.200	62.832.200	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.140.000	5.780.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.355.000	4.995.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.655.000	7.255.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.635.000	35.535.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.867.200	9.267.200	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.879.642.877	1.939.642.877	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.879.642.877	1.939.642.877	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.500.000	41.500.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16.500.000	41.500.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.838.750	213.756.750	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	900.000	900.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	40.935.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	600.000	5.000.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.869.950	30.669.950	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.242.800	8.242.800	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.226.000	128.009.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.756.500	235.550.000	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	230.800.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	4.756.500	4.750.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.037.000	126.637.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.597.100	56.397.100	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	18.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.439.900	52.239.900	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.920.000	81.915.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.780.000	54.675.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	7.000.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.140.000	20.240.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	94.929.200	94.329.200	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	94.929.200	94.329.200	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	94.929.200	94.329.200	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	174.533.200	173.365.500	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	174.533.200	173.365.500	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	174.533.200	173.365.500	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	221.519.800	229.101.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	221.519.800	229.101.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	221.519.800	229.101.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	82.993.605	124.093.605	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	82.993.605	124.093.605	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	72.579.000	99.279.000	
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10.414.605	24.814.605	
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	5.064.379.034	6.155.699.739	
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	3.993.459.434	5.084.780.139	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.361.569.434	4.315.390.139	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.712.500	4.712.500	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.712.500	4.712.500	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.990.809.434	3.464.750.139	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.923.459.434	3.383.840.139	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67.350.000	80.910.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.750.000	2.750.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2.750.000	2.750.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.419.500	211.009.200	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.532.800	11.532.800	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.217.700	25.307.400	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.669.000	174.169.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	241.000.000	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	230.000.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0	11.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	240.403.000	331.193.300	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.400.000	86.400.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.003.000	244.793.300	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.475.000	59.975.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.475.000	59.975.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	117.435.000	117.435.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12.000.000	12.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.000.000	12.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	105.435.000	105.435.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	105.435.000	105.435.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.555.000	213.165.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.555.000	19.165.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.555.000	19.165.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.000.000	194.000.000	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	7.000.000	194.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	229.040.000	165.930.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	229.040.000	165.930.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	217.045.000	153.935.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11.995.000	11.995.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	272.860.000	272.860.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	272.860.000	272.860.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	213.840.000	213.840.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	40.000.000	40.000.000	
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	6.320.000	6.320.000	
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12.700.000	12.700.000	
7.01.0.00.0.00.08.0001	KELURAHAN BATU PIRING	1.070.919.600	1.070.919.600	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.070.919.600	1.070.919.600	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.070.919.600	1.070.919.600	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	750.000.000	750.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	320.919.600	320.919.600	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.608.509.207	9.135.486.950	
1.05.8.01.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.608.509.207	9.135.486.950	
1.05.8.01.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.608.509.207	9.135.486.950	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.786.216.207	3.781.445.350	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.550.900	89.030.900	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.125.000	72.605.000	
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.425.900	16.425.900	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.277.201.807	2.705.045.250	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.241.337.707	2.653.374.350	
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.162.000	1.162.000	
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	34.702.100	50.508.900	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.575.000	125.620.000	
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2.975.000	40.260.000	
8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23.600.000	85.360.000	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.734.100	450.237.900	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi	6.849.000	9.470.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.840.000	170.771.000	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.355.100	10.354.900	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.060.000	2.640.000	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.630.000	257.002.000	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.658.400	187.802.300	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.700.000	39.700.000	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.400.000	65.412.000	
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.800.000	12.550.000	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.758.400	70.140.300	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.496.000	223.709.000	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.736.000	135.949.000	
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.760.000	87.760.000	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	60.850.000	3.081.630.000	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	60.850.000	3.081.630.000	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60.850.000	3.081.630.000	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	833.870.000	920.840.000	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	833.870.000	920.840.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	49.276.000	69.736.000	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40.574.000	74.574.000	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	744.020.000	776.530.000	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	100.000.000	162.020.000	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100.000.000	162.020.000	
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	62.006.000	89.486.000	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	37.994.000	72.534.000	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	50.003.000	88.041.000	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	50.003.000	88.041.000	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	37.518.000	70.056.000	
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	12.485.000	17.985.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	777.570.000	1.101.510.600	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	777.570.000	1.101.510.600	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	260.700.000	345.240.000	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	185.870.000	216.660.000	
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	331.000.000	458.190.000	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	0	81.420.600	



4.2 Perkiraan Plafon Anggaran Belanja Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Secara umum alokasi perubahan plafon sementara belanja daerah untuk tahun anggaran 2022 diasumsikan sebagaimana tabulasi berikut;

Tabel 4.2

Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1	Belanja Pegawai	438.400.010.322
2	Belanja Barang dan Jasa	617.186.878.500
3	Belanja Hibah	63.548.137.300
4	Belanja Bantuan Sosial	4.001.243.003
5	BELANJA MODAL	418.166.811.839
	Belanja Modal Tanah	7.037.500.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.314.232.870
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.034.219.209
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	244.928.202.408
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	852.657.352
6	Belanja Tidak Terduga	8.282.018.431
7	Belanja Bagi Hasil	1.404.693.655
8	Belanja Bantuan Keuangan	235.260.520.411
	TOTAL	1.786.250.313.461



BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan daerah menempati posisi yang sangat strategis sebagai transaksi untuk mencapai keseimbangan anggaran dengan tetap memperhatikan misi untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah timbul karena jumlah belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah, sehingga menimbulkan defisit.

Pada Tahun Anggaran 2022 penerimaan pembiayaan ditargetkan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA), sebesar Rp144.632.312.045,00 yang kemudian terkoreksi sebesar 8,80% atau sebesar Rp 12.732.825.396,46 menjadi Rp 131.899.486.648,54. Sedangkan pengeluaran pembiayaan untuk tahun anggaran 2022 murni direncanakan Rp10.000.000.000,00 meningkat menjadi Rp 55.000.000.000,00 atau sebesar 450%.

Selanjutnya pada perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara Secara umum asumsi pembiayaan mengalami penurunan sebesar Rp30.910.964.832,00 dari asumsi sebelum perubahan sebesar Rp57.732.825.396,46 atau turun sebesar 42,88% menjadi Rp76.899.486.648,54 sesudah perubahan tahun anggaran 2022. Dengan demikian struktur pembiayaan daerah sebagaimana tabel berikut;



Tabel 5.1

Struktur Perkiraan Pembiayaan daerah

PEMBIAYAAN DAERAH	PLAFON MURNI TAHUN 2022	PERKIRAAN PLAFON TAHUN 2022	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	144.632.312.045,00	131.899.486.648,54	(12.732.825.396,46)	(21,5%)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	144.632.312.045,00	131.899.486.648,54	(12.732.825.396,46)	(21,5%)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000,00	55.000.000.000,00	45.000.000.000,00	450%
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	55.000.000.000,00	45.000.000.000,00	450%
PEMBIAYAAN NETTO	134.632.312.045,00	76.899.486.648,54	(57.732.825.396,46)	(42,88%)



BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup, penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ini, disusun berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, namun tetap memuat Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah sebelumnya sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 ini disusun untuk dibahas dan disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Paringin, Juli 2022

BUPATI BALANGAN

ttd

H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom